

Majalah Bulanan

# air minum

Edisi 353 | Februari 2025

ISSN 0126-2785

Persatuan  
Perusahaan Air Minum  
Seluruh Indonesia



PERUMDA SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

**MENJAWAB TANTANGAN  
PENYEDIAAN AIR MINUM AMAN**

Persoalan Penyediaan Air Minum

**FENOMENA PUNCAK  
GUNUNG ES**



MEJA & KURSI SEKOLAH



WWW.SCHOOL.CO.ID

**TABUNG MEDIA**  
Manual System With 3 Way Valve



**BEST PRICE  
BEST QUALITY!!!**



PC & PVC TUBE SETTLER



BOX WATER METER 999



BOX WATER METER



FINE BUBBLE DIFFUSER



TUBE BUBBLE DIFFUSER



FULL STAINLESS STEEL 304



SS 1054 FRP



FILTER NOZZLE FOR PIPE



D-20



AJXL

30 cm - 50 cm



KJ2XL

30 cm - 50 cm



LATERAL

2 RIUAS-20 RIUAS



KP4-3/4" NPT



KP3-3/4" NPT



KP2-3/4" NPT



CJ4-1 1/4" WW



CJ3-1" NPT



EP2-3/4" WW



CP1-3/4" NPT



PIPE DYNABOLD 3/4" WW

DYNA BOLT

PIPE SADDLE 2"

PIPE SADDLE 3"

PIPE SADDLE 4"



HUB MSG6-55



HUB MSK6-55



HUB MSK5-59



PALL RING

60 mm-36 mm-25 mm



KJ3-FULL DRAT 1" NPT



KJ4-3/4" WW



KJ3-3/4" WW



KJ2-3/4" WW



AJ-1 1/4" WW



AJ-3/4" WW



AJ-1" NPT



AJ-3/4" NPT



AJDB-3/4" WW



AJL DB-3/4" WW



AJL-3/4" WW



HUB MSG6-55



D-26



D-13



**DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN/TI  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR**

Mengucapkan

*Selamat Ulang Tahun*  
**MAJALAH  
AIR MINUM**



**Muhammad Ja'is, S.E., M.M.**  
Direktur Umum

**Ir. Suparjan, S.T., M.T.**  
Direktur Utama

**Galuh B Munanto, S.T., M.T.**  
Direktur Teknik



Web  
[perumdaamt.kutaitimurkab.go.id](http://perumdaamt.kutaitimurkab.go.id)



Facebook  
Perumdam Tirta Tuah Benua



Instagram  
Perumdam\_tirtatuahtbenuakutim



Tiktok  
Perumdam Tirta Tuah Benua



YouTube  
Perumdam Kutim

# daftar isi

## MAJALAH AIR MINUM Edisi 353 | Februari 2025

- 3 Dari Redaksi: Lebih Besar dari yang Terlihat
- 4 Hotspot: Kado Awal Tahun bagi Tukang Ledeng
- 6 English Summary: Achieving 40 Percent Access to Drinking Water Challenges
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI Januari 2025

### SERAMBI

- 22 Kolaborasi untuk Masa Depan Air Indonesia
- Rakor PP dan Dewas PERPAMSI
- 23 BUMD AM yang Inklusif dan Responsif GEDSI

### LAPORAN KHUSUS

- 24 Kiprah 50 Tahun Majalah Air Minum PERPAMSI
- 26 Sekali Mengalir Terus Mengalir

### COVER STORY

- 28 Perumda Air Minum Surya Sembada
- Kota Surabaya
- Menjawab Tantangan Penyediaan Air Minum Aman

### ALB

- 32 Pt Multi Gala Nusantara
- Berkontribusi Mendukung Air Minum Perpipaan Indonesia

### PERSONA

- 34 Beni Iskandar, S.H.
- Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar
- Ahli Hukum yang Melakukan Perubahan Positif

### PROFIL

- 38 Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka
- Komitmen Meningkatkan Pertumbuhan dan Kinerja

### MANAJEMEN

- 42 Kuasa Kolaborasi
- 44 Memahami dan Mengatasi Pegawai Toxic

### DAPENMA PAMSI

- 43 Tahun 2024 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 614,900 Miliar (unaudit)

### INTERNASIONAL

- 46 Air Minum Sydney
- Dulu, Kini, dan 50 Tahun ke Depan

### OPINI

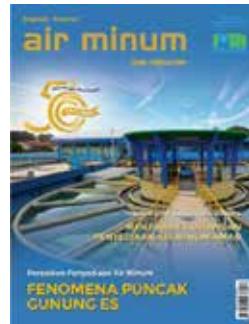
- 48 Evolusi dan Evaluasi Majalah Air Minum

### SAINTEK

- 50 Menyediakan Air Minum Aman dari Lahan Gambut

### BECHMARK

- 52 Vietnam
- Komitmen Memperbaiki Layanan Air



**Sampul:** IPAM Ngagel kapasitas 4.500 liter per detik. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari sungai Brantas.

Fotografer: **Glen Putra Pradana**

## LAPORAN UTAMA



**“BANDUNG BONDOWOSO”  
MENGGAPAI  
AKSES  
AIR MINUM  
40 PERSEN**

- 14 Air Minum dan Sanitasi: Prioritas Kebijakan Publik
- 16 Dampak Denda Administratif SIPSDA bagi BUMD AM
- 18 Titik Terang Persoalan Denda SIPSDA
- 20 Fenomena Puncak Gunung Es

### POJOK BAHASA

- 54 Kubik dan Liter

### RESENSI

- 55 Pahit Getir Kontaminasi Air di Amerika Serikat

### GEMA

- 56 Peresmian Proyek Percontohan ZAMP

### SERBA SERBI

- 56 Pelantikan Direktur Baru Akatirta Magelang

### 58 FORUM PEMBACA

### ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- 59 Menangkap “Burongan”



### KATA KITA

- 60 Alifia Nayeli Kusumawati
- Menggapai Mimpi

kunjungi situs web [www.perpamsi.or.id](http://www.perpamsi.or.id)

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke [mam@perpamsi.or.id](mailto:mam@perpamsi.or.id) dan [majalahairminum@yahoo.com](mailto:majalahairminum@yahoo.com). Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.



1975 - 2025

Sekali mengalir, terus mengalir

**Penasihat/Penanggung Jawab**

Ketua Umum PERPAMSI  
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.

**Sekretaris Umum PERPAMSI**  
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

**Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi**

Dr. Subekti, S.E., M.M.

**Redaktur Pelaksana**  
Ahmad Zazili, S.Sos.

**Reporter/Kontributor**

Danang Pidekso, S.Sos.  
Deni Arisandy, S.E.  
Rois Said, S.Pd.  
Elmy Diah Larasati, S.H.  
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

**Editor bahasa**  
Anwari Natari, M.Hum.

**Desainer Grafis**  
Isnu Arsanto, S.Kom.

**Ilustrator**  
Gandjar Widodo

**Sekretaris**  
Wurianisa Purnamisuri, S.M.

**Marketing/Iklan**  
Marsudi

**Distribusi**  
Achie Susilawati

**e-mail Redaksi**  
mam@perpamsi.or.id  
majalahairminum@yahoo.com

**Alamat Redaksi**

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287  
Cawang Jakarta 13630

**Telepon**  
(021) 808 818 92-93 (hunting)

**Faksimili**  
(021) 80881876

**Rekening**

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta  
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)  
No. 4462019



GANDJAR WIDODO

## DARI REDAKSI

# Lebih Besar dari yang Terlihat

**P**ersoalan di sektor penyediaan air minum Tanah Air bak fenomena puncak gunung es. Hal yang tidak terlihat di bawah itu jauh lebih besar dibanding yang tampak di permukaan. Hal yang saat ini sedang mencuat di permukaan adalah persoalan regulasi yang dirasakan sangat menghambat kinerja dan pengembangan pelayanan para penyelenggara SPAM.

Pertama, Permen PUPR No. 3/2023. Permen ini mengatur tata cara perizinan sumber daya air (SIPSDA), tetapi memberikan sanksi administratif yang berlaku surut sejak 1 November 2019. Kedua, Permen ESDM No. 14/2024. Permen ini menghilangkan kewajiban swasta untuk mendapatkan rekomendasi dari BUMD AM sebelum melakukan pengeboran air tanah. Hal ini membuka peluang bagi eksplorasi air tanah yang tidak terkendali dan akan mengurangi pemanfaatan aset SPAM eksisting.

Ketiga, PP No. 5/2021. Pembatasan pengambilan air hingga 20 persen dari potensi mata air yang tersedia sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021 turut menambah beban operasional BUMD AM. Batasan ini tidak memperhitungkan kebutuhan ril masyarakat, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada layanan air minum perpipaan. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terancam terganggu.

**P**ersoalan tiga regulasi yang menjadi kendala para penyelenggara SPAM kami turunkan dalam Laporan Utama edisi kali ini. Isu ini menjadi

penting karena sangat menghambat kinerja para penyelenggara SPAM yang notabene kepanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi hak rakyat atas air. Di saat yang bersamaan, mereka juga dibebani segudang target dari pemerintah, salah satunya meningkatkan cakupan pelayanan dari sekitar 22 persen saat ini menjadi 40 persen pada 2029.

Ulasan lainnya, tepat di edisi ini (Februari 2025), Majalah Air Minum PERPAMSI menginjak usia ke-50 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang bagi media informasi cetak mengingat pergeseran budaya baca ke format digital. Di edisi ini pembaca akan menemui tampilan yang sedikit berbeda untuk penyebarluasan. Nah, guna menyibak sedikit nostalgia terkait media khusus para tukang ledeng ini, kami turunkan ulasannya dalam Laporan Khusus.

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya. Salam. **Redaksi**



**“ Siapa pun yang pernah memberi Anda kepercayaan, Anda berutang banyak kepadanya. ”**

**Truman Garcia Capote**  
Penulis Amerika, 1924-1984



## PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2024

# Kado Awal Tahun bagi Tukang Ledeng

Memasuki tahun 2025, para tukang ledeng mendapat semacam "kado" dari Kementerian Dalam Negeri berupa ditetapkannya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepgawaiian BUMD AM. Apakah permendagri tersebut sudah cukup memenuhi ekspektasi yang selama ini dibayangkan?

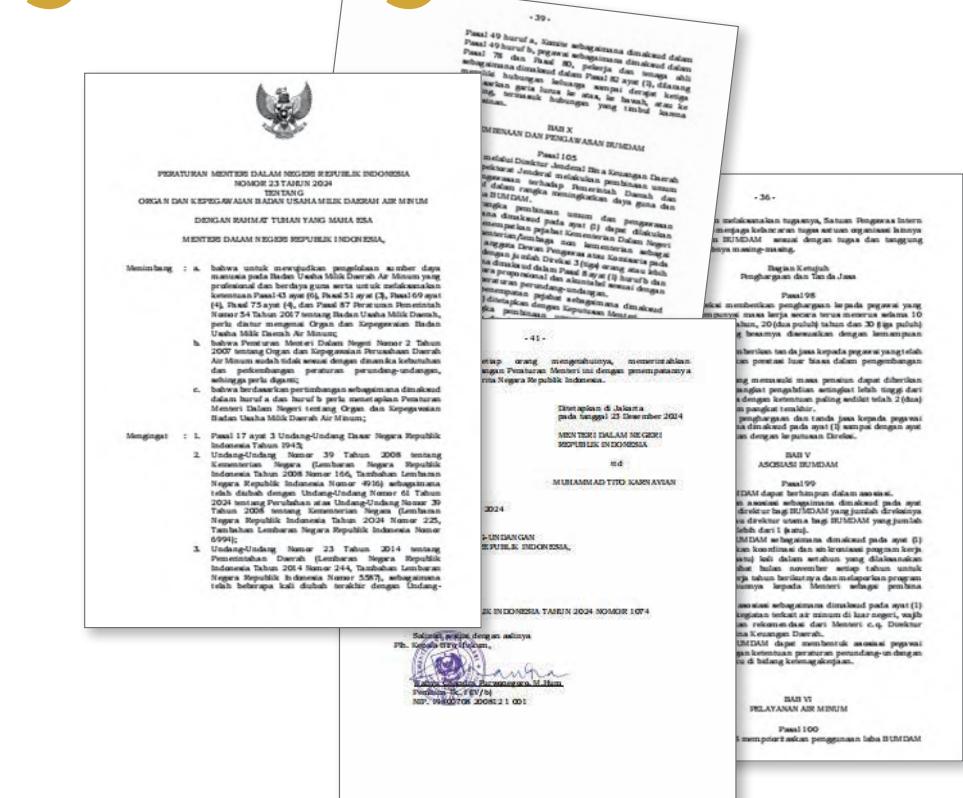
Penulis: **Rois Said**

"Nan dinanti kini lah datang.  
Nan ditunggu kini lah tibo..."

**S**epenggal lirik lagu daerah Minangkabau berjudul "Nan Dinanti" tersebut kiranya cukup selaras dengan kondisi kebatinan para "tukang ledeng" sekarang ini. Mereka, terutama para direksi BUMD air minum, telah cukup lama menanti-nanti regulasi yang dianggap urgensi bagi mereka, yaitu terkait organ dan kepegawaiian BUMD AM.

Betapa pentingnya peraturan tersebut sampai-sampai Bupati Lombok Barat Terpilih, yaitu Lalu Ahmad Zaini, merasa masih meninggalkan utang kepada para koleganya, tukang ledeng di seluruh Indonesia, karena regulasi yang dimaksud belum juga terbit. Sementara, ia harus mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum PERPAMSI untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bupati di kampung halamannya.

"Selalu saya katakan, PR (pekerjaan rumah) saya satu-satunya yang belum tuntas ketika meninggalkan PERPAMSI adalah peraturan menteri tentang organ dan kepegawaiannya," ujar Zaini kepada Majalah Air Minum, Rabu (29/01/2025).



Penantian itu akhirnya terwujud. Pada 31 Desember 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepgawaiian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Ada dua pertimbangan besar ditetapkannya Permendagri 23/2024. Pertama, diperlukan regulasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada BUMD AM yang profesional dan berdaya guna. Kedua, adanya kenyataan bahwa Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepgawaiian Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu diganti. Indikasi berikutnya peraturan ini perlu diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepgawaiian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

## Manfaat bagi BUMD AM

Secara umum, Direktur Utama Perumda Tirta Musi Kota Palembang Andi Wijaya sepakat bahwa permendagri yang baru ini telah berupaya untuk mendorong kemajuan bagi BUMD AM. Di dalamnya, katanya, ada aturan-aturan detail yang dilakukan standardisasi dan itu baik serta sangat membantu BUMD AM dalam menetapkan kebijakan di perusahaan.

"Ada beberapa hal yang bagus, yaitu pemerintah melakukan standardisasi, seperti bagaimana menetapkan uang operasional direksi, bagaimana aturan dalam pemberian fasilitas, dan beberapa hal lainnya. Hal itu oke menurut saya," ujar Andi kepada MAM, Rabu (29/01/2025).

Senada, Direktur Perumda Tirta Taka Kabupaten Nunukan Masdi juga

menilai, Permendagri 23/2024 lebih jelas mendorong BUMD AM untuk melakukan pengelolaan dengan lebih baik. Apalagi, BUMD AM merupakan institusi pelayan publik. Karena itu, BUMD AM harus terus memperbaiki kinerjanya.

"Kalau BUMD AM dikelola dengan baik, hal itu akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pada akhirnya, hasilnya juga akan dirasakan oleh masyarakat dan *stakeholder*, kuasa pemilik modal (KPM), maupun dewan pengawas (dewas). Kita ini, kan, diberi mandat untuk membawa perusahaan ini lebih baik, pegawainya sejahtera, dan pelayanannya prima," ujar Masdi kepada MAM pada Rabu (29/01/2025).

#### Kepastian hukum

Tenaga Ahli PERPAMSI Agus Sunara sepakat bahwa Permendagri 23/2024 dapat mendorong BUMD AM di Indonesia untuk lebih baik. Sebagai

**Institusi manakah yang akan melakukan pengawasan terkait pengoperasian BUMD AM?**

orang yang turut mengawal dan bahkan ikut merumuskan rancangan peraturan menteri tersebut, ia tahu betul bahwa secara substantif tujuan itu sangat dimungkinkan. Pasal-pasal yang diuraikan dalam Peremendagri 23/2024 secara terang-benderang memang menuntut atau mendorong BUMD AM untuk menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam operasionalisasinya. Misalnya, BUMD AM mau tidak mau harus melakukan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, serta menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, bagi Agus, ada hal yang lebih fundamental dari itu, ia menilai, penetapan Permendagri 23/2024 pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi BUMD AM. Selama ini, lanjutnya, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 kerap menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ahli hukum. Kita tahu, Permendagri 2/2007 berlaku untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara, sesuai amanat PP 57/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD AM di setiap daerah kini telah memilih bentuk badan usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ataupun Perseroan Daerah (Perseroda).

"Dengan keluarnya Permendagri 23/2024 yang merupakan amanat dari PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi

## BUMD AM Tak Boleh Rugi

**D**itekankan mantan Ketua Umum PERPAMSI Lalu Ahmad Zaini, filosofi Permendagri No. 23 Tahun 2024 adalah untuk membawa BUMD AM Indonesia menjadi lebih baik. Kenapa? Ada beberapa terobosan baru di Permendagri 23/2024 yang ia anggap sangat bagus.

"Salah satunya adalah saat peraturan ini diberlakukan, maka tidak akan ada BUMD AM yang merugi. Ini bisa dilihat dari adanya aturan tentang rasio antara beban dan pendapatan," kata Zaini.

Di sisi lain, ini akan jadi PR berat bagi teman-teman direksi BUMD AM untuk pengelolaan lebih baik di perusahaannya masing-masing. Karena itu, GCG harus dikedepankan.

ada kepastian hukum bagi BUMD AM," terang Agus Sunara kepada MAM, Rabu (29/01/2025).

#### Catatan kritis

Tak ada gading yang tak retak. Kendati telah mendatangkan kepastian hukum bagi BUMD AM, nyatanya Permendagri 23/2024 masih menyisakan beberapa catatan. Andi Wijaya, misalnya, melihat setidaknya ada tiga hal yang masih dapat dikritisi dari permendagri tersebut. *Pertama*, sejumlah aturan terlihat masih terlalu rigid. Contohnya, aturan mengenai komponen-komponen perusahaan yang diharuskan ada dan bersifat mengikat. Sementara, fakta di lapangan setiap perusahaan memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda.

*Kedua*, ada beberapa bagian dari aturan yang justru dapat memperpanjang rantai birokrasi. Salah satunya tampak dalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan, "Sebelum menetapkan calon anggota direksi, kepala daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan." *Ketiga*, dalam beberapa pasal masih dibutuhkan penjelasan lanjutan untuk menghindarkan terjadinya kerancuan.

"Dalam beberapa hal, saya melihat peran pemerintah pusat terkesan terlalu kuat di sini," ujar Andi.

Sementara, Agus Sunara menyoroti tentang fungsi pengawasan. Ia menjelaskan, tugas pemerintah adalah "turbinwas" atau pengaturan,

Terpenting, BUMD AM tidak boleh ada yang rugi.

Sebagai orang yang selama ini berkecimpung di air minum, mantan

Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Mataram ini berharap para direksi BUMD AM untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Indonesia. Filosofi dan amanat yang ada dalam Permendagri 23/2024 yang ingin membawa BUMD AM lebih maju harus dapat diwujudkan bersama-sama. ■ RS



Lalu Ahmad Zaini

DOK. MAJALAH AIR MINUM

pembinaan, dan pengawasan. Ketika fungsi pengaturan telah dilakukan dengan ditetapkannya Permendagri 23/2024, lalu akan dilanjutkan dengan fungsi pembinaan seperti melakukan konsolidasi dan sosialisasi. Lantas, bagaimana dengan fungsi pengawasannya? Institusi manakah yang akan melakukan pengawasan terkait pengoperasian BUMD AM?

"Kalau tidak ada institusi yang melakukan pengawasan, bagi BUMD AM akan lebih sulit posisinya. Kenapa? Karena kecenderungan kepala daerah tidak ingin mengambil kebijakan-kebijakan nonpopulis. Misalnya saja terkait soal penerapan tarif *full cost recovery* (FCR), siapa yang bisa memastikan kalau tidak ada institusi yang menegakkan dan menjalankan pengawasan itu," papar Agus.

Karena itu, Agus Sunara kembali menekankan pentingnya ada badan regulator air minum yang dapat mengawal serta mengawasi semua hal, terutama regulasi-regulasi yang berhubungan dengan air minum di Indonesia. Sejauh ini, gagasan tentang adanya badan regulator air minum diamini Masdi, Andi Wijaya, dan hampir seluruh tukang ledeng di negeri ini. Artinya, sekalipun pemerintah telah menetapkan Permendagri 23/2024, tampaknya perjuangan para tukang ledeng untuk membawa perairminuman Indonesia belum boleh berhenti. ■

# Achieving 40 Percent Access to Drinking Water Challenges

Indonesian President Prabowo Subianto has set the Asta Cita mission, which includes ambitious targets related to access to drinking water. One of the main targets is to increase the coverage of piped drinking water services from 22 percent to 40 percent by 2029. However, there are challenges to achieving the target. It takes more than 70 years for the country to reach 22 percent, then it requires an extraordinary speed to chase an additional 18 percent in five years. Local water companies (BUMD AM) must walk fast or "run."

Unfortunately, BUMD AMs is still struggling due to various trials, including human factors. Legal products have burdened the work of BUMD AMs. The Executive Director of PERPAMSI, Dr. Subekti, said, "Our feet are tied when we are instructed to run". The Asta Cita mission is like Loro Jonggrang's request to Bandung Bondowoso to build 1,000 temples in a single night. Dr Subekti illustrated the mission to the famous Loro Jonggrang folk tale.

According to the folk tale, Bandung Bondowoso almost succeeded with the help of genies. Unfortunately, Loro Jonggrang interfered with Bandung Bondowoso's efforts by "speeding up" the morning rising, so the genies left before they finished their work. Looking from the perspective of the world of drinking water, the moral message is not to let any regulations interfere with the work of BUMD AM.

According to Subekti, at least three legal products burden BUMD AM's steps of work to achieve the figure of 40 percent. First, The Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing (PUPR) No. 3/2023. It regulates the procedures for water resource licensing but imposes retroactive administrative sanctions until November 1, 2019. Its impact is massive. For example, The Tirta Perwira local water company Kabupaten Purbalingga must pay a fine of IDR 9.6 billion in December 2024 (before the revision's figure). The condition burdens the company's finances, obstructs investment, and is contrary to President Prabowo Subianto's Asta Cita vision.

Second, the Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources No. 14/2024 eliminates the obligation for the private sector to obtain a recommendation from BUMD AM before drilling groundwater. It opens up opportunities for uncontrolled groundwater exploitation and will reduce the utilization of existing Water Supply System (SPAM) assets. It makes BUMD AMs lose control over resources that should be their responsibility.

The drilling practice threatens the sustainability of water resources and damages the soil structure. In the long term, it will impact the wider community, especially in urban areas that depend on groundwater as their primary source. The elimination of the BUMD AM recommendation requirement eliminates the

government's opportunity to serve more people who need clean water.

The third challenge is Government Regulation No. 5/2021. The regulation stipulates that water drawing be limited to 20 percent of the potential available springs, increasing the operational burden of BUMD AMs. The limitation does not consider the real needs of the community, especially in areas highly dependent on piped drinking water services. As a result, services to the community are at risk of being disrupted.

Moreover, the licensing process through the Online Single Submission (OSS) is often hampered by the completeness of documents, especially for assets transferred from the government to BUMD AM. This has disrupted drinking water services for millions of residents.

This provision creates uncertainty for BUMD AM, ultimately impacting service quality. With limited access to raw water sources, BUMD AM is forced to seek alternatives that are often more expensive and less efficient. "This further worsens the financial condition of BUMD AM, which is already burdened by administrative fines," said Subekti. ■



## Collaboration of PERPAMSI and IATPI



The Association of Indonesian Drinking Water Companies (PERPAMSI) and the Association of Indonesian Sanitation and Environmental Engineering Experts (IATPI) signed a cooperation agreement on January 13, 2025. According to Endra S. Atmawidjaja, the Chairman of IATPI and the Acting Director General of Human Settlements of the Ministry of Public Works, the synergy is a strategic momentum to answer the challenges of the drinking water and sanitation sector in Indonesia.

Endra said, "We are committed to presenting relevant and transformational solutions by combining IATPI's technical expertise and PERPAMSI's extensive network. We aim to ensure equal access to quality drinking water for all Indonesians".

PERPAMSI Chairperson Arief Wisnu Cahyono added that PERPAMSI needs to ensure that all drinking water companies can provide sustainable and quality services. The collaboration focuses on increasing human resource capacity and strengthening institutions. The association has designed competency-based training modules, expert certification, and seminars and workshops to build professional staff who can meet future challenges.

The industry players will receive certification and training services based on nationally recognized standards, with a professional certification institution managed by IATPI. Routine evaluations every six months will ensure the sustainability of this cooperation. PERPAMSI and IATPI are optimistic that the step will have a real impact. ■

## Inauguration of New Akatirta Director



A leadership succession took place at the Tirta Wiyata Academy (Akatirta), which is based in Kota Magelang, Central Java, on Monday, January 20, 2025. PERPAMSI General Chairperson Arief Wisnu Cahyono officially took the oath and inaugurated Rohmad Hadiwijoyo as the new Director of Akatirta.

According to PERPAMSI General Chairperson Arief Wisnu Cahyono, Akatirta is an educational institution directly involved in the drinking water sector in Indonesia. Many of its graduates have been absorbed and work in BUMD AM throughout Indonesia.

Akatirta will continue improving the quality of its education, graduates, and the new leadership.

Arief Wisnu said, "I hope the new leadership will bring sustainability and inevitability to Akatirta. It starts from its internal vision and management to top leadership. We expected Akatirta to be able to develop study programs in the future that support the drinking water sector, and it will be superior in 2028 Akatirta".

PERPAMSI founded Akatirta through its subsidiary, YPTD PAMSI, in 2000. Its aim was to produce competent environmental engineering personnel. Since its beginning, Akatirta has been the only university in Indonesia with a concentration in drinking water. ■

## Realizing a Responsive BUMD AM to GEDSI

PERPAMSI held a monthly webinar "Selasa Setara (Equal Tuesday)" on Tuesday, January 21, 2025, in company with its affiliates, namely the Gender Equality, Disability, and Social Inclusion Implementation Forum (GEDSI) for Drinking Water Companies throughout Indonesia (FERSIA), and supported by the Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT). The webinar theme was "Transformation Strategy: Realizing a Responsive Drinking Water Local Companies to Gender Equality, Disability, and Social Inclusion."

Attended by around 250 participants from ministries, regional governments, local water companies, universities, associations, consultants, private companies, and others, the PERPAMSI Chairperson, Arief Wisnu

Cahyono, opened the webinar. Steven Chaytor, The Facility Director of the Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT), gave a speech. The event was hosted by Jane E. Wuysang, Head of Advocacy and Education for FERSIA, also Director of Perumda Tirta Senentang, Sintang Regency.

The webinar activity, which has involved related speakers and presented different themes, has been a continuing activity. The webinar aims to be practical and promote the importance of awareness and shared commitment to realizing safe and fair access to drinking water and sanitation for all without discrimination based on gender or social status. ■



Abadikan kebersamaan tukang ledeng dengan foto selfie atau groufie. Posting di Grup Facebook **"Tukang Ledeng Selfie"**. Foto-foto unik dan menarik akan dipilih untuk dimuat di rubrik ini.



Sumber: @tirta\_hidayah



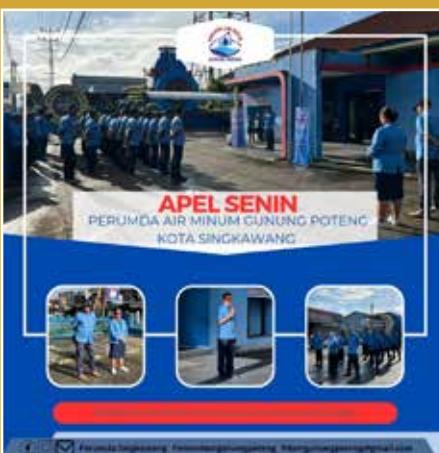
Sumber: @perumdaamtirtajeneberang



Sumber: @perumdamtirtasatria



Sumber: @purwatirtadharma



Sumber: @perumdamgunungpoteng



Sumber: @pambandarmasih



Sumber: @pdambontang



Sumber: @perumdamsamarinda



Sumber: @perumda\_tirtamontmata

# Agenda PERPAMSI JANUARI 2025



## Senin, 6 Januari

Rapat koordinasi (via Zoom) bersama BUMD, lembaga keuangan, dan aneka usaha (Ditjen Bina Keuda, Kemendagri).

## Kamis, 9 Januari

- Diskusi perpanjangan PKS antara PERPAMSI dengan TNI AD di Graha PERPAMSI.
- Kunjungan tamu dari Goldcard China di Graha PERPAMSI
- Audiensi PP dan Dewas PERPAMSI dengan Wamen PU di kantor Kementerian PU.



## Jumat, 10 Januari

- Diskusi PP dan Dewas dengan LKPP di kantor LKPP Jakarta.
- Rapat PP dan Dewan Pengawas PERPAMSI di Jakarta.



## Sabtu, 11 Januari

Kunjungan tamu dari Universiti Kelantan, Malaysia, di Graha PERPAMSI.



## Senin, 13 Januari

Penandatanganan MoU PERPAMSI dan IATPI di Perumda Surya Sembada Surabaya.

## Rabu, 15 Januari

- Bimtek Penerapan Aplikasi Coklit Online wilayah NTT dan NTB di Surabaya.
- Rakerda PD PERPAMSI Bali di Kota Denpasar.
- Diskusi dengan tamu dari Universitas Bakrie di Graha PERPAMSI.
- Diskusi dengan Prof. Kimdi Graha PERPAMSI.
- Diskusi dengan tamu dari Perumdam Kabupaten Donggola di Graha PERPAMSI.

## Kamis, 16 Januari

- Bimtek Penerapan Aplikasi Coklit Online wilayah Kalbar, Kalsel, dan Kalteng di Surabaya.
- Diskusi dengan tim Rucika Institute di Graha PERPAMSI.
- Penandatanganan MoU antara TNI AD dengan PERPAMSI di Jakarta.

## Senin, 20 Januari

Diskusi dengan tamu dari Perbamida di Graha PERPAMSI. Pelantikan Direktur Akatirta di Magelang.

## Selasa, 21 Januari

- Webinar ke-73 PERPAMSI; "Menentukan Valve yang Tepat untuk Jaringan Perpipaan BUMD Air Minum".
- Webinar ke-74 PERPAMSI-FERSIA-KIAT; "Menuju BUMD AM yang Inklusif dan Responsif GEDSI".

## Rabu, 22 Januari

- Diskusi dengan tamu dari Perumda Kota Tarakan di Graha PERPAMSI.
- Sosialisasi (via Zoom) Aplikasi Coklit Online wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Diskusi dengan tamu dari Apjatel di Graha PERPAMSI.

## Kamis, 23-24 Januari

Pelaksanaan Coklit Air Minum Kemhan/TNI di Kabupaten Bogor.

## Kamis, 23 Januari

Mapamda PD PERPAMSI Sumatera Barat di Bandung.

## Jumat, 24 Januari

- Audiensi dengan Rektor Unhan di Sentul Kabupaten Bogor.
- Diskusi dengan tamu dari Universitas Trisakti di Graha PERPAMSI.
- Mapamda PD PERPAMSI Banten di Tangerang.
- Diskusi (*online*) dengan jajaran Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Kemendagri.

## Kamis, 30 Januari

- Diskusi online dengan tim PT SMI di Jakarta.
- Diskusi dengan Prof. Kim di Jakarta.
- Diskusi bersama tamu dari BRIN di Graha PERPAMSI.

# “Bandung Bondowoso” Menggapai Akses Air Minum 40 Persen

Hakikat kerja BUMD air minum (AM) adalah melunasi utang kepada rakyat, yaitu memenuhi hak asasi manusia (HAM) atas air minum. Pasalnya, Indonesia telah meratifikasi bahwa air minum adalah bagian dari HAM, sehingga negara wajib memenuhinya. Sayangnya, BUMD AM sebagai perpanjangan tangan negara malah “diikat kakinya”. Tali pengikatnya adalah regulasi.

Penulis: **Anwari Natari**

Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan misi Asta Cita yang antara lain mencakup target ambisi terkait akses air minum. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan dari 22 persen menjadi 40 persen pada tahun 2029. Namun, tantangan besar menghadang. Jika pencapaian 22 persen sekarang ini memakan waktu lebih dari 70 tahun, maka mengejar tambahan 18 persen dalam lima tahun membutuhkan kecepatan luar biasa. BUMD AM bukan hanya harus berjalan cepat, tetapi harus “berlari”.

Sayangnya, jangankan berlari, berjalan pun BUMD AM masih terseok-seok karena berbagai tantangan, termasuk tantangan dari faktor manusia, yakni produk hukum yang memberatkan kerja BUMD AM. “Kita ini disuruh lari tapi kaki kita diikat,” ujar Dr. Subekti, Direktur Eksekutif PERPAMSI. Misi Asta Cita ini ibarat *request* Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1.000 candi dalam satu malam.

Sebenarnya, dalam hikayat legenda terkait Candi Prambanan, Bandung Bondowoso hampir berhasil memenuhi permintaan itu berkat bantuan armada makhluk halus yang dipanggilnya. Sayangnya, Roro Jonggrang merecoki ikhtiar Bandung Bondowoso dengan cara “mempercepat” datangnya pagi sehingga membuat para makhluk tersebut pergi sebelum selesai kerja.



ISTIMEWA

Dalam dunia air minum, pesannya adalah: jangan sampai ada regulasi yang merecoki kerja BUMD AM. Padahal, tanpa direcoki tali pengikat ini, BUMD AM masih harus berjuang menghadapi tantangan eksternal, seperti perubahan iklim dan bencana lainnya. Menurut Subekti, sedikitnya ada tiga produk hukum yang memberatkan langkah BUMD AM untuk mengejar angka 40 persen tersebut.

## Tantangan regulasi SIPSDA

Permen PUPR No. 3/2023. Permen ini mengatur tata cara perizinan sumber daya air (SIPSDA), tetapi memberikan sanksi administratif yang berlaku surut sejak 1 November 2019. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku umum di Indonesia. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan yang membebankan denda atau pajak tidak boleh berlaku

surut. Namun, Permen ini justru menghitung pelanggaran sejak 2019.

Dampaknya sangat besar. Sebagai contoh, Perumdam Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga harus membayar denda sebesar Rp9,6 miliar pada Desember 2024 (angka sebelum revisi). Kondisi ini sangat memberatkan keuangan BUMD AM, menghambat investasi, dan bertentangan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Regulasi terkait denda administratif yang berlaku saat ini memiliki sejumlah masalah mendasar. Pertama, denda yang dikenakan berlaku surut hingga 1 November 2019. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemberlakuan surut hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu, seperti pelanggaran HAM berat atau tindak pidana korupsi. Dalam konteks BUMD AM, penerapan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga membebani perusahaan yang sudah beroperasi dalam kondisi sulit.

Kedua, formula perhitungan denda administratif yang digunakan dalam Permen PUPR tersebut tidak sejalan dengan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. UU ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai denda administratif melalui Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri. PP Nomor 30 Tahun 2024, yang seharusnya menjadi dasar penghitungan denda, baru diterbitkan setelah BUMD AM mulai dikenakan sanksi berdasarkan Permen PUPR. Inkonsistensi ini menimbulkan kerancuan hukum dan memperburuk situasi.

Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Guru Besar Hukum

**“BUMD AM adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi kewajiban sosial, sehingga perizinan tidak boleh dipersulit.”**

Prof. I Gusti AK Rachmi Handayani  
Guru Besar Hukum Administrasi Negara  
Universitas Sebelas Maret

Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), menyoroti bahwa perizinan yang berlaku surut seperti ini melanggar asas nonretroaktif. Dalam sebuah forum diskusi di Indonesia Water Forum (IWF) PERPAMSI, ia menegaskan bahwa aturan yang berlaku mundur hanya diperbolehkan untuk kasus-kasus khusus seperti terorisme, korupsi, dan HAM. Untuk kasus lainnya, termasuk pengelolaan air, hal ini tidak dapat diterima.



Tantangan yang dihadapi BUMD AM dapat diibaratkan seperti legenda Roro Jonggrang, yang harus menyelesaikan tugas mustahil dalam waktu singkat.

"BUMD air minum adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi kewajiban sosial, sehingga perizinan tidak boleh dipersulit," tandasnya.

#### Permen ESDM dan PP 5/2021

Permen ESDM No. 14/2024. Permen ini menghilangkan kewajiban swasta untuk mendapatkan rekomendasi dari BUMD AM sebelum melakukan pengeboran air tanah. Hal ini membuka peluang bagi eksplorasi air tanah yang

tidak terkendali dan akan mengurangi pemanfaatan aset SPAM eksisting. Akibatnya, BUMD AM kehilangan kontrol atas sumber daya yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

Apalagi, praktik pengeboran ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya air, tetapi juga merusak struktur tanah. Dalam jangka panjang, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas, terutama di wilayah perkotaan yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama. Jadi, pada hakikatnya,

penghilangan syarat rekomendasi BUMD AM ini menghilangkan kesempatan pemerintah untuk melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Tantangan selanjutnya adalah PP No. 5/2021. Pembatasan pengambilan air hingga 20 persen dari potensi mata air yang tersedia sebagaimana diatur dalam PP 5/2021 turut menambah beban operasional BUMD AM. Batasan ini tidak memperhitungkan kebutuhan ril masyarakat, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada layanan air

minum perpipaan. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terancam terganggu.

Selain itu, proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) sering kali terkendala kelengkapan dokumen, terutama untuk aset yang dialihkan dari pemerintah ke BUMD AM. Akibatnya, pelayanan air minum bagi jutaan penduduk terganggu.

Ketentuan ini menciptakan ketidakpastian bagi BUMD AM, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan. Dengan keterbatasan akses terhadap sumber air baku, BUMD AM terpaksa mencari alternatif yang sering kali lebih mahal dan kurang efisien. "Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan BUMD AM yang sudah terbebani oleh denda administratif," ungkap Subekti.

### Hambatan teknis

Sebenarnya, persoalan regulasi yang membebani BUMD AM hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Menurut Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, di bawah permukaan, terdapat berbagai tantangan mendasar yang harus segera diatasi. Salah satunya

adalah ketersediaan sumber air baku yang makin terbatas. Banyak sumber air yang tercemar oleh limbah domestik dan industri, sementara upaya perlindungan daerah tangkapan air masih minim.

Masalah infrastruktur juga menjadi hambatan besar. Sebagian besar jaringan distribusi air di Indonesia sudah tua dan rentan terhadap kebocoran. Tingkat *non-revenue water* (NRW) di banyak daerah mencapai 30-40 persen, jauh di atas standar nasional sebesar 20 persen. Kebocoran ini tidak hanya mengurangi efisiensi operasional, tetapi juga menambah beban biaya bagi BUMD AM.

Selain itu, perubahan iklim makin memperburuk situasi. Kekeringan berkepanjangan mengurangi debit air baku, sementara banjir mencemari sumber air yang tersisa. Ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menciptakan ketidakadilan sosial yang perlu segera diatasi.

Ketidakmampuan BUMD AM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya berdampak pada kesehatan publik, tetapi juga pada perekonomian. Air minum/bersih adalah fondasi bagi

berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri. Ketika akses terhadap air terganggu, produktivitas menurun, dan biaya ekonomi meningkat.

Tantangan yang dihadapi BUMD AM ibarat perjuangan Bandung Bondowoso, yang harus menyelesaikan tugas mustahil dalam waktu singkat. Dengan regulasi yang mengikat dan banyaknya tantangan eksternal seperti perubahan iklim, target 40 persen cakupan layanan air minum pada 2029 tampak seperti tugas yang mustahil.

Namun, bagaimanapun, di tengah tantangan yang tampak suram, optimisme tetap harus dijaga. Tahun 2025, sebagai awal pemerintahan baru, memberikan peluang untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah, BUMD AM, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Terpenting, pemerintah jangan menjadi Roro Jonggrang; punya mau, tapi malah merecoki "Bandung Bondowoso". Ingin mencapai 40 persen akses air minum pada 2029, sebijaknya Pemerintah tidak merecoki BUMD AM dengan regulasi yang mengikat kaki. ■

### PERMEN PUPR NO.3/2023



#### Permasalahan:

- Sanksi administrasi berlaku surut sejak tanggal 1 November 2019
- Sanksi administrasi kaidahnya dalam bentuk Surat Edaran



#### Dampak:

- Permen PUPR tidak selaras dengan Visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, dimana ditargetkan air minum perpipaan tahun 2029 sebesar 40,20 % (*baseline* 2023: 19,76 %)
- Pemberlakuan surut denda menyebabkan nilainya sangat fantastis/menyebabkan BUMD AM mengalami kesulitan keuangan
- Ketentuan ini kontra produktif dengan upaya percepatan akses air minum yang diatur melalui Inpres.

### PERMEN ESDM NO.14/2024



#### Permasalahan:

- Izin air tanah tidak diperlukan lagi rekomendasi air permukaan. BUMD AM akan mengalami kesulitan dalam pengendalian air tanah, yang akan mempercepat kerusakan lingkungan (penurunan air tanah)
- Kehilangan pemanfaatan aset SPAM eksisting karena akan berpindah ke sumber air tanah



- Dinsentif dengan target RPJMN
- Tidak selaras dengan Astacita

### PP NO. 5/2021



#### Permasalahan:

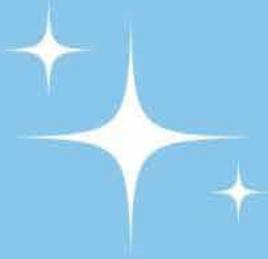
- Pembatasan pengambilan air yang bersumber dari mata air maksimal 20 % dari potensi air yang tersedia
- Ketidaklengkapan dokumen pada saat pengalihan aset dari Pemerintah ke BUMD AM merupakan salah satu kendala ketidaklengkapan persyaratan administrasi untuk perpanjangan SIPSDA melalui *Online Single Submission* (OSS)



#### Dampak:

- Terganggunya pelayanan 8 juta penduduk dan Proyek Strategi Nasional (PSN)
- BUMD AM berpotensi menghadapi permasalahan hukum terkait perizinan.

Sumber: Kajian PP PERPAMSI



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PUDAM)  
SUMBER SEJAHTERA KABUPATEN BANGKALAN**

Direksi, Dewan Pengawas &  
Pegawai, mengucapkan:

*Dirgahayu*



**Majalah Air Minum  
PERPAMSI**

“ Semoga tetap eksis dan berkontribusi positif dalam memberikan informasi dan referensi di bidang penyelenggaraan air minum untuk masyarakat.  
Sekali mengalir terus mengalir. ”

**H. Sjobirin Hasan, SE, MBA**  
Direktur

# Air Minum dan Sanitasi: Prioritas Kebijakan Publik



Air sebagai hak asasi secara universal telah diakui sebagai hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini menjadi kewajiban negara atau daerah untuk menyediakannya.

Kalau Indonesia saat ini masih tertinggal dari negara lain di sektor pelayanan air minum dan sanitasi, tentu salah satunya disebabkan oleh faktor-faktor struktur dan substansinya yang relatif kurang baik. Padahal, air merupakan hal yang sangat strategis. PBB dalam Resolusi Majelis Umum PBB 28 Juli 2010 menyatakan bahwa hak atas air minum dan sanitasi yang aman merupakan hak asasi manusia (HAM), dan Indonesia sudah ikut meratifikasi hal itu.

Penulis: **Rahmad Zakariyah**

**H**al itu ditegaskan oleh Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia menyampaikannya saat menjadi salah satu narasumber di Indonesia Water Forum (IWF) PERPAMSI, di JIExpo Kemayoran, (30/08/24) lalu. Pernyataan ini terasa relevan dengan kondisi perairminuman saat ini dengan berbagai tantangannya di bidang regulasi. Di sisi lain, ada harapan besar untuk melakukan transformasi tata kelola dan program Presiden Prabowo terkait swasembada air.

Sebagaimana diketahui, selain Resolusi Umum PBB, di Tanah Air sudah ada regulasi yang mendukukkan posisi air untuk kesejahteraan rakyat. Pembukaan UUD 1945 Pasal 33, misalnya, menyatakan, "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ada pula UU SDA Nomor 17 Tahun 2019 yang merupakan payung hukum saat ini atau *ius constitutum*. Ada juga PP Nomor 30/2024 tentang SDA yang mengatur berbagai hal. Begitu juga UU Nomor 23/2014 yang menyebut tentang pelayanan air minum dan

sanitasi merupakan kewenangan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Ada satu hal yang bisa kita pelajari dari negara-negara maju yang berada di atas kita, yaitu mereka punya undang-undang khusus mengenai air minum mengingat betapa strategisnya air minum," ungkap Prof. Rachmi.

Melalui UU Air Minum, beberapa hal terkait persoalan air minum dapat diidentifikasi dan diinventarisasi, misalnya tentang perizinan, pajak, dan air baku atau juga tentang badan regulator yang diperlukan. Saat ini memang ada Dewan Sumber Daya Air (DSDA), tetapi ia menilai dewan ini tidak fokus pada air minum. Sehingga, hak warga negara atas air minum yang baik dan sehat seperti diamanatkan UUD 1945 beserta turunannya belum tercakup.

## Kewajiban Pemerintah

Air sebagai bagian tanggung jawab dan kewajiban pemerintah juga ditekankan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia saat menjadi salah satu narasumber di Indonesia Water Forum (IWF) 2024. Menurutnya, karena hak itu ada pada warga/masyarakat, maka kewajiban ada pada pemerintah (pusat dan daerah).

Kewajiban yang dimaksud ialah bagaimana membuat suatu konsep pengelolaan yang baik dalam bentuk kemudahan-kemudahan dan segala sesuatu yang memberi akses air kepada warga masyarakat yang lebih baik. Caranya bagaimana? Dengan deregulasi dan debirokratisasi, diminimalkan semua regulasi apa pun dengan tidak meninggalkan konsep pengendalian negara dalam hal perlindungan terhadap kapasitas dan kualitas air.

"Ada yang unik dalam PP Nomor 2 Tahun 2018. Pelayanan kewajiban minimum bagi sektor-sektor lain,

## Kesimpulan Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani:

1. Air minum adalah amanah konstitusi, pemerintah wajib menyediakan/menyiapkan
2. Selain permasalahan regulasi dan perizinan, saat ini penyediaan air minum dihadapkan pada persoalan-persoalan karena perubahan iklim, banjir, kekeringan dan kualitas air
3. BUMD AM sebagai kepanjangan tangan pemerintah seharusnya tidak dibebani perizinan (izin pengusahaan SDA) dan beban yang lain.

**“** Izin yang diberikan oleh tugas negara (misalnya penyediaan air minum masyarakat) berbeda dengan izin yang diberikan kepada swasta. **”**

seperti kesehatan dan pendidikan, dinyatakan sebagai kewajiban negara (baik pusat maupun daerah). Namun, dalam rangka pendidikan kesehatan, kalimatnya adalah “untuk warga negara dengan ketentuan-ketentuan yang spesifik,” bebernya.

Tetapi, lanjutnya, untuk bidang pelayanan air minum hanya disebutkan bahwa “kewajiban negara (pemerintah/pemda) di dalam penyediaan air minum adalah untuk warga negara”, titik (*an sich*). Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus dan tidak ada syarat apa pun. Dengan demikian, sebagai hak, penting dipahami bahwa air itu ternyata berlaku bagi semua warga negara tanpa kecualian.

Di sisi lain, air sebagai hak asasi, pada hakikatnya, secara universal telah diakui sebagai hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini menjadi kewajiban negara atau daerah untuk menyediakannya.

“Instrumen internasional juga diatur dalam konferensi tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Disebutkan bahwa pada hakikatnya setiap orang harus memiliki standar kehidupan yang layak, termasuk standar kebutuhan air,” katanya.

Dalam tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya konsepnya adalah dalam rangka mendorong pemenuhan hak masyarakat pada akses air yang berkualitas. Dengan begitu, di tahun-tahun ke depan tidak terdengar lagi ada masyarakat yang kekurangan air. Segala mitigasi terhadap kemungkinan berkurangnya akses terhadap air mestinya disiapkan oleh negara.

Ditegaskannya, sinergi tugas-tugas yang diemban antara pemerintah pusat dan daerah hanya dapat dibangun dengan penguatan regulasi dari negara lebih dulu. Wewenang-wewenang pemerintah pusat dan daerah itu sebenarnya ada dan sudah diatur. Tinggal, bisakah itu segera laksanakan?

negara yang sering dipakai oleh negara untuk mengawal tugas-tugasnya agar berjalan dengan baik. Jadi, kalau dalam kenyataannya—dan ini sering terjadi—bawa untuk mendapatkan izin itu harus bayar, maka makna filosofis “perizinan” itu sendiri telah terdistorsi atau melenceng dari filosofisnya,” katanya.

Perizinan adalah alat untuk mengawal agar tujuan negara, yaitu kemakmuran masyarakat (*welvaarstaat*), dapat tercapai. Salah satu tujuan negara yang harus tercapai adalah memberikan pelayanan air minum yang maksimal. Kalau izinnya sulit, itu ironis. Artinya, perizinan itu seharusnya tidak boleh dipersulit.

Selain itu, izin yang diberikan oleh tugas negara (misalnya penyediaan air minum masyarakat), tentu berbeda dengan izin yang diberikan

## Teori Less is More

Dalam berbagai bidang, termasuk sektor air minum dan seluruh kebutuhan masyarakat lainnya, ada teori *less is more*. Teori itu mengatakan, kalau dia memiliki benefit bagi publik lebih besar, maka *less* terhadap perizinan dan pajaknya. Jadi, jika suatu sektor itu *more* (lebih) benefit bagi suatu publik, maka harus *less* perizinan dan pajaknya. Demikian sebaliknya, jika lebih tinggi (*more*) profitnya, maka semakin tinggi pajak dan perizinannya.

Itulah sebabnya, menurut Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, di negara-negara maju, pajak itu diarahkan pada profit yang meningkat bagi hal tertentu yang dinikmati (oleh swasta), bukan untuk sektor publik. Maka, untuk soal

air, selain insentif-insentif, ada juga pembebasan terhadap pajaknya.

Karena itu, kita perlu menyampaikan kepada pemerintah adanya deregulasi yang lebih mapan dan jelas serta memiliki kepastian hukum untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air sebagai hak asasi dan hak ekonomi masyarakat.

“Instrumen internasional sudah mengakuinya. Dalam SDG’s Nomor 6 telah diatur bahwa sebenarnya air bersih dan sanitasi harus memenuhi kelayakan. Ini sebenarnya diharapkan pada pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi mengenai konsep ini dengan menggunakan teori *less is more* tadi,” jelasnya. **■ RZ**

### Makna filosofis perizinan

Bagi Prof. Rachmi, penyelenggara SPAM/BUMD AM merupakan salah satu entitas yang sangat strategis karena menyediakan air minum. Posisi sangat penting atau vital. Karena itu, mestinya infrastruktur dan perizinan terkait air minum harus dilihat dari kaca mata yang jelas. Kata “izin” secara filosofis adalah gratis, dispensasi, atau pembebasan larangan karena ada pertimbangan-pertimbangan kenapa sebuah izin harus dikeluarkan.

“Perizinan adalah salah satu instrumen yuridis hukum administrasi

kepada swasta atau pihak luar negeri. Pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMD, maupun lainnya, merupakan kepanjangan tangan negara. Karena itu, seharusnya mekanisme atau *standard operating procedure* (SOP)-nya dibedakan dengan swasta atau *corporate* yang bersifat *profit oriented*.

“Tugas-tugas yang dilakukan pemerintah adalah kewajiban atau lebih menekankan pada *social oriented*,” tukasnya. **■**

## Dampak Denda Administratif SIPSDA bagi BUMD AM

# Makin Sulit Mengembangkan Pelayanan

Implementasi Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa angin segar bagi upaya penataan sektor sumber daya air. Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat dampak yang tak terduga bagi penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) di seluruh Indonesia.

Penulis: **Rahmad Zakariyah**

Denda administratif terkait Surat Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA) yang berlaku surut sejak 2019, yang tertuang dalam peraturan teknis dari regulasi tersebut, dinilai terlalu memberatkan dan mengancam keberlangsungan pelayanan air minum untuk masyarakat. Dampak tersebut terutama sangat dirasakan oleh BUMD AM yang belum memenuhi seluruh persyaratan.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dialami Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga. Direktur Utama Tirta Perwira, Sugeng, mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya harus menanggung beban denda yang sangat besar akibat belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. "Sanksi denda sebesar Rp9,6 miliar ini sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi terpaksa harus dialokasikan untuk

membayar denda," ujar Sugeng saat dihubungi Majalah Air Minum.

Belakangan deklarasi denda sebesar Rp9,6 miliar ini diralat oleh Ditjen SDA menjadi sebesar Rp2,2 miliar setelah pihak Ditjen SDA melakukan rekonsiliasi atau penghitungan ulang *real* pemanfaatan SDA oleh Perumdam Tirta Perwira. Informasi ini didapatkan langsung saat PP PERPAMSI melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Lebih lanjut, Sugeng mengeluhkan bahwa alokasi biaya untuk membayar denda tersebut menghambat pengembangan wilayah pelayanan.

Kondisi ini sangat membebani kas perusahaan dan menyebabkan penurunan kemampuan untuk berinvestasi dalam perbaikan layanan. Pada akhirnya, hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, yang berpotensi menimbulkan reaksi negatif, termasuk protes dari pelanggan.

Dampak dari pengenaan denda ini juga dirasakan Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat. Direktur Perumda Tirta Arut, Sapriansyah, mengungkapkan bahwa sanksi administratif ini telah menghambat upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa sanksi administratif tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga mengganggu perencanaan operasional. "Meski begitu, layanan pelanggan tetap menjadi prioritas utama. Namun, potensi sanksi dapat mengganggu kesinambungan pelayanan jika denda diterapkan," ujar Sapriansyah.



Denda administratif terkait Surat Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA) yang berlaku surut sejak 2019, dinilai terlalu memberatkan dan mengancam keberlangsungan pelayanan air minum masyarakat. Ilustrasi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

## Dilema antara regulasi dan pelayanan

Beban keuangan yang berat akibat denda administratif SIPSDA membuat BUMD AM kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jaringan pipa, pengadaan bahan kimia, dan pengembangan layanan. Dikhawatirkan, hal ini berimbas pada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (K3) layanan yang diterima masyarakat menjadi menurun.

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya kemampuan BUMD AM untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi. Padahal, permintaan akan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi.

BUMD AM berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka harus memenuhi



**Sapriansyah**  
Direktur Perumdam Tirta Arut Kotawaringin Barat



**Sugeng**  
Direktur Perumdam Tirta Perwira Purbalingga

FOTO: DOK. MAJALAH AIR MINUM

semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sementara, pemerintah berupaya meningkatkan tata kelola sektor SDA melalui penerbitan peraturan baru. Namun, peraturan tersebut justru memberikan tekanan yang sangat besar kepada BUMD AM yang selama ini telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk mengatasi dampak ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh manajemen Perumdam Tirta Perwira maupun Perumdam Tirta Arut. Salah satunya ialah berkoordinasi dan melibatkan pihak pemerintah daerah selaku kuasa pemilik modal (KPM). Perumdam Tirta Perwira bahkan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PD dan PP PERPAMSI, serta pihak terkait lainnya di tingkat pusat.

Menilik permasalahan ini, Sugeng menilai sangat penting adanya

## Aturan *Lex Specialis* dan Mendorong Penyesuaian Tarif



**Nor Wahid Hasyim**  
Dirut Perumdam  
Tirta Kencana  
Samarinda

Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nor Wahid Hasyim menilai, pada prinsipnya aturan dibuat bukan untuk menyusahkan. Nah, harapannya, ketika dalam

perjalannya ternyata aturannya susah untuk diterapkan, maka ia berharap bisa dilakukan aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*).

“Kenapa tidak ada turunan yang membuatnya menjadi bisa dibijaki, apakah melalui perpu, permen, *mongo* silakan saja. Kita taat *kok*,” ungkap Nor Wahid saat audiensi PERPAMSI dengan Wakil Menteri PU.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap adanya pembedaan perlakuan terhadap BUMD AM yang menjalankan misi sosial pelayanan dasar air minum masyarakat dengan non-BUMD AM alias pelaku usaha swasta. “Itu barangkali bagian dari

solusi. Alasannya, kami bukan hanya cari profit, tapi ada kepentingan sosial,” imbuhnya.

Karena denda ini dirasakan cukup berat bagi BUMD AM, Nor Wahid juga menyarankan agar tagihan terkait denda administratif SIPSDA, kalau bisa, dikirimkan juga kepada kepala daerah. Tujuannya agar kepala daerah selaku kuasa pemilik modal (KPM) bisa mendukung pentingnya melakukan penyesuaian tarif, sehingga BUMD AM memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut.

“Terakhir, versi kami, mengurus SIPSDA itu sangat-sangat susah. Karena, di daerah sendiri banyak yang harus dilengkapi. Karenanya, kami mohon untuk BUMD AM, bolehkah dilakukan pengkhususan karena ini sudah berjalan lama (berlaku surut). Artinya, *oke* ini diterbitkan. Tapi, setelah itu, kalau Anda mau bangun kembali baru, harus lengkap. Tapi, yang sudah telanjur dibangun tolong dipermudah. Kalau misalnya yang kemaren syaratnya ada 10 atau 15, *yah*, tolong ini bisa jadi 5 saja, misalnya,” beber Nor Wahid. ■ AZ

**“Alokasi biaya untuk membayar denda tersebut menghambat pengembangan wilayah pelayanan kepada masyarakat. ”**

sinkronisasi antara Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya dalam penyusunan dan pemberlakuan regulasi yang mempertimbangkan kondisi BUMD AM sebagai pelaksana pemenuhan akses air minum masyarakat. Ia pun mengakui, hingga saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi untuk menemukan nilai koefisien denda yang lebih wajar. Sementara, pembayaran denda ditunda sampai ada keputusan final dari Ditjen SDA.

Sementara itu, Perumdam Tirta Arut bersama Dewan Pengawas masih terus mengkaji aturan yang menyebabkan sanksi dan menyiapkan tanggapan administratif. Mereka juga

berkoordinasi dengan KPM untuk mencari solusi yang tepat. Sapriansyah berharap ada pembinaan dan supervisi terhadap BUMD AM selama masa sosialisasi sesuai Pasal 22 ayat (2) Permen PUPR No. 3 Tahun 2023. Ia juga berharap ada revisi regulasi, termasuk pengurangan masa denda, peningkatan koefisien perhitungan denda, atau perpanjangan masa pembayaran.

“Substitusi denda dengan pembangunan sambungan rumah (SR) untuk peningkatan pelayanan juga menjadi salah satu solusi yang diusulkan,” pungkas Sapriansyah, yang juga ikut hadir saat audiensi PERPAMSI dengan Wamen PU Diana Kusumastuti, awal Januari lalu. ■

Mengadu ke “Orang Tua” Penyelenggara SPAM

# Titik Terang Persoalan Denda SIPSADA

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan/melayani kebutuhan dasar air bersih/minum masyarakat, penyelenggara SPAM/BUMD AM mengalami berbagai kendala, termasuk dari sisi regulasi yang dirasakan cukup memberatkan. Salah satu regulasi tersebut terkait Surat Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSADA) yang berlaku surut sejak 2019.

Penulis: **Ahmad Zazili**

Terkait hal ini, Pengurus Pusat PERPAMSI melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Dalam audiensi, hadir Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, Ketua Dewan Pengawas PERPAMSI Hasanuddin Kamal, Anggota Dewan Pengawas A. Teddy Setiabudi, Waka Bidang Kemitraan Sapriansyah, Waka Bidang Diklat Noor Wahid hasyim, serta Direktur Eksekutif Subekti Dr. Subekti.

Ikut mendampingi Wamen PU Diana Kusumastuti menerima audiensi PERPAMSI, yakni Dirjen SDA Bob Arthur Lombogia beserta jajaran, Plt. Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja beserta jajaran, serta Kepala Biro Hukum Kementerian PU Pujiono.

Salah satu topik yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah sanksi atau denda administratif yang berpedoman pada SE Dirjen SDA No.07/SE/D/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi, Reviu, dan Penghitungan Pengenaan Sanksi Administratif, sebagai turunan dari Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan



Audiensi Pengurus Pusat PERPAMSI bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Persetujuan Bidang Sumber Daya Air, serta PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Mewakili para anggota, PERPAMSI meminta agar dilakukan revisi Permen PUPR No. 3 Tahun 2023. Permen tersebut dinilai tidak selaras dengan Visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam “Asta Cita”, yang menargetkan air minum perpipaan tahun 2029 sebesar 40,20 persen (*baseline* 2023: 19,76 persen). Pemberlakuan denda surut menyebabkan denda administratif nilainya sangat fantastis, yang membuat BUMD AM mengalami kesulitan keuangan. Di samping itu, ketentuan ini kontra produktif dengan upaya percepatan akses air minum yang diatur dengan Inpres.

“Apa yang kami sampaikan ini barangkali sudah berulang-ulang. Kami berharap Ibu Wamen dan jajaran tidak bosan-bosan mendengarnya. Terkait beberapa persoalan mendesak, salah satunya denda SIPSADA, mohon diberikan solusi dan jalan keluar terbaik,” ungkap Arief Wisnu dalam diskusi tersebut.

## Aturan is aturan

Sebelum masuk ke dalam substansi diskusi, Wamen PU Diana Kusumastuti

menjelaskan bahwa peraturan tentang SIPSADA pada prinsipnya bukan untuk memberatkan pelaku usaha. Aturan ini bertujuan untuk mengelola, mengatur, dan menjaga keberlanjutan sumber daya air agar pemanfaatannya tidak merusak ekosistem dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan.

Dikatakan, UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang menjadi payung hukum terkait perizinan pemanfaatan SDA, dirancang untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penataan perizinan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendukung pemerataan pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat dan lingkungan.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, kita berupaya menertibkan semua. Konsekuensinya banyak, ada yang memberatkan ada yang *nggak*. Tetapi kalau dihitung secara kumulatif, pasti memberatkan. Jadi, ini harus kita benahi semua,” katanya.

Prinsipnya, sebagai salah satu pembina teknis atau "orang tua" penyelenggara SPAM di seluruh Indonesia, pihak Kementerian PU akan berupaya mencari jalan tengah atau solusi terbaik. Namun, Diana mengingatkan, aturan tetaplah aturan. Sebagai eksekutor dari aturan SIPSADA, apabila tidak menerapkan aturan, pihak Ditjen SDA Kementerian PU tentu akan menerima konsekuensinya juga.

Diana juga meminta agar penyelenggara SPAM memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat. Sambungan rumah (SR) dan lain-lain harus ditingkatkan. Jadi, katanya, mohon mereka juga diberikan peningkatan-peningkatan pelayanan. Kalau kinerja dan pelayanan meningkat, otomatis ada penambahan pendapatan. Meningkatnya pendapatan tentu akan mempermudah pelaksanaan kewajiban, termasuk terkait SIPSADA.

#### Upaya Ditjen SDA

Dirjen SDA Kementerian PU Bob Arthur Lombogia mengungkapkan, pihaknya mendukung target akses 100 persen air minum aman di 2045 dan

menjadi program "Asta Cita" Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Sayangnya, secara umum saat ini Indonesia masih mengalami defisit ketersediaan SDA.

"Dari total 61 bendungan yang kami bangun, baru 15 bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk air baku. Sehingga, dari jumlah penduduk Indonesia 2024 sebanyak 283 jiwa baru ada ketersediaan air sekitar 10 ribu meter kubik per kapita per tahun. Sedangkan kebutuhan kita 14 ribu meter kubik per kapita per tahun. Jadi secara umum masih defisit," ungkap Bob.



Karena menyalakan sekitar 1 tahun dari batas waktu yang ditentukan, pihak penyelenggara SPAM diimbau untuk mengangsur denda administratif yang sudah di-*declare* untuk menghindari sanksi pidana.

## Solusi dengan Diangsur dan Hitung Ulang

Wamen PU Diana Kusumastuti dalam rapat menyimak pendapat para peserta diskusi dengan saksama, termasuk pendapat hukum dari Biro Hukum Kementerian PU. Dari tinjauan hukum, solusi untuk melakukan pemutihan sepertinya berat untuk dilakukan. Maka, dengan waktu tersisa hanya sekitar setahun, salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan cara diangsur (mekanisme dan pengaturannya akan diatur oleh pihak Ditjen SDA).

Sementara, apabila menunggu revisi Permen PUPR No. 3 Tahun 2023, ini tentu akan memakan waktu dan proses yang tidak bisa diprediksi. Alasannya, menurut Bob Arthur Lombogia, pembahasan revisi permen itu sampai di tingkat Setneg. Harus ada sinkronisasi dengan berbagai pihak/instansi yang berhubungan dengan peraturan tersebut.

Di samping itu, pihak Ditjen SDA membuka diri untuk melakukan

penghitungan ulang agar nilai denda administratif benar-benar sesuai dengan pemanfaatan SDA oleh penyelenggara SPAM. Contoh terhadap hal ini bisa melihat dari kasus Perumdam Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya, akumulasi denda yang muncul terhadapnya adalah sebesar Rp9,6 miliar. Namun, setelah pihak Perumdam Purbalingga dan Ditjen SDA melakukan rekonsiliasi dan penghitungan ulang, ternyata denda administratif yang sesuai dengan pemanfaatan SDA hanya sebesar sekitar Rp2,2 miliar.

"Yang jelas, ini harus diselesaikan sebelum aturan ini berakhir. Karena, sesuai amanat UU, kalau belum dituntaskan harus dilimpahkan ke pengadilan piutang negara. Perlu juga kami sampaikan bahwa hingga saat ini sudah masuk sekitar Rp3,8 miliar (PNBP SDA). Kami bisa monitor secara *online*. Jadi, kalau waktu habis, mohon maaf kami akan ikuti UU-nya," pungkas Bob.

**AZ**

**“ Tenggat waktu penyelenggara SPAM untuk menyelesaikan denda administratif SIPSADA hanya sekitar 1 tahun lagi (*deadline* Maret 2026). ”**

Terkait denda administratif yang berpedoman pada SE Dirjen SDA Nomor 07/SE/D/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi, Reviu, dan Penghitungan Pengenaan Sanksi Administratif, sebagai turunan dari Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air, Bob menyampaikan beberapa poin.

Pertama, ia melaporkan bahwa surat dari PERPAMSI tertanggal 31 Desember 2024 sudah diberikan tanggapan. Surat tersebut berupa permohonan revisi Permen PUPR No. 3/2023. "Jadi, saya kira *clear* di sini semua adalah persoalan peraturan," jelasnya. Bob menegaskan bahwa posisi pihaknya hanya sebagai pelaksana (eksekutor) dari peraturan tersebut. Dengan kata lain, solusi yang diharapkan tersebut sejatinya bukan berada di pihaknya.

Dijelaskan, dalam UU SDA No. 17 Tahun 2019 sudah dicantumkan bahwa pemanfaatan SDA yang tak berizin sanksinya adalah pidana. Namun, sanksi pidana ini "diperlunak" menjadi sanksi denda administratif sebagaimana amanah UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut, Ditjen SDA menginisiasi Permen tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang SDA. Maka, keluarlah Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang SDA dan ditindaklanjuti dengan SE Dirjen SDA Nomor 07/SE/D/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi, Reviu, dan Penghitungan Pengenaan Sanksi Administratif.

Diingatkannya bahwa relaksasi yang diamanahkan regulasi hanya berlaku tiga tahun (2023-2026). Bila dihitung saat ini, tenggat waktu yang tersisa bagi para penyelenggara SPAM untuk menyelesaikan masalah terkait SIPSADA (denda administratif) tersisa hanya sekitar setahun lagi (*deadline* Maret 2026). Artinya, ia menegaskan, apabila denda administratif tidak diselesaikan sebelum *deadline* tersebut, para pelaku usaha siap-siap berurusan dengan sanksi pidana.

# Fenomena Puncak Gunung Es



Penyelesaian masalah SPAM membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menangani gejala di permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam.

Permasalahan sektor penyediaan air minum di Indonesia sering kali hanya tampak sebagai puncak gunung es. Masalah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar dan mendasar yang tersembunyi di bawah permukaan.

Penulis: Deni Arisandy

**D**i mata Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, persoalan regulasi bidang SDA yang dirasakan sangat membebani para penyelenggara SPAM hanya fenomena puncak gunung es. Dengan kata lain, selain kendala regulasi, faktanya para penyelenggara SPAM di Tanah Air yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah (pusat dan daerah) dalam memberikan pelayanan dasar air bersih/minum masyarakat menghadapi banyak tantangan besar.

Hal itu diungkapkan Arief Wisnu dalam forum diskusi terbatas bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Dirjen SDA Bob Arthur Lombogia, serta Plt. Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dalam konteks SPAM di Indonesia, beberapa isu yang sering muncul ke permukaan meliputi ketersediaan

sumber air baku yang terbatas dan kualitas sumber air baku yang buruk karena pencemaran. Ada pula masalah infrastruktur yang kurang memadai (pipa distribusi yang tua, kebocoran air, dan sistem pengolahan yang ketinggalan zaman). Lalu, ada masalah manajemen dan tata kelola yang lemah serta pendanaan yang tidak memadai (Investasi di sektor air minum masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan teknologi modern).

Isu lainnya ialah kurangnya kesadaran publik. Masyarakat belum memahami pentingnya menjaga SDA dan mengakibatkan praktik-praktik yang merugikan seperti pencemaran. Dampak perubahan iklim terkait perubahan pola cuaca, kekeringan, dan banjir yang lebih sering terjadi makin memperumit masalah pasokan air. Belum lagi persoalan ketimpangan akses, yakni masyarakat di daerah perkotaan lebih cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan masyarakat perdesaan, yang menciptakan ketidakadilan sosial.

Penyelesaian masalah SPAM membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menangani gejala di permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dengan memahami bahwa tantangan ini lebih besar dari apa yang tampak, para pihak berkepentingan diharapkan dapat mulai mencari solusi yang tidak hanya menyembuhkan tetapi juga mencegah permasalahan di masa depan.

Terlebih, menurut Arief Wisnu, sektor air minum diberikan amanah besar untuk menyediakan akses air minum aman 100 persen pada tahun 2045. Sisa waktu hanya 20 tahun. Sementara, sampai saat ini capaian akses air minum baru sekitar 22 persen. Maka, bila melihat *timeline* yang sudah di depan mata tersebut, tidak salah bila muncul pemikiran bahwa Indonesia membutuhkan sebuah transformasi atau bahkan revolusi agar target tersebut bisa dicapai.

“ Untuk mengatasi kendala perizinan dan masalah di seputar sumber air baku, PERPAMSI mengusulkan untuk dibentuk satu entitas nasional. ”

#### Wacana pengelolaan

Beberapa wacana atau ide disampaikan Arief Wisnu, misalnya sumber air baku sampai meter produksi dikelola oleh satu entitas sendiri. Sementara, penyelenggara SPAM bertanggung jawab dari meter produksi, distribusi, hingga ke meter pelanggan (pelayanan). Dengan begitu, terkait permasalahan perizinan, ketersediaan air baku dan sebagainya menjadi tanggung jawab satu entitas nasional.

saat musim kemarau, kualitas air yang mereka olah dari *intake* mencapai 400 ppm, sementara Permenkes mensyaratkan 300 ppm. Kalau mereka harus menurunkan di bawah 300 ppm, lanjutnya, mau tidak mau harus menggunakan teknologi *membrane*, yang secara keekonomian sulit direalisasikan.

“ Hal seperti itu kalau jadi beban BUMD AM sangat berat. Beda cerita kalau itu dikelola satu entitas dan kami tinggal mengambil air baku yang kualitasnya sudah memenuhi syarat. Jadi kami tinggal distribusi saja. Ini jadi satu wacana untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul, yakni bahwa sektor air minum harus dikelola secara serius lintas sektoral, ” katanya.



Arief Cahyono  
Ketua Umum PERPAMSI

## Wacana “Debt Swap to Investment”

Persoalan denda administratif yang berpedoman pada SE Dirjen SDA No. 07/SE/D/2023 sebagai turunan dari Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 menjadi salah satu kendala yang dialami hampir seluruh penyelenggara SPAM. Terkait hal ini, Plt. Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja melemparkan wacana agar denda administratif tersebut dapat digunakan untuk mendukung investasi di sektor air minum atau *debt swap to investment*.

Dengan kata lain, utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah/BUMD AM dapat dialihkan menjadi investasi langsung pada proyek infrastruktur air minum. Hal ini penting diterapkan untuk menciptakan peluang pendanaan baru yang tidak hanya mengurangi beban utang tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Skema ini dapat meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas dan

memastikan proyek-proyek strategis di sektor air minum tetap berjalan dengan baik.

“ Ini dalam konteks diskusi. Misalnya, BUMD AM men-*declare* utang Rp1 miliar, maka dana tersebut digunakan kembali untuk membangun SR-SR baru. Jadi, dana tersebut tidak harus masuk ke bendahara umum negara (BUN). Tentu aturan dan formulanya harus dikaji kembali. Kalau tidak, nanti layanan BUMD AM tidak bertambah malah akan memberatkan BUMD AM, ” katanya.

Namun, bila solusi ini sulit dilakukan, lanjut Endra, ia menyarankan BUMD AM tetap memenuhi kewajiban membayar denda administratif yang sudah di-*declare*. Bagi BUMD AM yang berkomitmen melaksanakan kewajibannya, nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk program Inpres. ■ DA

“ Alasannya, kalau dikelola secara nasional, tentu akan lebih efisien. Contoh pembelian bahan kimia yang dibutuhkan dalam pengolahan, kalau itu bisa secara nasional oleh satu entitas, itu akan lebih murah, ” ungkap Arief Wisnu.

Terkait persoalan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (K3), ia mencontohkan kondisi yang dialami Perumda Surya Sembada Kota Surabaya yang dipimpinnya. Pada

#### Nasib kontribusi yang sudah disetorkan

Terkait kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang kerap menjadi tuntutan kepala daerah selaku KPM, muncul sebuah pertanyaan, apakah kontribusi tersebut akan kembali ke sektor pelayanan publik air minum? Contohnya adalah berupa penyertaan modal pemda untuk pengembangan layanan air minum masyarakat. Demikian juga dengan kontribusi penyelenggara

SPAM terkait pemanfaatan SDA, apakah akan kembali pada (pemeliharaan) sumber air baku?

Pertanyaan ini mengemuka untuk menegaskan kembali isu pendanaan di sektor air minum yang minim. Di samping itu, pertanyaan yang dikemukakan Arief Wisnu ini tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kritis dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dan pusat dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia kembali mencontohkan bagaimana Perumdam Surya Sembada yang harus mengeluarkan investasi Rp4-Rp5 triliun untuk bisa mencapai kualitas standar air minum (dengan melakukan pembenahan jaringan). Nah, ini siapa yang akan membayai?. Namun, kalau separuh dari kewajiban/beban BUMD AM yang dari hulu sampai meter produksi diambil dari tanggung jawab operator, hal ini tentu akan sangat meringankan para penyelenggara SPAM.

“ Hal-hal seperti ini perlu sama-sama dipikirkan sehingga target-target bisa kita capai dalam waktu yang sudah ditetapkan, ” katanya. Selain wacana alih tanggung jawab pengelolaan sumber air baku, Arief Wisnu juga berharap solusi adanya Badan Regulator yang bisa menjalankan fungsi-fungsi seperti pengawasan, pengaturan tarif, mediasi dan penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, fasilitasi investasi, hingga mendorong peningkatan kinerja para operator SPAM. ■

## PERPAMSI dan IATPI

# Kolaborasi untuk Masa Depan Air Indonesia

PERPAMSI dan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menjalin kerja sama strategis. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pada 13 Januari 2025 di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Penulis: **Rahmad Zakariyah**

**M**enurut Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan. Modul pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga ahli, hingga penyelenggaraan seminar dan lokakarya dirancang untuk membangun tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

Dengan adanya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dikelola IATPI, pelaku industri akan mendapatkan layanan sertifikasi dan pelatihan berbasis standar yang diakui nasional. Evaluasi rutin setiap enam bulan juga akan memastikan keberlanjutan kerja sama ini. PERPAMSI dan IATPI optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak nyata. "Dengan kolaborasi ini mudah-mudahan tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan keberlanjutan," ujar Arief Wisnu.

Dikatakan, kerja sama strategis ini menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun sektor air minum yang



ISTIHAMAS SURYA SEMBADA SURABAYA

PERPAMSI dan IATPI berkomitmen berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target SDGs, termasuk melalui adopsi praktik yang ramah lingkungan.

profesional, modern, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Dengan visi bersama, Indonesia bergerak menuju sistem pengelolaan air minum yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan. Air adalah kehidupan, dan hari ini, kita bekerja untuk menjaganya tetap mengalir.

Sementara Ketua IATPI yang juga Plt. Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja mengatakan, sinergi ini adalah momentum strategis untuk menjawab tantangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Dengan menggabungkan keahlian teknis IATPI dan jaringan luas PERPAMSI, diharapkan bisa menghadirkan solusi yang relevan dan transformasional.

"Tujuan kami memastikan akses air minum berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya dalam sambutan sebelum penandantanganan PKS.

Kerja sama ini memiliki dimensi strategis, tidak hanya untuk peningkatan kualitas layanan, tetapi juga untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia menargetkan akses air minum layak 100 persen pada 2030 dan air minum aman pada 2045. PERPAMSI dan IATPI berkomitmen untuk berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut, termasuk melalui adopsi praktik yang ramah lingkungan. ■

## Rakor PP dan Dewas PERPAMSI

**P**engurus Pusat PERPAMSI melakukan Rapat Koordinasi di Jakarta, Jumat (10/01/25). Selain jajaran Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi juga dihadiri jajaran Dewan Pengawas PERPAMSI, serta Direktur Eksekutif beserta jajaran Sekretariat. Dalam kesempatan tersebut Ketua YPTD-PAMSI Muslih juga melaporkan tentang perkembangan Akatirta sekaligus memperkenalkan sosok yang akan memimpin Akatirta, Rohmad Hadiwijoyo.

Rakor membahas isu seputar air minum, dinamika di internal asosiasi, serta kegiatan dan agenda di tahun 2025. Terkait agenda di 2025, diantaranya Rakernas 2025, HUT 53 PERPAMSI dan HUT 50 Majalah Air Minum PERPAMSI, serta IWWEF 2025. Sebagai informasi, tahun 2025 ini PERPAMSI juga akan menyelenggarakan MAPAMNAS ke-XV.

■ AZ



MAJALAH AIR MINUM

# BUMD AM yang Inklusif dan Responsif GEDSI

PERPAMSI menyelenggarakan webinar bulanan "Selasa Setara" (21/01/25) bersama afiliasinya, yaitu Forum Pelaksana Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (FERSIA). Acara ini didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT),

Dibuka Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, webinar ini diikuti sekitar 250 peserta dari kementerian, pemda, BUMD AM, universitas, asosiasi, konsultan, swasta, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, sambutan disampaikan oleh Steven Chaytor, Facility Director KIAT. Acara dipandu Jane E. Wuy sang, Kabid Advokasi dan Edukasi FERSIA yang juga Direktur Perumdam Tirta Senentang Kab. Sintang.

Berbagi pengalaman dan *sharing* informasi disajikan oleh para narasumber, yakni Zein Musta'in selaku Bendahara FERSIA yang juga Dirut Perumdam Tirta Bumi Sentosa Kab. Kebumen dengan materi berjudul "Menjadi BUMD AM yang Inklusif dan Responsif GEDSI".

Paparan berikutnya disampaikan oleh AAA Indira Pratyaksa, Vice President Sustainability Program, Rating and Engagement PT Pertamina (Persero) dengan paparan "Tempat Kerja yang Inklusif Gender: Pertamina Berbagi Pengalaman Terkait Penerapan GEDSI di Perusahaan".

Narasumber berikutnya ialah Dwi Nurwata, Ketua FERSIA yang juga menjabat Dirut Perumdam Tirta Sembada Kab. Sleman. Ia memaparkan topik "Butir-Butir Pikiran Terkait Indikator GEDSI untuk Mengukur Kinerja BUMD-AM." Webinar ditutup dengan paparan Arita Budi Utami, Kepala Bagian Produksi dan Distribusi PUDAM Kab. Banyuwangi. Arita menyampaikan materi terkait tantangan, kesempatan, dan hasil yang dicapai PUDAM Kab. Banyuwangi yang sudah menerapkan program GEDSI di perusahaan.



Kegiatan webinar ini merupakan kegiatan berkelanjutan "Selasa Setara" dengan mengusung tema yang berbeda-beda. Kali ini tema yang diusung ialah "Strategi Transformasi: Mewujudkan BUMD Air Minum yang Responsif terhadap Gender Equality, Disabilitiy dan Social Inclusion". Webinar bertujuan sebagai pembelajaran praktis dan mempromosikan pentingnya kesadaran dan komitmen bersama untuk mewujudkan akses air minum dan sanitasi yang aman dan adil untuk semua tanpa diskriminasi perbedaan gender maupun status sosial.  **Esti Aryati**

**PERPAMSI**  
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM  
SELURUH INDONESIA

**DIRGAHAYU**

**50<sup>th</sup>**  
Sekali Mengalir Terus Mengalir

1975-2025

"Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan dan pendorong kemajuan dunia air minum di Indonesia. Semoga terus menginspirasi dan berkontribusi bagi pembangunan air minum yang lebih baik dan berkelanjutan."

Ir. Arief Wisnu Cahyono, ST.  
Ketua Umum

www.perpamsi.or.id

@perpamsi

Perpamsi - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

## Kiprah 50 Tahun Majalah Air Minum PERPAMSI

# MELAYANI INSAN AIR MINUM INDONESIA

Tahun ini, Majalah Air Minum PERPAMSI merayakan perjalanan emasnya yang telah mencapai usia 50 tahun. Sebagai satu-satunya media yang secara khusus mengupas dunia air minum di Tanah Air, majalah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan industri air minum di Indonesia.

Penulis: **Deni Arisandy**

**S**ejak pertama kali diterbitkan, Majalah Air Minum (MAM) PERPAMSI telah konsisten menyediakan informasi yang terpercaya dan relevan. Majalah ini tidak hanya mengulas isu-isu terkini seputar air minum, tetapi juga menjadi jendela bagi para insan air minum untuk memahami berbagai kebijakan, regulasi, dan teknologi yang berpengaruh terhadap industri ini.

"Dengan gaya penulisan yang informatif dan komprehensif, MAM menjadi sumber referensi utama bagi perusahaan air minum, pemangku kepentingan, dan masyarakat air minum, mulai lembaga afiliasi PERPAMSI, industri penyedia kebutuhan air minum, akademisi, dan lain-lain," ujar Subekti, Pemimpin Umum Majalah Air Minum PERPAMSI.

### Wadah edukasi dan inspirasi

Selama lima dekade, MAM telah memainkan peran penting sebagai media edukasi. Artikel-artikel yang diterbitkan tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga menawarkan pandangan strategis dalam menghadapi tantangan operasional. Selain itu, berbagai cerita sukses dari perusahaan anggota PERPAMSI turut diangkat, memberikan inspirasi bagi insan air minum lainnya untuk terus berinovasi



Edisi awal MAM atau sebelum transformasi tahun 2004. Bukan sekadar media informasi, MAM adalah jembatan yang menghubungkan seluruh insan air minum di Indonesia.

dan meningkatkan kualitas layanan.

MAM telah menjadi panduan bagi perusahaan air minum untuk memahami regulasi terbaru dan dampaknya terhadap operasi bisnis mereka. Majalah ini juga sering menjadi tempat pertama kali diperkenalkannya inovasi teknologi, seperti penggunaan sistem otomatisasi, penerapan energi terbarukan dalam pengelolaan air, serta solusi digital untuk meningkatkan layanan pelanggan.

Selain itu, MAM secara konsisten mengangkat berbagai cerita sukses dari perusahaan anggota PERPAMSI. Kisah-kisah ini, seperti bagaimana sebuah perusahaan mampu menurunkan tingkat kebocoran air secara signifikan atau berhasil meningkatkan cakupan layanan air bersih ke wilayah terpencil, memberikan inspirasi nyata bagi insan air minum lainnya.

"Cerita-cerita tersebut tidak hanya memotivasi, tetapi juga membuka

peluang untuk replikasi program dan kolaborasi antaranggota PERPAMSI," imbuh Subekti.

Tidak hanya itu, majalah ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan pemikiran-pemikiran dari para ahli, praktisi, pengamat, dan akademisi di bidang air minum. Dengan demikian, MAM mendorong terciptanya dialog yang konstruktif di antara berbagai pemangku kepentingan. Majalah ini turut menyediakan ruang untuk diskusi mengenai tantangan-tantangan besar, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur air.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, MAM menjadi sumber inspirasi yang mendorong inovasi dan memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Para pembaca dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman nyata, sekaligus

## Timeline MAM PERPAMSI



mendapatkan panduan praktis untuk diterapkan dalam operasional mereka sehari-hari.

### Memperkuat peran advokasi dan pilar komunikasi insan air minum

Di tengah berbagai dinamika yang dihadapi industri air minum, MAM juga berfungsi sebagai alat advokasi. Melalui publikasinya, majalah ini mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi sektor air minum, mendorong dialog bersama para pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

"Dengan pendekatan ini, MAM membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya akses terhadap air bersih dan air minum bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ahmad Zazili, Redaktur Pelaksana MAM.

**“**MAM menjadi sumber inspirasi yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. **”**

## Konsisten Menyuarkan Kepentingan Anggota PERPAMSI

Majalah Air Minum PERPAMSI pertama kali diterbitkan pada 1 Februari 1975. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media yang mampu menjadi pemersatu dan penghubung antarinsan air minum di Indonesia. Pada masa itu, sektor air minum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya informasi teknis, minimnya akses terhadap kebijakan terbaru, hingga perlunya *platform* untuk menyuarakan kepentingan bersama.

Didirikan dengan visi besar, majalah ini segera mengambil peran strategis sebagai media yang memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan mendalam tentang industri air minum. Lebih dari sekadar publikasi, MAM menjadi referensi utama bagi perusahaan air minum (PAM) di seluruh Indonesia.

"Majalah ini juga menjadi alat perjuangan penting dalam menyuarakan kepentingan anggota PERPAMSI, terutama dalam mendorong kebijakan yang mendukung misi pelayanan air minum kepada masyarakat," ujar Ahmad Zazili, Redaktur Pelaksana MAM.

Sejak awal penerbitannya, majalah ini mengusung misi untuk menyematkan visi dan upaya insan air minum dalam menyediakan layanan air minum yang berkualitas. Karenanya, MAM tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi media untuk berbagi pengalaman, cerita sukses, dan inovasi di antara para pelaku industri.

"Dengan demikian, majalah ini turut mendukung terciptanya kolaborasi yang kuat di sektor air minum dan sanitasi," pungkasnya. **DA**

## Sejarah Singkat MAM PERPAMSI

- Terbit pertama kali tahun 1975, tiga tahun setelah PERPAMSI berdiri pada 1972. MAM diterbitkan sebagai alat pemersatu dan sarana saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antarperusahaan air minum anggota PERPAMSI
- Sejak terbit tahun 1975-2004, MAM dikelola seadanya dengan durasi terbit kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali
- Tahun 2004, MAM bertransformasi baik secara tampilan (foto, ilustrasi dan desain), secara konten, dan mulai rutin terbit setiap bulan hingga saat ini
- Pada November 2021, MAM merilis versi digital
- Per edisi Juli 2022, MAM berhenti cetak alis *full digital*
- Mulai edisi November 2022 (empat bulan setelah *full digital*), MAM kembali merilis versi cetak hingga saat ini (versi digital untuk sementara waktu hanya diperuntukkan secara terbatas dalam format PDF).

Dilanjutkannya, bukan sekadar media informasi, MAM menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh insan air minum di Indonesia. Dalam setiap edisinya, majalah ini menghadirkan profil perusahaan, wawancara tokoh, dan laporan kegiatan yang memperkuat rasa solidaritas antaraanggota PERPAMSI.

Memasuki usia setengah abad, MAM berkomitmen untuk terus menjadi sumber informasi utama dan referensi bagi insan air minum Indonesia. Dengan adaptasi terhadap era digital, majalah ini akan terus menyampaikan informasi dengan cara yang lebih modern dan interaktif, tanpa melupakan akar tradisinya sebagai media yang mengedepankan kualitas dan kepercayaan.

"Selamat 50 tahun Majalah Air Minum PERPAMSI! Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan dan pendorong kemajuan dunia air minum di Indonesia. Semoga terus menginspirasi dan berkontribusi bagi pembangunan air minum yang berkelanjutan," harap Arief Wisnu Cahyono, Ketua Umum PERPAMSI.

# SEKALI MENGALIR TERUS MENGALIR

Dalam sebuah organisasi atau asosiasi, keberadaan media informasi internal, seperti majalah atau buletin, memainkan peran yang sangat strategis. Sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan air minum di Indonesia, kehadiran Majalah Air Minum dapat menguatkan eksistensi dan meningkatkan pelayanan bagi anggota PERPAMSI.

Penulis: Deni Arisandy

K eberadaan media informasi internal seperti Majalah Air Minum bukan sekadar pelengkap, melainkan juga kebutuhan strategis bagi asosiasi PERPAMSI. Media ini tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan, tetapi juga alat yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan anggota, membangun solidaritas, dan mendorong kolaborasi. Karenanya, investasi dalam pengelolaan media internal yang berkualitas merupakan langkah penting untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan asosiasi serta anggotanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Dwike Riantara, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Air Minum. Menurutnya, majalah ini memiliki keunikan yang seharusnya menjadi kekuatan abadi yang tak dapat dikalahkan oleh apa pun, yaitu bahwa ia adalah bahan bacaan khusus bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan air minum seluruh Indonesia.

“Selain harus menjawab tantangan perubahan zaman, MAM harus tetap

mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi pembaca setianya,” ujar Dwike, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Air Minum yang kini dipercaya sebagai Dirut Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi periode 2021-2026.

Boleh dibilang, hal ini ia katakan sebagai bentuk kecintaannya kepada MAM. Maklum, sejak tahun 2003 ia membantu proses transformasi desain MAM dari format awal yang menyerupai buletin menjadi majalah modern.



Tampilan Majalah Air Minum dari edisi ke edisi.

“Sejak 2004, majalah ini mulai terbit sebagai majalah bulanan secara konsisten, dan kemudian saya bekerja untuk Majalah Air Minum selama 18 tahun sebagai desainer grafis,

fotografer, ilustrator, reporter, editor, hingga menjabat Pemimpin Redaksi sampai 2021,” kenangnya.

Ia menambahkan, perlu diingat sejarahnya, MAM hadir untuk memenuhi amanat dan kewajiban PERPAMSI di bidang informasi dan komunikasi (infokom) bagi para anggotanya. Maka, lanjut Dwike, ia wajib untuk terus ada sepanjang masa, apa pun bentuknya. Sekali mengalir, terus mengalir.

Sjobirin Hasan, sosok yang sudah lebih dari 20 tahun bergelut di dunia perairminuman, juga ikut mengapresiasi kehadiran dan eksistensi MAM PERPAMSI. Secara jujur, ia mengaku merindung menapaktilasi perjalanan MAM yang sudah menginjak usia 50 tahun karena di awal-awal bisa saja kita

tidak menyangka akan berjalan sejauh ini.

Karena itu, ia sangat bersuka cita atas perjalanan panjang yang telah dijalani MAM. Baginya, 50 tahun adalah

sebuah perjalanan yang sudah sangat panjang. Dari awal berkarier di dunia perairminuman, ia sudah menjadi pembaca setia MAM hingga saat ini.

"MAM adalah barometer terbaik untuk layanan air minum yang secara nasional beredar. Sekali lagi, sebagai pembaca setia, terima kasih telah mendampingi, memberikan informasi-informasi perkembangan dan perjalanan air minum Indonesia. Semoga MAM makin jaya," ungkap sosok yang juga Direktur Perumdam Kabupaten Bangkalan ini.

**“ MAM hadir untuk memenuhi amanat dan kewajiban PERPAMSI di bidang informasi dan komunikasi (infokom) bagi para anggotanya. ”**

Kesan mendalam juga diungkapkan Agustan, yang kini dipercaya sebagai Dirut Perumdam Kota Surakarta. Ia mengaku banyak belajar dan berkembang secara pribadi saat aktif menjadi penulis kontributor MAM sejak tahun 2004 (waktu itu masih sebagai staf SPI). Ia mengungkapkan, dengan membaca MAM, ia sering menemukan inspirasi dari tulisan dan cerita sukses atau cerita baik yang bisa memberi motivasi dan bahan dalam memimpin.

"Terima kasih banyak untuk MAM yang telah memberi andil bagi saya dalam mengantarkan saya dalam memimpin BUMD AM. Saya belajar banyak dari hasil tulisan saya, belajar banyak dari isi dan muatan MAM yang menginspirasi, memotivasi, serta jadi sarana membangun jejaring. Selamat HUT ke-50 tahun MAM. Terus berkontribusi untuk kemajuan BUMD AM di seluruh Indonesia," beber Agustan.

Widya Rizky Rahmawati, Staf Senior Humas PDAM Surya Sembada Surabaya, juga memiliki kesan yang kurang lebih sama. Maklum, sama dengan Agustan, ia juga pernah aktif sebagai penulis kontributor di MAM. Karenanya, saat mengetahui MAM telah menginjak usia 50 tahun, beberapa kesan dan harapan juga ia sampaikan untuk kemajuan media informasi para tukang ledeng di Indonesia.

"Hari ini, kita merayakan 50 tahun dedikasi Majalah Air Minum untuk Indonesia. Usia 50 merupakan usia mapan di kancah perairminuman di Indonesia. Di tengah menurunnya budaya literasi di Indonesia, MAM

terus hadir dengan meng-*upgrade* diri mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, ada rubrik berbahasa asing yang menunjukkan visi MAM yang menembus batas. Luar Biasa! Bravo Majalah Air Minum! Sebuah kebanggaan bagi saya menjadi kontributor MAM dari PDAM Surabaya," ungkapnya.

Widya berharap, MAM terus menjadi simbol kesadaran akan pentingnya akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. Air minum dan sanitasi yang layak bukan

hanya tentang kenyamanan hidup sehari-hari, melainkan menyangkut kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Target nasional, yaitu 100 persen akses air minum dan 70 persen sanitasi aman di seluruh Indonesia pada 2045, harus terus disuarakan sebagai motivasi dalam bekerja.

"Semoga MAM tetap hadir bersama-sama upaya perusahaan air minum se-Indonesia untuk mewujudkan air minum sehat serta akses air minum aman dan layak untuk Indonesia. Terima kasih!" ucapnya. ■ DA



## Jajaran Pengasuh Majalah Air Minum

Tim pengasuh Majalah Air Minum merupakan para pegawai di Sekretariat PERPAMSI. Secara *ex-officio*, MAM dipimpin oleh Dr. Subekti (sebagai Pemimpin Umum/Redaksi), yang sehari-hari juga sebagai Direktur Eksekutif PERPAMSI, sejak April 2024 hingga saat ini.

Jajaran redaksi dan tata usaha diisi Ahmad Zazili sebagai Redaktur Pelaksana sejak 2017, Wurianisa Purnamisuri sebagai Sekretaris Redaksi sejak 2020, Marsudi sebagai marketing dan iklan sejak 2005, dan Achie Susilawati di bagian distribusi sejak 2022.

Untuk membantu tugas-tugas keredaksi dan artistik, MAM dibantu beberapa kontributor tetap, yakni Anwari Natari sebagai penulis dan editor sejak 2018, Rois Said sebagai penulis dan reporter sejak 2016, Deni

Arisandy sebagai penulis dan reporter sejak 2018, dan Rahmad Zakariyah sebagai penulis dan reporter sejak 2018. Di bagian artistik, ada Gandjar Widodo sebagai karikaturis dan ilustrator sejak 2016, dan Isnu Arsanto sebagai desainer grafis sejak 2010.

Di samping kontributor tetap, MAM juga kerap dibantu tenaga penulis lepas dari berbagai latar belakang kompetensi dan pengalaman. Mereka, misalnya, Victor Sihite (wartawan senior), Audelta Elviezon (trainer manajemen SDM), Gede H. Cahyana (dosen Universitas Kebangsaan RI), Elly Kusumawati dan Ita Pintarida Zebua (Rucika Institute), Wisnu Adinugros (Perumdam Kabupaten Wonogiri), Wavyuddin (PDAM Surya Sembada Surabaya), Faizal Fajar Nurroji (Perumdam Kota Tegal), dan Dina Sajida (Perumdam Tirta Siak Pekanbaru). ■ DA

## PERUMDA AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

# Menjawab Tantangan Penyediaan Air Minum Aman

Meski sudah mencapai akses air minum 100 persen sejak tahun 2023, penyediaan air minum aman masih menjadi tantangan yang harus dihadapi Perumda Surya Sembada Kota Surabaya. Peremajaan pipa dan revitalisasi unit produksi merupakan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, investasi besar merupakan tantangan untuk menjalankannya.

Penulis: **Deni Arisandy**

**M**enurut Direktur Utama Perumda Surya Sembada Arief Wisnu Cahyono, saat awal dipercaya memimpin Surya Sembada sejak 18 November 2021, cakupan pelayanannya sudah berada di posisi 99 persen. Sejak itu, berbagai upaya dilakukan guna melakukan percepatan demi mewujudkan target '2023 Semua Terlayani Air'. Salah satunya ialah program master meter untuk menjamin pemenuhan air bagi warga yang menempati wilayah yang tidak dapat dipasangi pipa BUMD AM secara administratif. Ada pula kontinuitas program peremajaan pipa dan modernisasi layanan digital.

Dikatakan, langkah yang diambil memang dalam rangka menuju Indonesia Emas, yaitu mencapai target layanan 100 persen air minum aman. Hal ini, lanjut Arief, merupakan tantangan besar bagi semua penyelenggara air minum di Indonesia. Kota Surabaya yang saat ini layanan air minum perpipaannya sudah mencapai 100 persen juga masih belum dikatakan aman untuk diminum langsung oleh masyarakat.

Dengan jaringan pipa sepanjang lebih dari 6.000 km, sebagian besar pipa yang dikelola Surya Sembada berusia di atas 50 tahun. Air baku yang berasal dari Sungai Brantas dengan kualitasnya seringkali tidak memenuhi kualifikasi "kelas 2". Hal ini mengakibatkan kondisi



IPAM Ngagel dengan kapasitas 4.500 liter per detik. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari sungai Brantas.

pipa rentan berkerak dan bocor. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan air yang didistribusikan oleh IPAM belum layak dikonsumsi langsung oleh pelanggan.

"Untuk itu perlu dilakukan peremajaan pipa dan revitalisasi unit produksi. Yang menjadi kendala atau hambatan terbesar adalah bahwa perbaikan infrastruktur tersebut memerlukan investasi yang sangat besar dan tidak dapat dilakukan sekaligus oleh perusahaan sendiri," ujar Arief.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Surya Sembada berupaya mencari alternatif pembiayaan, yaitu melakukan penjajakan kerja sama baik dengan swasta atau BUMN, serta tentunya dengan dukungan penuh dari KPM dan instansi terkait lainnya. KPM, ujarnya, memberikan target cakupan layanan 100 persen pada 2023 dan pelayanan 24 jam dengan tekanan air 2 meter kolom air (MKA).

### Kontribusi untuk Kota Surabaya

Diakui oleh Direktur Keuangan Achmad Prihadi, beban operasional terbesar di perusahaan masih di biaya listrik dengan nilai sekitar Rp160 miliar per tahun. Namun, secara umum, menurutnya kondisi perusahaan masih dalam kategori sehat. Apalagi, pendapatan masih lebih banyak daripada pengeluaran atau masih mendapatkan

profit yang bagus. Total biaya saat ini sebesar Rp745 miliar, sementara pendapatan telah mencapai Rp1.057 miliar. Sehingga, laba yang diperoleh mencapai Rp242 miliar.

Dari laba ini, menurut Prihadi, saat ini perusahaan sudah mampu menyetor PAD sebesar Rp140 miliar. Sebelumnya, setoran PAD per tahun rata-rata mencapai Rp113 miliar. Surya Sembada juga terus mencatatkan perkembangan yang baik dalam bidang keuangan. Terbukti, tarif rata-rata Rp4.129 dan harga pokok produksi (HPP) rata-rata mencapai Rp2.134. Sementara, efisiensi penagihan sudah mencapai 97,73 persen dan rata-rata daftar rekening ditagih (DRD) per bulan Rp949 miliar.

Namun, diakuinya, masih ada beberapa kendala. Yang paling terasa adalah adanya perubahan regulasi, misalnya terkait pajak, bunga bank, dan pengadaan. Untungnya, hingga saat ini kendala-kendala tersebut masih bisa diatasi.

### Layanan CIS dan digitalisasi

Visi Perumda Surya Sembada untuk menjadi perusahaan air minum modern diwujudkan dalam berbagai langkah dan program. Menurut Direktur Pelayanan Agung Pribadhi, ada beberapa program prioritas dalam bidang pelayanan. Yang paling utama adalah pemasangan sambungan baru dan master meter.



Peresmian master meter oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.



Meninjau kondisi sambungan rumah pelanggan.

Kemudian, Surya Sembada juga melakukan pergantian meter pelanggan untuk mendukung penurunan angka NRW dan melakukan penanganan aduan sesuai dengan SOP.

"Peningkatan dan inovasi layanan memang menjadi prioritas. Hal yang sudah dilakukan adalah digitalisasi



Direksi Perumda Surya Sembada dari kiri ke kanan: Direktur Keuangan Achmad Prihadi, Direktur Operasi Nanang Widyatmoko, Direktur Utama Arief Wisnu Cahyono, Direktur Pelayanan Agung Pribadi.

layanan pelanggan. Tujuan yang ingin dicapai dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pembayaran," ujar Agung.

Salah satunya melalui penggunaan aplikasi CIS (*customer information system*), layanan digital yang dibangun untuk memudahkan pelanggan. Dengan

adanya CIS, pelanggan yang mengunduh layanan ini dapat melakukan pembayaran *online*, catat meter mandiri, informasi gangguan air, pengaduan, pendaftaran pemasangan baru, dan berbagai fasilitas lainnya. Sejumlah menu baru tersedia di aplikasi CIS, seperti menu Catat Meter Mandiri dengan *pop up* notifikasi, serta

## Inovasi Berkelanjutan

Inovasi berkelanjutan menjadi salah satu kunci pengembangan perusahaan. Inovasi yang dimaksud, menurut Arief, yakni dengan pemanfaatan teknologi modern, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menerapkan hal tersebut Surya Sembada dapat mencapai visinya sebagai penyedia layanan air minum yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan akademisi, akan membuka peluang baru dalam pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan sumber daya air secara lebih optimal.

"Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Perumda Surya Sembada tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Surabaya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih

maju dan berkelanjutan," ujar Arief Wisnu, yang menjabat sebagai nakhoda Surya Sembada sejak 18 November 2021.

Dikatakan, di tahun 2025, pihaknya sudah memasang beberapa target penting. Yaitu *zero accident*, NRW maksimal 29,75 persen, efektivitas penagihan 97 persen, indeks kepuasan pelanggan minimal 86 persen, tekanan air pelanggan (persil)  $>2$  MKA selama 24 jam di semua pelanggan, pemasangan sambungan baru minimal 5.892 pelanggan, pemasangan master meter 160 KK, ganti meter 100.000 pelanggan, rehabilitasi dan penambahan jaringan pipa, tingkat kekeruhan air produksi 1,4 NTU, dan rasio diklat pegawai 100 persen.

Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Arief berkeyakinan hasil terbaik akan bisa dicapai. Apalagi dengan komitmen Pemilik/KPM dan DPRD dalam

mendukung pengembangan dan pelayanan air bersih oleh BUMD AM. Antara lain dalam hal peningkatan tata kelola perusahaan, dengan mendukung BUMD AM menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). Juga dalam hal regulasi dan kebijakan yang mendukung.

"Penyusunan regulasi yang mendukung keberlanjutan BUMD AM, seperti peraturan daerah tentang pengelolaan air minum, tarif air, dan perlindungan sumber daya air merupakan dukungan utama bagi kemajuan BUMD AM. Selain itu penetapan tarif yang wajar dan mempertimbangkan aspek keterjangkauan masyarakat serta keberlanjutan operasional dengan kondisi FCR berkelanjutan, menjadi hal yang penting bagi kelangsungan BUMD AM ini," pungkas Arief, sosok yang juga Ketua Umum PERPAMSI. ■ DA

**“** Dengan jaringan pipa sepanjang lebih dari 6.000 km, sebagian besar pipa yang dikelola Surya Sembada berusia di atas 50 tahun. **”**

informasi grafik pemakaian air pelanggan per bulan maupun per tahun.

Menurut Agung Pribadi, beberapa target yang ingin dicapai Perumda Surya Sembada di tahun 2025, antara lain, indeks SKP minimal 86 persen, pemasangan sambungan baru minimal 5.892 pelanggan, pemasangan master meter untuk 160 KK, dan ganti meter untuk 100.000 pelanggan.

### Tarif dan efisiensi operasional

Menurut Arief, tarif air minum Perumda Surya Sembada sudah dalam kondisi *full cost recovery* (FCR). Cuma, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama keterjangkauan bagi masyarakat. Kendala lain adalah soal regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah sering menetapkan

batasan tarif agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal ini tentunya bisa menjadi kendala tersendiri bagi BUMD AM tersebut.

Arief juga menggambarkan adanya tantangan biaya produksi yang terus meningkat. Indikatornya ialah tarif dasar listrik (TDL) yang naik setiap tahun, harga bahan kimia yang naik, serta NRW yang masih di kisaran 31,52 persen. Namun, ia berkeyakinan bahwa kondisi FCR masih dapat terjaga dan dipertahankan, antara lain dengan melakukan penyesuaian

tarif dan menetapkan mekanisme subsidi silang, sesuai dengan klasifikasi pelanggan.

Selain itu, perusahaan juga terus melakukan efisiensi operasional, seperti dengan memanfaatkan teknologi hemat energi serta menggunakan bahan kimia secara efektif dan efisien dalam operasional IPAM. Upaya lainnya ialah mengurangi kebocoran air (NRW) melalui peremajaan pipa dan monitoring jaringan secara berkala dan penggunaan teknologi



Ruang monitoring produksi, distribusi, dan pelayanan (SOCC).



Apel petugas lapangan.

## Prestasi Perumda Surya Sembada

- PERPAMSI Award 2024 sebagai PAM Terbaik dalam Implementasi K3 dan PAM dengan Peningkatan Kinerja SDM Terbaik;
- Apresiasi GCG Predikat Baik Periode 2023 dari BPKP Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III/2024;
- Penghargaan Corporate Culture Award 2024 dari ACT Consulting (ESQ);
- Penghargaan Mitra Bakti Husada Tahun 2024 untuk Kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja Perkantoran dari Kementerian Kesehatan;
- CNN Indonesia Award 2024 kategori: *Innovation Makes Water a Reality for All*;
- BUMD Entrepreneurial Marketing Award 2024 yang diselenggarakan PT MarkPlus, Inc (Hermawan Kartajaya);
- Top BUMD Award 2024 predikat “Bintang 5” dari Majalah TopBusiness;
- Sertifikasi ISO 9001:2015 Ruang Lingkup Pengelolaan Penyediaan Air Minum;
- ISO 37001:2016 Ruang Lingkup Pelayanan Pelanggan, Produksi, dan Distribusi;
- SO 55001:2014 Ruang Lingkup Aset Produksi IPA Karang Pilang dan Ngagel
- Wajib Pajak PBB Teladan Kota Surabaya Tahun 2024;
- Inovasi Digital Award 2024 dari Berita Jatim;
- Penghargaan Mitra Bakti Husada Tahun 2024 Kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja Perkantoran dari Kementerian Kesehatan;
- Peresmian Reservoir Mbah Ratu, Rumah Pompa Air Baku IPAM Karapilang, rehabilitasi jaringan pipa 142 kilometer, dan launching 1.000 smart water meter.

### Perumda Surya Sembada Kota Surabaya

**Jumlah pelanggan:** 630.491 SR  
**Penduduk:** 3.017.382 jiwa  
**Pegawai:** 1.487 orang  
**Cakupan pelayanan:** 100 %  
**Jumlah IPAM:** 6 IPAM  
**Total kapasitas produksi:** 11.850 lpd  
**Kapasitas terpakai:** 11.850 lpd  
**Tarif rata-rata:** Rp 4.129,-  
**HPP rata-rata:** Rp 2.134,-  
**NRW:** 31,52 %  
**Efisiensi penagihan:** 97,73 %  
**Rata-rata pengaliran:** 24 jam  
**Penilaian kinerja 2023:** Sehat  
**Nilai kinerja:** 4,16  
**Setoran PAD:** Rp113 miliar  
Sumber: Surya Sembada, 2024

*smart metering* untuk mendeteksi kebocoran lebih cepat.

Upaya lainnya adalah diversifikasi usaha. Mereka telah mengembangkan layanan tambahan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan untuk pendapatan non-air. Surya Sembada juga melakukan peningkatan pelayanan dan kualitas air, antara lain dengan memastikan agar pelanggan mendapatkan kualitas air yang baik agar penyesuaian tarif dapat diterima masyarakat. Perumdam ini juga terus melakukan digitalisasi layanan pelanggan.

#### Program penurunan NRW

Perumda Surya Sembada terus fokus memberikan pelayanan 100 persen kepada seluruh pelanggan dengan minimal tekanan air 2 MKA selama 24 jam (2/24). Di wilayah yang belum mendapatkan pelayanan 2/24 ini, sebagian besar berada di Zona 3. Di situ, mereka melakukan program-program strategis untuk mendukung peningkatan pelayanan (baik dari kapasitas maupun tekanan). Strategi yang dilakukan, antara lain, peningkatan kapasitas IPAM Ngagel 3, peningkatan kapasitas IPAM Karangpilang 2, dan IPAM Karangpilang 3 sebagai suplai utama Rumah Pompa Mbah Ratu yang mulai dioperasikan sejak Januari 2024. Ada pula rehabilitasi jaringan pipa sebagai upaya peremajaan usia teknis, optimalisasi jaringan perpipaan, serta pengaturan *valve* untuk pengelolaan tekanan air distribusi.

Upaya-upaya tersebut, selain meningkatkan pelayanan kepada

pelanggan, juga berdampak pada peningkatan kebocoran pipa. Masifnya pelaksanaan pekerjaan pemasangan *box culvert* untuk penanganan banjir di Kota Surabaya ikut berdampak pada naiknya jumlah pipa bocor. Untuk menekan kebocoran itu, mereka melakukan percepatan penanganan aduan pipa bocor. Caranya ialah menyediakan pelaksana pekerjaan khusus perbaikan pipa bocor dampak *box culvert*. Mereka

Tiga interzone yang dibentuk adalah Interzone 1 (Zona 1), Interzone 2 (Zona 2 dan 3), serta Interzone 3 (Zona 4 dan 5). Identifikasi awal menunjukkan bahwa NRW yang lebih tinggi berada di Interzone 2 dan Interzone 3.

Menurut Direktur Teknik Nanang Widyatmoko, angka NRW relatif stabil di angka 31 persen yang di akhir tahun 2024 mencapai 31,52 persen. Hasil tersebut berkat berbagai program dan

**“** Beberapa target Surya Sembada di 2025; indeks SKP minimal 86 persen, SR baru minimal 5.892 pelanggan, master meter untuk 160 KK, dan ganti meter untuk 100.000 pelanggan. **”**



Pemeriksaan kesehatan pegawai.



Kegiatan kerohanian manajemen dan pegawai.



Memberi penjelasan kepada awak media.

jugaberkoordinasi lebih intens dengan pihak pemerintah kota, kelurahan, dan perangkat RT/RW, serta pelaksana pekerjaan *box culvert*.

Pihak Surya Sembada juga melakukan monitoring tekanan secara *online* di 435 titik untuk percepatan penanganan keluhan tidak dapat air (TDA) maupun untuk program pemerataan tekanan secara berkelanjutan. Langkah lain yang tak kalah penting adalah pencarian kebocoran aktif pada wilayah yang diduga memiliki tingkat kehilangan air yang tinggi, ganti meter elektromagnetik dan ganti meter baru reguler, serta pembentukan interzone untuk identifikasi lebih detil area dengan NRW tinggi.

strategi yang telah dijalankan. Namun, lanjut Nanang, selain NRW, tantangan lainnya di bidang operasi adalah akurasi data GIS. Karenanya, sejumlah inovasi terus diupayakan, antara lain dengan otomasi rumah pompa *unmanned* Kandangan dan Kedung Cowek, perubahan koagulan dari aluminium sulfat menjadi PAC untuk mendukung efisiensi operasi dan efisiensi bahan kimia, otomasi injeksi bahan kimia menggunakan SCM, serta otomasi operasi pompa distribusi untuk mendukung efisiensi energi.

Selain itu, pada tahun 2025, Surya Sembada menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan IPAM Karangpilang 4, melakukan pembangunan rumah pompa tambahan IPAM Karangpilang 2, rehabilitasi jaringan pipa transmisi distribusi sekitar 30 km, melakukan penambahan otomasi 2 rumah pompa *unmanned*, serta penggunaan PAC dan SCM untuk semua IPAM.

Dengan target tersebut, Nanang mengaku telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang menunjang pencapaian target tekanan minimal 2 MKA di rumah pelanggan di seluruh wilayah kota Surabaya. Caranya ialah melakukan: optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi melalui peremajaan dan modifikasi unit pengolahan, peningkatan keandalan operasi unit produksi dan distribusi melalui pembangunan IPAM Karangpilang 4, pembangunan rumah-rumah pompa tambahan, penyediaan sistem kelistrikan *redundant*, optimalisasi sistem distribusi melalui pembangunan rumah pompa distribusi, rehabilitasi jaringan perpipaan, serta peningkatan pendapatan non-air melalui optimalisasi komersialisasi Laboratorium Pengujian Air. **■**

## PT MULTI GALA NUSANTARA

BERKONTRIBUSI MENDUKUNG  
AIR MINUM PERPIPAAN INDONESIA

PT Multi Gala Nusantara berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap air minum perpipaan di Tanah Air. Komitmen tersebut terwujud melalui penyediaan material maupun produk di dalam rantai pasok (supply chain) infrastruktur air minum yang didistribusikannya.

Penulis: **Deni Arisandy**

PT Multi Gala Nusantara (MGN) memiliki pengalaman panjang di bidang perpipaan air minum, air limbah, pengolahan air, jaringan gas, dan *fiber optic*. Berbekal pengalaman tersebut, MGN berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang dengan mendistribusikan produk-produk berkualitas di bidang pengelolaan air dan energi dari hulu ke hilir.

Menurut Yoyok Purdianto, Manajer Operasional PT MGN, saat ini air minum yang layak di Indonesia masih belum mencapai 100 persen. Capaian akses air minum perpipaan yang saat ini baru sekitar 19,79 persen membuat potensi pasar untuk produk pipanisasi serta pengolahan air dinilai masih sangat besar. Upaya pencapaian target tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas material, produk, atau barang di dalam *supply chain* infrastruktur air minum.

"Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk dapat menjadi kontributor andalan di tengah persaingan pasar yang makin ketat. Harga kompetitif, pengiriman tepat waktu, serta jaminan kualitas produk



Penyerahan sertifikat Anggota Luar Biasa (ALB) PERPAMSI kepada manajemen PT MGN.

menjadi *concern* utama kami," tandas Yoyok.

#### Pengalaman panjang

Selama lebih dari 17 tahun berkecimpung dalam industri perpipaan serta berbagai proyek sistem penyediaan air minum, MGN menyediakan berbagai macam jenis pipa plastik dan *fitting* berkualitas. MGN merupakan distributor utama pipa Rucika di wilayah Jawa Timur dan beberapa wilayah lain seperti NTT, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Riau, dan Bengkulu.

MGN sudah memiliki banyak portofolio proyek di beberapa BUMD AM, seperti Surabaya, Gresik, Bandung, dan Malang. Mereka juga mengerjakan proyek pihak swasta seperti Sumarecon, Freeport, dan Dinas PU di daerah.

Jadi, sekitar 70 persen pangsa pasar PT MGN adalah proyek Kementerian Pekerjaan PUPR, BUMD, dan BUMD AM, lalu 30 persen lagi swasta seperti proyek perpipaan air bersih di perusahaan tambang batu bara maupun tambang emas. Pada tahun 2024, terjadi perubahan pangsa pasar, yakni menjadi sekitar 40 persen di perusahaan

swasta pertambangan, 60 persen di Kementerian PUPR dan BUMD AM.

Menurut Yoyok, ketika awal beroperasi, salah satu keunggulan yang dikedepankan PT MGN adalah pengakuan mengenai standar tingkat komponen dalam negeri untuk produk yang mereka pasarkan ke industri air minum dan Kementerian PU. Saat itu, dengan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen, TKDN produk-produk PT MGN sudah berada di level 47 persen.

Salah satu keunggulan PT MGN adalah dapat memperbaiki langsung di tempat kerusakan ringan pada produk yang digunakan oleh tim PT MGN. Harga juga jauh lebih kompetitif. Dukungan pabrik di dua lokasi strategis di Bekasi dan Gresik juga menjadi keunggulan lain yang mereka miliki.

Dikatakannya, sejalan dengan target perusahaan untuk menjadi penyedia berbagai macam produk di bidang pengelolaan air dari hulu ke hilir, PT MGN saat ini sedang menjajaki model bisnis dengan skema investasi dengan BUMD AM di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan wujud komitmen PT MGN untuk mendukung pencapaian target

peningkatan kinerja air minum yang aman dan berkelanjutan. Sebagai ALB PERPAMSI, PT MGN juga berharap dapat makin memperluas *networking* serta saling *sharing* dengan ALB lain maupun pelaku-pelaku bisnis di sektor air minum/bersih.

#### Terus memperluas pasar

Sampai saat ini, PT MGN masih terus mempelajari kondisi pasar, bagaimana potensi pasar dan jaringannya, arah penjualannya, lalu apakah pasarnya sudah tertata dan membaik sesuai harapan. Ditegaskan Yoyok, untuk dapat memenangkan persaingan dan meningkatkan pangsa pasar, pihaknya secara konsisten berkolaborasi dengan *partner* atau pihak *principal* untuk menyediakan produk-produk inovatif yang sangat dibutuhkan pelanggan.

PT MGN saat ini mendistribusikan produk-produk unggulan yang meliputi pipa air dan gas HDPE merk Rucika, pipa air dan limbah uPVC, serta PPR merek Rucika berikut aksesorisnya. MGN juga mendistribusikan paket instalasi pengolahan air (IPA) baja, modular reservoir tank HDPE-Closedcell, pompa air, serta solar panel. Mereka menyediakan berbagai macam jenis pipa plastik dan *fitting* dengan kualitas tinggi seperti pipa PE (Rucika Black dan Rucika Gas) serta pipa PVC (PVC-O-Rucika Exoplas, uPVC-Rucika Lok, Rucika Safe, Rucika Lite dan Rucika standard).

Salah satu produk pipa inovasi terbaru yang sedang gencar dipasarkan dan telah dapat diterima pasar adalah pipa PCV-O Rucika Exoplas. PVC-O terbuat dari uPVC (*unplastized Polyvinyl*

*Chloride*) generasi terbaru dengan metode pembuatan Bi-axial (*stretching*) untuk peningkatan performa pipa termoplastik. Pipa Rucika Exoplas ini memiliki *design stress* sampai dengan 28 Mpa atau dua kali lipat lebih besar dari pipa uPVC membuat ketahanan tekanan meningkat (dengan perbandingan ketebalan pipa yang sama dengan pipa uPVC).

“Dengan teknologi terbaru, pipa PVC-O dapat ditingkatkan kualitasnya serta dikurangi berat pipanya dibandingkan pipa PCV biasa. Desain *super socket* yang berbeda dengan PVC biasa memberikan jaminan terhindar dari kesalahan dalam pemasang ring karet pada *socket* pipanya,” jelas Yoyok.

Untuk melengkapi varian produk di bidang air bersih atau air minum, PT MGN juga menyediakan produk reservoir teknologi terbaru merek Flootank yang merupakan reservoir dengan bahan dari baja yang dilapisi HDPE. Dirancang dengan ketebalan tertentu, tangki ini dalam pemakaiannya tidak hanya menjadi penampung air, tetapi juga dapat dimodifikasi menjadi tangki kimia untuk penyimpanan maupun pemrosesan lanjutan cairan kimia.

Dari sisi keberlanjutan bisnis, selain terus mendistribusikan produk berkualitas untuk mendukung industri air minum perpipaan melalui proyek-proyek BUMD AM dan kementerian, PT MGN juga memberikan pelayanan jasa pemasangan pipa air bersih dan air limbah. MGN memberikan jaminan purna jual seperti pelatihan dan konsultasi terkait produk dan jasa yang mereka sediakan.



Project paket pekerjaan instalasi pengolahan air minum PT MGN.



Pemasangan produk pipa yang dipasarkan PT MGN.

“Pada saat kami menjual produk ke konsumen, kami mengedukasi konsumen soal pemasangannya serta memberikan pelatihan. Ketika barang akan dikirim, tim teknis kami juga melakukan kunjungan untuk menjelaskan cara pemasangan agar tidak salah. Kami juga melakukan *hydro test* untuk mengetes sambungan pipa agar pipa tidak lepas,” tandas Yoyok.

Dengan strategi perluasan pangsa pasar seperti itu, PT MGN berharap setiap tahunnya akan terus terjadi peningkatan permintaan penjualan serta kapasitas produksi dan distribusi produk yang mereka pasarkan. ■

**Beni Iskandar, S.H.**  
Direktur Utama  
Perumda Air Minum Kota Makassar

# Ahli Hukum yang Melakukan Perubahan Positif

Beni Iskandar sebelumnya bukan termasuk orang yang secara intensif bersentuhan dengan sektor air minum. Dia justru seorang advokat yang dikenal memiliki reputasi yang baik, sehingga dipercaya memimpin Perumda Air Minum Kota Makassar.

Penulis: Deni Arisandy



**S**ebelum memimpin Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar lebih dikenal sebagai seorang advokat yang banyak menangani kasus hukum perdata maupun hukum pidana, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Malah, sebelum menjadi advokat, ia juga sudah mendirikan firma hukum yang cukup dikenal. Sampai kemudian terbitlah UU Advokat pada tahun 2003 yang membuatnya mengambil kuliah di jurusan hukum Universitas Hasanuddin. Alasannya, ia belum menjadi sarjana hukum dan belum mengantongi sertifikasi advokat.

Jauh sebelumnya, keberanian Beni untuk mengambil keputusan secara mandiri sudah terasah dan terlihat sejak ia berusia dini. Sejak SMP, ia sudah berani memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta, meninggalkan keluarga tercintanya untuk mandiri bersekolah di SMP Jakarta. Setelah tamat SMP, ia sempat melanjutkan SMA di Jakarta. Tetapi, ada satu kejadian duka, yakni meninggalnya ayah tercinta yang

memaksa untuk pulang kembali ke Makassar dan menyelesaikan pendidikan SMA-nya di sana.

#### Meniti karier

Sebelum dipercaya memimpin Perumda AM Kota Makassar, pada 2012-2021 Beni merupakan Manajer Keuangan PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Umum Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar tahun 2018-2020. Beni juga aktif berorganisasi. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Pakabaji Community dan Wakil Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023).

Sejak 2021, ia dipercaya menjadi anggota Dewan Pembina Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sulawesi Selatan.

Di bidang hukum, Beni sejak tahun 2020 hingga sekarang menjadi Kuasa Hukum Wali Kota Makassar (Ramdhani Pomanto) dan Wakil Wali Kota Makassar (Fatmawati Rusdi). Sejak tahun 2012 hingga sekarang, ia juga menjadi pemilik Kantor Hukum Advokat Beni Iskandar,



Kebersamaan bersama pegawai.

#### Beni Iskandar, S.H.

**Tempat, tanggal lahir:** Makassar, 20 Juli 1967

**Pendidikan terakhir:** S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2007-2010

#### Karier

- Manajer Keuangan PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, 2012-2021
- Direktur Umum Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar, 2018-2020
- Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, 2019-2020
- Owner Kantor Hukum Advokat Beni Iskandar, S.H. & Partners, 2012-sekarang
- Pj. Direktur Utama Perumdam Kota Makassar, 2021
- Direktur Utama Perumdam Kota Makassar 2021-sekarang

#### Organisasi

- Ketua Umum Pakabaji Community, 2017-sekarang
- Wakil Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023
- Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bid Polhukam, 2019-2020
- Dewan Pembina Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

S.H., and Partners. Ia juga aktif di partai politik dan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Bidang Polhukam tahun 2019-2020, serta sebagai Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar tahun 2019-2020.

Dengan pengalamannya di perusahaan dan sejumlah organisasi termasuk organisasi politik, serta pengalamannya di bidang hukum, Beni memberanikan diri mengemban amanah memimpin Perumdam Kota Makassar.

“Saya ditunjuk sebagai Pj. Dirut Perumdam Makassar karena waktu itu dirut sebelumnya dicopot. Saya sempat enam bulan menjadi Pj. Mungkin saya dianggap melakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, pada Juli 2021 ketika dilakukan lelang jabatan, saya dipercaya menjadi Dirut Perumdam Kota Makassar sampai sekarang,” ungkap Beni.

#### Pembentahan dan perubahan positif

Beni mengakui, sebelum dipercaya sebagai dirut, pengalamannya sangat

## Disiplin dan Bertanggung Jawab pada Pilihan

**B**eni Iskandar berasal dari keluarga yang sehari-hari biasa menerapkan sikap disiplin. Sikap yang ditanamkan keluarganya ini tetap menjadi pegangannya hingga sekarang. Ayahnya adalah seorang polisi dan keluarga besarnya juga juga rata-rata menjadi polisi. Namun, ia tak ikut menjadi polisi. Ia memilih karier di bidang hukum.

Orang tua dan keluarganya sangat menghargai pilihannya tersebut. Hal ini karena sejak sekolah, sebenarnya Beni sangat mandiri dan orang tuanya saat itu sangat mendukung keputusannya untuk bersekolah di Jakarta asal ia bertanggung jawab pada pilihannya.

Pengidola Adnan Buyung Nasution ini mengaku bahwa ia dapat meneladani keberanian dan integritas idolanya tersebut. Ia juga mengaku berupaya mengoptimalkan anggaran internal Perumdam Kota Makassar

**“** Sebagai orang baru di sektor air minum, Beni tak segan turun ke lapangan dan berinteraksi ke semua stakeholder. **”**

minim di sektor air minum. Pada saat menjadi Pj, ia melakukan perbaikan dari level manajemen lebih dulu, yaitu melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada seluruh pegawai. Sehingga, di era kepemimpinannya, tidak ada lagi sikap sungkan dan seolah berjarak kepada para direksi. Ia malah turun ke bawah menanya staf, memberikan keteladanan, dan merangkul serta memotivasi seluruh pegawai agar dapat bekerja dengan lebih solid.

Saat menjabat sebagai Pj, Beni menetapkan standar penanganan terkait kebocoran yang dilaporkan masyarakat. Ia menetapkan standar bahwa penanganannya di bawah satu jam. Dengan begitu, masyarakat yakin bahwa BUMD AM selalu hadir di setiap ada pengaduan yang sebelumnya mungkin sering terjadi pembiaran terhadap pelaporan tersebut.

dan tidak tergantung penyertaan modal dari Pemko Makassar.

Pria kelahiran Makassar tahun 1967 ini sangat menyukai olah raga, meskipun ia tak mengejar prestasi dengan menjadi atlet. Tak heran kalau ia kemudian bersedia menjadi Dewan Pembina Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sulawesi Selatan. “Saya sejak kecil itu lebih menyukai olah raga. Saya dulu sangat menyukai tenis meja dan sepakbola, tapi sebatas hobi,” imbuhnya.

Di posisinya sebagai Dirut Perumdam Kota Makassar, ia berharap perusahaan dapat lebih baik lagi dibanding sebelumnya, meskipun diakuinya masih cukup banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. “Saya berharap sampai selesainya masa jabatan saya nanti, saya tetap bisa amanah dan berakhir dengan *husnul khotimah* (berakhir baik),” tandas Beni, sosok yang juga aktif bermedia sosial. **DA**

Sebagai orang baru di sektor air minum, Beni tak segan turun ke lapangan dan berinteraksi ke semua *stakeholder*. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan kedekatan serta menegaskan bahwa BUMD AM ini adalah pelayan masyarakat. Dengan sikap yang coba ia tunjukkan dan tularkan kepada segenap jajaran tersebut, ia berharap citra perusahaan makin baik di masyarakat.

“Saat saya dipercaya sebagai dirut, saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya memperbaiki perusahaan. Sebab, waktu itu, kan, ada hal-hal yang dianggap kurang baik bagi Perumdam Kota Makassar. Jadi, ini menyangkut citra di masyarakat, termasuk soal pelayanan ke masyarakat,” ungkap Beni.

Mengelola perusahaan dengan 1.400 pegawai tentu bukan hal mudah. Beni memberikan contoh keteladanan yang dimulai dari dirinya sendiri, dan memberlakukan mekanisme *reward* dan *punishment* ke seluruh pegawai tanpa membeda-bedaan. Intinya adalah saling menghargai dan mengatur komunikasi dengan baik, tetapi di sisi lain tetap tegas sesuai aturan alias menjunjung tinggi profesionalisme.

Di sisi lain, Beni mengungkapkan, dengan berbagai upaya dan kinerja yang telah dilakukan, sejak awal 2022 kinerja positif mulai terlihat. Pada tahun pertamanya memimpin, ia mampu membawa perusahaan pelat merah tersebut mencetak laba hingga Rp27 miliar. Padahal, saat itu target yang ditetapkan tidak sampai Rp20 miliar. Capaian positif lain, selain kinerja BUMD AM yang sehat, mereka juga mampu menyelesaikan akumulasi utang yang sudah bertumpuk selama 98 tahun. Sehingga, pada akhir tahun buku 2022, Perumdam Kota Makassar sudah dapat menyetor dividen kepada Pemko Makassar.

Meskipun sebelumnya memang sudah ada penyetoran dividen ke Pemko Makassar, menurutnya, selama 2 tahun sebelumnya, perusahaan masih memiliki akumulasi utang. Dengan demikian, sebelumnya seolah tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyetor dividen ke Pemko Makassar.

### Melewati tantangan

Perumdam Kota Makassar menghadapi beberapa tantangan pada awal-awal kepemimpinannya Beni, salah satunya akibat adanya efek el nino dan kemarau panjang. Namun, dengan sentuhan kepemimpinannya, perusahaan tetap mampu menghasilkan laba meskipun tidak sebesar tahun buku 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP (LHP BPKP) juga menunjukkan bahwa laporan keuangan Perumdam Kota Makassar dalam kondisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehat, tidak berpotensi bangkrut, dan mengalami untung.

Pada tahun 2025 ini, Beni menargetkan program prioritas untuk membangun SPAM baru yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan cakupan pelayanan yang masih di angka 66 persen, menurutnya, penambahan pelanggan dan cakupan pelayanan masih sangat potensial dikembangkan, terutama di wilayah timur Kota Makassar.

“Di timur Kota Makassar, dengan penambahan SPAM baru, ada potensi penambahan sekitar sekitar 40 ribu pelanggan. Kecukupan sumber air masih sangat memadai karena berdasarkan prastudi kelayakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang akan berinvestasi, sumber air baku untuk Kota Makassar masih cukup untuk menambah jumlah pelanggan dengan mengembangkan SPAM baru,” pungkasnya. **DA**



PERUMDA AIR MINUM KOTA MAKASSAR

Mengucapkan

*Selamat Ulang Tahun*

PERPAMSI  
TIRTA DHARMA  
PERLAKUAN PERDAMAIAN AIR MINUM  
BELLUM INDONESIA

MAJALAH AIR MINUM

TIRTA DHARMA

Th

Sekali Mengalir Terus Mengalir

1975-2025



**HOTLINE  
PENGADUAN**



Perumda Air Minum Kota Makassar



[www.pdamkotamakassar.co.id](http://www.pdamkotamakassar.co.id)

0811-4641-123



TELEPON : 1500411

Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja  
Kabupaten Majalengka



# KOMITMEN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KINERJA



IPA Jatitujuh kapasitas 150 lpd.

Perumdam Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka berupaya fokus meningkatkan pendapatan dan kinerja pelayanannya. Disiplin, kerja keras, dan integritas menjadi semangat mereka mendukung pencapaian target dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

Penulis: **Deni Arisandy**

**P**encapaian laba bersih yang terus meningkat signifikan seiring meningkatnya pendapatan membuktikan bahwa Perumdam Tirta Bhakti Raharja mampu menjaga pertumbuhan dan kinerjanya sesuai harapan. Pada tahun buku 2023, mereka mampu mencatatkan laba sebesar Rp6,080 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,833 miliar.

Aset dan ekuitas dalam tiga tahun terakhir juga meningkat signifikan. Aset perumdam tersebut mencapai Rp45,242 miliar pada tahun 2023 dari Rp43,828 miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp35,696 miliar pada tahun 2021. Demikian juga dengan kekayaan bersih atau ekuitas yang meningkat menjadi Rp54,531 miliar pada tahun 2023.

meningkat dari Rp52,694 miliar tahun 2022 dan Rp41,517 pada tahun 2021.

Kemampuan BUMD AM tersebut memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba yang tercermin melalui rasio *return on equity* mencapai 13,44 persen dan posisi solvabilitas yang sangat meyakinkan, yakni mencapai 587,07 persen pada tahun 2023. Efektivitas penagihan pada tahun 2023 angkanya berada di level 97,62 persen.

## Menjaga kinerja positif

BUMD AM dengan total pelanggan 31.784 SR ini terus berupaya menjaga kinerja positifnya. Tak heran kalau selama tiga tahun belakangan, sejak tahun 2021 kinerja BUMD AM milik Pemkab Majalengka ini juga terjaga

dalam kategori Sehat berdasarkan hasil penilaian kinerja Kementerian PUPR yang pada tahun buku 2023 berada di angka 3,40.

Seiring peningkatan kinerja tersebut, kesejahteraan pegawai juga makin membaik. Saat ini, pegawai Tirta Bhakti Raharja dapat menikmati 16 kali gaji setiap tahun yang terus disesuaikan ke arah yang makin baik.

"Jadi, pegawai juga selalu saya motivasi untuk meningkatkan efisiensi penagihan agar berpengaruh pada kesejahteraan bersama. Saya selalu berupaya untuk menyejahterakan pegawai. Yang sudah pensiun juga kami perhatikan. Saya selalu terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan. *Alhamdulillah*, selama saya menjadi direktur, kinerja operasional dan keuangan kita selalu meningkat," ungkap Elina Lukitasari, Direktur Perumdam Tirta Bhakti Raharja.

Disiplin dalam hal keuangan, seperti menggunakan uang perusahaan yang sesuai peruntukan dan sesuai aturan, diterapkan dengan ketat. Integritas menjadi hal utama yang ditekankan

kepada seluruh pegawai. Tak heran kalau Tirta Bhakti Raharja menjadi contoh BUMD di Kabupaten Majalengka yang tidak pernah melaporkan adanya keluhan kehilangan dan tidak pernah mendapat surat kaleng.

Dikatakan Elina, ia selalu menekankan jajarannya untuk selalu siap menindaklanjuti berbagai keluhan dari pelanggan (termasuk kebocoran) yang disampaikan melalui *call center*. Ia menekankan, jangan sampai ada air yang terbuang banyak akibat



Apel bersama manajemen dan pegawai. Memompa semangat dan motivasi menuju pelayanan terbaik untuk masyarakat.

**“** Elina mengajak seluruh jajaran perumdam tersebut agar tidak pernah berpuas diri dengan hasil yang sudah dicapai. **”**

keluhan kebocoran yang tidak segera ditindaklanjuti, meskipun kejadiannya di malam hari.

#### Kinerja pelayanan dan keuangan

Peningkatan kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi Perumdam Tirta Bhakti Raharja. Untuk itu, Elina mengajak seluruh jajaran perumdam tersebut agar tidak pernah berpuas diri dengan hasil yang sudah dicapai. Selain melakukan efisiensi secara internal, Tirta Bhakti Raharja juga berupaya meningkatkan efisiensi penagihan.

“Kami memperbaiki aset/alat perusahaan yang potensial untuk menghasilkan uang. Misalnya, pompa-pompa yang rusak, daripada beli, kan, lebih baik kita perbaiki,” tandas Elina.

Ditambahkan Kabag Umum dan Keuangan Perumdam Tirta Bhakti Raharja AA Herdi Ahmad S, saat ini

pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan kinerja. Sejumlah program, yang antara lain merupakan kelanjutan dari program pada tahun sebelumnya, terus dijalankan, misalnya reklasifikasi pelanggan. Ada pula kerja sama dengan bagian teknis untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan.

“Kabupaten Majalengka terus berkembang dari tahun ke tahun, apalagi sejak adanya tol, adanya bandara, dan adanya pusat industri. Banyak rumah

#### PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHAKTI RAHARJA

**Jumlah pelanggan:** 31.784 SR

**Penduduk:** 1.340.617 jiwa

**Pegawai:** 147 orang

**Cakupan pelayanan:** 11,59 %

**Efisiensi penagihan:** 97,62 %

**Tarif rata-rata:** Rp.6.185,51

**HPP rata-rata:** Rp.5.068,11

**Sumber:** Mata air, sumur dalam dan air permukaan

**Kapasitas terpasang:** 573,50 lpd

**Total kapasitas produksi:** 342,43 lpd

**Kapasitas terpakai:** 321,10 lpd

**NRW:** 30,55 %

**Rata-rata pengaliran:** 23,45 jam

**Penilaian kinerja tahun 2023:** Sehat

**Nilai:** 3,4

**Setoran PAD:** Rp3,2 miliar

Sumber: Perumdam Tirta Bhakti Raharja, 2023

membuat terjadinya kenaikan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan sejak 2021, 2022, dan 2023.

Selain reklasifikasi, penyesuaian tarif pada tahun 2022 (yang selama 10 tahun belum pernah ada penyesuaian) ikut mendongkrak pendapatan perusahaan. Upaya lainnya ialah penambahan blok konsumsi, dari sebelumnya 2 blok konsumsi menjadi 3 blok konsumsi.

#### Inovasi digital

Langkah penting lain Tirta Bhakti Raharja adalah dengan menginisiasi upaya transformasi ke digitalisasi. Saat ini, perumda tersebut sudah mengembangkan *payment point online bank* (PPOB), bekerja sama dengan pihak ketiga. Sudah ada enam pihak yang bekerja sama, yaitu PT Pos Indonesia, Bank Jabar, MKM, Arindo, BSI, dan MCM.

yang sekarang berubah menjadi ruko dan toko. Itu yang kami sasar untuk reklasifikasi pelanggan, pelanggan rumah tangga yang kemudian berubah fungsi,” ungkap Herdi.

Herdi memerkirakan, perubahan klasifikasi pelanggan ini melibatkan sekitar 2.000 lebih pelanggan. Jadi, dengan adanya reklasifikasi pelanggan dari rumah tangga ke niaga, harapannya akan terjadi peningkatan pendapatan sekitar 40 persen. Hal ini pula yang



Rollan Rosissendra  
Kabag Teknik



Elina Lukitasari  
Direktur



Herdi Ahmad S.  
Kabag Umum dan Keuangan

**“** Dampak positif dari

digitalisasi sistem pembayaran PPOB yang dilakukan sejak 2015 adalah kenaikan angka efisiensi penagihan. **”**

Keenam vendor ini kemudian bekerja sama dengan pihak lain. Sehingga, melalui model PPOB tersebut, Tirta Bhakti Raharja telah bekerja sama dengan 12 *marketplace*, 16 *mobile banking* dan *virtual account*, serta 21 *e-wallet*.

Upaya transformasi lain yang telah dilakukan adalah membuat *call center* untuk menampung seluruh aduan pelanggan dan masyarakat. Juga sudah dilakukan sistem pembacaan meter



Kegiatan *capacity building* pegawai.

## Program NRW dan Ketersediaan Sumber Air

Tahun ini, Perumdam Tirta Bhakti Raharja sudah menginjak usia 37 tahun. Dari berbagai fokus perbaikan yang terus digencarkan, salah satunya adalah penurunan air tak berekening atau *non-revenue water* (NRW), yang masih berada di kisaran 30 persen. Tahun 2025 ini, tingkat NRW di perumdam tersebut diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 28 persen.

Menurut Kabag Teknik Rollan Rosissendra, ada beberapa hal yang disiapkan oleh pihaknya untuk dapat mencapai target penurunan NRW. Mulai dari memasang meter induk di setiap mata air, melakukan modifikasi, hingga pergantian pipa, *valve*, dan aksesoris lainnya.

Menurutnya, tantangan penurunan NRW ini antara lain terkait umur teknis pipa. Ada pipa jenis ACP yang panjangnya sekitar 2,5 km yang direncanakan diganti. Cuma, posisinya yang terpendam di dalam kota menyulitkan untuk dilakukan perbaikan dan pergantian.

“Tahun 2025 ini kami sedang melaksanakan program SPAM hibah yang bersumber dari Mata Air Cilongkrang. Dengan prioritas tersebut, direncanakan, pergantian pipa ACP di tengah Kota Majalengka tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 atau 2027 sambil melakukan pembentahan jaringan,” ungkap Rollan.

Ditambahkannya, pada tahun 2025 ini pihaknya juga memfokuskan kerja pada sisi produksi, baik kualitas maupun kuantitas. Meskipun ada kendala *idle capacity*, pada sejumlah

wilayah pelayanan, terutama di wilayah pelayanan Majalengka Kota, pasokan air untuk 9 ribu SR itu hanya sebesar 72 liter per detik (lpd). Padahal, menurutnya, idealnya untuk jumlah pelanggan sebanyak itu, pasokannya minimal sebanyak 90 lpd atau ada defisit sekitar 18 lpd. Untungnya, pada tahun 2025, mereka telah mendapat izin penambahan pengambilan air dari mata air Cilongkrang sebesar 71 lpd, sehingga totalnya mencapai 143 lpd.

Selain itu, perumdam tersebut juga berharap agar SPAM Regional Jati Gede juga dapat segera beroperasi yang dialokasikan untuk sembilan kecamatan, termasuk untuk Bandara Kertajati, Jati Tujuh, Ligun, Kadipaten, Dawuan, Pasokandel, Jatiwangi, Palasah, dan Sumber Jaya. Dari SPAM Jati Gede, nantinya Tirta Bhakti Raharja kebagian alokasi air sebesar 200 lpd.

Dengan adanya SPAM Jati Gede yang operasionalnya ditargetkan tahun 2029, maka khusus untuk Bandara Kertajati yang saat ini dipasok dari IPA Kertajati yang bersumber dari Sungai Cimanuk, ke depan akan mendapat alokasi sebesar 50 lpd. Pelayanan air bersih untuk Bandara Kertajati sekarang ini masih menyatu dengan pelayanan eksisting untuk masyarakat.

Rollan memastikan, untuk sekarang ketersediaan air untuk wilayah pelayanan Kertajati masih cukup. Namun, mereka harus mengantisipasi kecukupan pasokan jika perkembangan jumlah penduduk dan penerbangan akan semakin meningkat. **■ DA**



Pelayanan pembayaran rekening air pelanggan.

secara *online*. Selanjutnya, mereka juga sedang menyiapkan aplikasi Gudang Terpadu Perumdam, sehingga ke depan penyediaan barang (inventori) dapat terjaga dengan baik sesuai kebutuhan.

Herdi mengatakan, dampak positif dari digitalisasi sistem pembayaran dengan PPOB yang dilakukan sejak Februari 2015 adalah kenaikan angka efisiensi penagihan. Dari yang sebelumnya rata-rata di bawah 80 persen, naik menjadi rata-rata 86 persen dan tertinggi mencapai 88,9 persen. Malah, untuk efektivitas penagihan pada tahun 2023, angkanya mencapai 97,6 persen.

“Sekitar 40 hingga 48 persen pembayaran rekening air saat ini berasal dari penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga,” ungkap Herdi.

### Reward and punishment

Dengan makin meningkatnya pendapatan dan laba, Tirta Bhakti Raharja juga terus berupaya meningkatkan disiplin dan memberlakukan secara ketat mekanisme *reward and punishment*. Per Desember tahun 2024, tengah dilakukan finalisasi regulasi internal terbaru. Memang, setiap 2 tahun sekali,



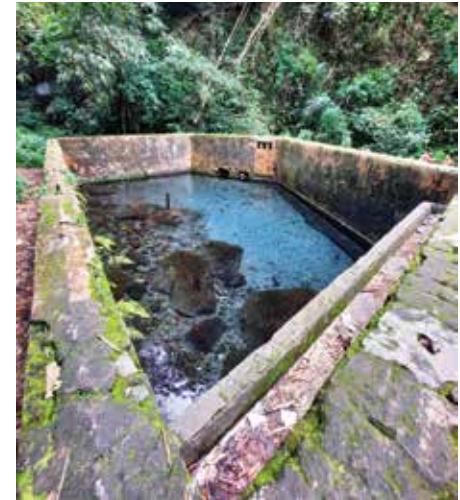
IPA Kadipaten Dawuan kapasitas 50 lpd.

regulasi internal selalu *di-update*, terutama untuk meningkatkan disiplin pegawai dan sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko.

Disiplin waktu kedatangan dan pulang bekerja menjadi indikator utama penilaian kinerja individu pegawai. Jika melanggar, akan dilakukan pemotongan, seperti pemotongan penilaian kinerja yang sekaligus akan berdampak pada *take-home payment* pegawai bersangkutan. Dalam regulasi internal tersebut bahkan disebut mengenai tingkat kehadiran tidak boleh

kurang dari 80 persen. Jika kurang dari persentase tersebut, dipastikan pegawai tidak akan mendapatkan persetujuan untuk penyesuaian pangkat dan golongan.

Dengan makin membaiknya tingkat kesejahteraan pegawai yang setiap tahunnya selalu dilakukan penyesuaian, Tirta Bhakti Raharja kian fokus untuk meningkatkan kinerja pelayanannya dengan berupaya menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan akses air bersih ke masyarakat. Hal ini



Salah satu sumber mata air.

berperan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan pendapatan BUMD AM tersebut.

Di sisi lain, mereka juga terus berupaya meningkatkan kompetensi para pegawai melalui sejumlah program pendidikan dan pelatihan. Dikatakan Herdi, sejak tiga tahun terakhir, setiap tahunnya mereka mengikutsertakan pegawai ke diklat-diklat, terutama untuk tingkat muda dan madya. Di luar itu, pegawai sesuai bidang tugasnya juga diikutsertakan dalam diklat bidang, serta dilakukan *inhouse training*.

**PERPAMSI**  
PERSEKUTUAN PERUSAHAAN AIR MINUM  
SELURUH INDONESIA

**Hari PERS NASIONAL**  
**9 FEBRUARI 2025**

**"SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2025!  
SEMOGA SEMANGAT UNTUK MENYEBARKAN KEBENARAN  
TERUS BERKOBAR DI HATI SETIAP JURNALIS."**

**Ir. Arief Wisnu Cahyono, ST.  
Ketua Umum**

[www.perpamsi.or.id](http://www.perpamsi.or.id) @perpamsi Perpamsi - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

# KUASA KOLABORASI

Berpikir "menang-menang" adalah kunci untuk membangun sinergi dalam sebuah *team work*. Ketika Anda berkolaborasi, maka Anda menang, teman Anda pun menang.

**A**lkisah, pada suatu hari beberapa orang anak bermain-main di jalur rel kereta api. Salah seorang anak mencoba berjalan di atas rel itu, tetapi baru beberapa langkah dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Yang lain juga mencoba, dan jatuh juga. Anak-anak lain tertawa riang melihat temannya jatuh.

"Aku berani taruhan kelereng, kamu pun tidak akan bisa," kata anak yang terjatuh kepada temannya yang menertawakan.

Satu persen satu mereka mencoba berjalan di atas rel. Tidak lebih dari selusin langkah, mereka pun jatuh. Bahkan anak yang paling atletis di antara mereka pun mengalami hal yang sama: sama-sama kehilangan keseimbangan.

Kemudian ada dua anak saling berbisik-bisik, dan salah seorang dari mereka menantang anak-anak lain. "Aku bisa berjalan di atas rel itu

sampai ujung jembatan itu," sambil memonyongkan bibirnya ke arah ujung jembatan. "Dia juga bisa," tukasnya sambil menunjuk teman berbisiknya tadi.

"Tidak mungkin!!!" teriak anak-anak lain yang sudah mencoba.

"Ayo taruhan kelereng, ya," kata anak itu dan yang lain menerima tantangan tersebut.

Kemudian, kedua anak itu naik ke atas rel dengan saling berpegangan. Mereka berjalan di atas rel hingga sampai ke ujung jembatan. Kawan, sebagai individu mereka sama-sama tidak dapat berjalan di atas rel dengan seimbang, tetapi dengan bekerja sama bergandengan tangan, mereka

**Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, diperlukan kemauan kuat untuk bersinergi.**



DOK. PRIBADI

**Catatan Audelta Elviezon**  
Trainer Manajemen Sumber Daya Manusia

mendapatkan hadiah kelereng dengan mudah. Itulah yang disebut dengan "Kuasa Kolaborasi".

Di perusahaan kita berapa banyak individu yang tidak mau bekerja sama, yang sering terjadi antardepartemen atau bagian saling bersaing, tidak berbagi informasi, tidak mau bergandengan tangan mengejar target-target perusahaan?

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, diperlukan kemauan kuat untuk bersinergi. Tidak hanya dalam kata, tetapi sinergi itu diciptakan dengan mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan, membangun budaya kerja sama yang solid.

Berpikir menang-menang adalah kunci untuk membangun sinergi dalam sebuah *team work*. Nabi Sulaiman mengatakan, "Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya." Ketika Anda berkolaborasi, maka Anda menang, teman Anda pun menang. Hidup itu saling melengkapi, tak sempurna kehidupan wanita bila tidak didampingi lelaki. Begitu pula sebaliknya.

Carilah cara untuk berbagi informasi serta bekerja bersama-sama. Bekerja samalah dengan seseorang yang memiliki kelebihan, sementara Anda lemah di bidang itu. Kembangkanlah kemampuan untuk saling melengkapi. Biasakanlah untuk bertanya apa yang terbaik untuk tim Anda.

Ketimbang menonjolkan diri, akan lebih produktif bila Anda mengontribusikan dan memperkaya ide-ide. Yakinlah, ketika Anda berkolaborasi dengan rekan kerja, atau dengan siapa pun, Anda menang. Mereka pun menang dan tim pun menang. Selamat berkolaborasi! ■



ISTIMEWA



# Tahun 2024

## DAPENMA PAMSI Membukukan

### Laba Usaha Rp. 614,900 Miliar (unaudit)

#### Portofolio Investasi

DAPENMA PAMSI berhasil membukukan nilai perolehan investasi pada posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.019.419.398.212,- lebih tinggi Rp. 234.193.652.378,- atau 2,67% dari targetnya Rp. 8.785.225.745.834,-.

Realisasi investasi tersebut bertambah sebesar Rp. 593.970.944.208,- atau 7,05% dari realisasi pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 8.425.448.454.004,-.

#### Hasil Investasi

Realisasi hasil investasi yang berhasil dibukukan pada tahun 2024 sebesar Rp. 673.408.229.124,- lebih tinggi sebesar Rp. 24.698.443.588,- atau 3,81% dari targetnya sebesar Rp. 648.709.785.536,-.

#### Beban Investasi & Operasional

Realisasi beban investasi dan beban operasional tahun 2024 sebesar Rp. 58.837.738.407,- dengan Rasio Beban Operasional (BOPO) sebesar 7,93%. Realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp. 1.571.539.187,- atau -2,60% dari pagu anggarannya Rp. 60.409.277.594,-.

#### Hasil Usaha

Hasil usaha setelah Pajak Penghasilan yang dibukukan pada tahun 2024 sebesar Rp. 614.900.348.469,- dapat melampaui Rp. 26.507.761.037,- atau 4,51% dari targetnya sebesar Rp. 588.392.587.432,-.

#### Tunggakan Iuran Pensiun

Kewajiban iuran pensiun jatuh tempo tahun 2024 sebesar Rp. 654.378.280.082,- dan penerimaan iuran pensiun sebesar Rp. 650.753.470.931,- sehingga terdapat tunggakan iuran pensiun sebesar Rp. 3.624.809.151,-. Tunggakan iuran tersebut lebih rendah Rp. 5.991.198.661,- atau -62,30% dari targetnya sebesar Rp. 9.616.007.812,-.

Jumlah Pendiri/Mitra Pendiri yang memiliki tunggakan iuran 38 PDAM (12,30%), kelebihan pembayaran iuran 149 PDAM (48,22%), dan membayar iuran sesuai kewajibanya 122 PDAM (39,48%). Pada akhir tahun 2024

Jenis Investasi	Realisasi Investasi Per 31 Desember 2024	
Deposito On Call	10.400.000.000	0,12%
Deposito Berjangka	598.000.000.000	6,63%
Surat Berharga Negara	2.455.883.762.051	27,23%
Saham	588.823.528.820	6,53%
Obligasi	5.314.000.000.000	58,92%
Penyertaan Langsung	32.769.606.295	0,36%
Tanah	4.135.500.000	0,05%
Tanah & Bangunan	15.407.001.046	0,17%
<b>Total</b>	<b>9.019.419.398.212</b>	<b>100.00%</b>

terdapat titipan iuran (kelebihan pembayaran iuran) sebesar Rp. 23.303.680.254,-.

#### Aset Neto

Aset Neto kelolaan DAPENMA PAMSI per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.818.384.165.685,- lebih tinggi Rp. 137.055.975.970,- atau 1,58% dari targetnya sebesar Rp. 8.681.328.189.715,-.

Aset Neto per 31 Desember 2024 tersebut bertambah sebesar

Rp. 498.716.986.452,- atau 5,99% dibanding posisi akhir tahun 2023 sebesar Rp. 8.319.667.179.233,-.

#### Pembayaran Manfaat Pensiun

DAPENMA PAMSI telah membayarkan manfaat pensiun selama tahun 2024 Rp. 680.682.653.143,- kepada 17.992 orang pensiunan terdiri dari 956 orang pensiunan direksi dan 17.036 orang pensiunan pegawai. 

#### 4 INDIKATOR MENGUKUR KINERJA TAHUN 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
<b>Pengembangan:</b>			
Pendapatan	649.178.499.326	673.918.949.154	3,81% diatas target
Biaya-Biaya	60.715.277.594	58.957.165.245	-2,90 % dibawah pagu anggarannya
Laba Usaha	588.392.587.432	614.900.348.469	4,51% diatas target
<b>Iuran Pensiun:</b>			
Kewajiban	468.444.490.154	654.378.280.082	39,69% diatas target (adanya perubahan PhDP & Kenaikan MP)
Penerimaan	458.828.482.342	650.753.470.931	41,83% diatas target karena naiknya kewajiban iuran
Tunggakan	9.616.007.812	3.624.809.151	-62,30% dibawah target
<b>Pembayaran Pensiun</b>	<b>673.531.256.017</b>	<b>680.682.653.143</b>	<b>1,06% diatas target</b>
<b>Aset:</b>			
Aset Neto	8.681.328.189.715	8.818.384.165.685	1,58% diatas target
Aset Investasi (Nilai Perolehan)	8.785.225.745.834	9.019.419.398.212	2,67% diatas target

# Memahami dan Mengatasi PEGAWAI TOXIC

Setiap pegawai, termasuk di BUMD air minum, tentu menginginkan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan suportif. Keinginan ini wajar karena dapat mendongkrak produktivitas. Namun, keinginan ini bisa pupus karena adanya pegawai yang *toxic*. Pegawai *toxic* bisa menjadi masalah serius yang mengganggu suasana dan stabilitas operasional kerja. Bagaimana mengatasinya?

Penulis: **Anwari Natari**

**S**ecara harafiah, *toxic* berarti beracun. Pegawai *toxic* berarti pegawai yang memberi efek atau dampak buruk bagi pegawai lain dan biasanya jadi mengganggu kinerja. Pegawai *toxic* ibarat kerikil dalam roda mesin organisasi yang seharusnya berputar mulus.

Repotnya, pegawai *toxic* tidak sadar bahwa dirinya sangat mengganggu. Karena, *toxic people* bukan berarti selalu orang yang menyebalkan, bisa juga pegawai yang sehari-hari terasa asik sebagai teman kerja. Masalahnya, pegawai yang asik belum tentu efektif dalam hasil kerja. Sebaliknya, orang yang efektif dalam bekerja juga bisa menjadi *toxic* bagi pekerja lain. Contohnya, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tetapi suka menghina cara atau hasil kerja rekannya. Hal itu tentu dapat merusak motivasi kerja pegawai lain.

Dampak negatifnya bisa dirasakan di berbagai tingkat, yakni individu, tim, hingga perusahaan. Jadi, tidak hanya bisa merusak hubungan antarpegawai, perilaku *toxic* juga dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, sebagai manajer di BUMD AM, memahami, mengenali, dan menangani pegawai *toxic* bukan hanya tugas penting, tetapi juga investasi bagi keberlanjutan organisasi. Manajer

harus memahami dampak *toxic people*, langkah-langkah mengatasinya, dan menawarkan sudut pandang psikologi yang relevan.

## Dampak pegawai toxic

Pegawai *toxic* sering menyebarkan energi negatif, seperti mengeluh tanpa memberikan solusi, menciptakan konflik, atau menyebarkan gosip. Hal ini dapat membuat rekan kerja lainnya merasa tidak nyaman, bahkan enggan berkolaborasi. Ahli manajemen Robert Sutton, dalam bukunya *The No Asshole Rule*, menegaskan, "*Toxic individuals bring disproportionate damage to workplace culture, often overshadowing the contributions of even the most talented employees.*"

Selain itu, fokus pada pekerjaan menjadi terganggu ketika energi tim terkuras untuk menangani konflik internal yang dipicu oleh pegawai *toxic*. Akibatnya, produktivitas secara keseluruhan menurun. Target operasional seperti penyelesaian perbaikan jaringan atau peningkatan pelayanan pelanggan

menjadi terhambat. Sebagai ilustrasi, seorang staf administrasi yang terus-menerus mengeluhkan prosedur baru tanpa memberikan masukan konstruktif dapat menyebabkan transisi sistem kerja berjalan lambat, sehingga berdampak pada efektivitas operasional.

Dampak negatif pegawai *toxic* tentu juga bisa terasa pada pelayanan kepada masyarakat. Di sektor seperti BUMD AM, tempatnya koordinasi tim menjadi kunci keberhasilan, konflik internal atau mental kerja yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan. Akibatnya, masyarakat sebagai pelanggan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Terakhir, reputasi BUMD AM juga terancam oleh keberadaan pegawai *toxic*. Konflik yang mencuat keluar dari organisasi dapat menciptakan citra negatif, terutama di era keterbukaan informasi saat ini. Ketika seorang pegawai *toxic* sampai curhat ke pelanggan soal masalah internal, organisasi bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Padahal, menjaga reputasi entitas kita sebagai penyedia



“ Pendekatan yang berbasis empati tetapi tetap tegas adalah kunci untuk menangani individu *toxic* dengan cara yang konstruktif. ”

layanan publik adalah tugas setiap pegawai.

#### Mengapa pegawai bisa menjadi *toxic*?

Perilaku ini sering kali merupakan hasil dari berbagai faktor, baik yang berasal dari individu itu sendiri maupun dari lingkungan kerja. Perspektif psikologi dapat membantu seorang manajer memahami dan menentukan pendekatan yang tepat untuk menanganinya.

Menurut Dr. Susan Krauss Whitbourne, seorang profesor psikologi di University of Massachusetts, salah satu penyebab utama perilaku *toxic* adalah masalah pribadi yang sedang dihadapi oleh pegawai tersebut. Tekanan dari luar pekerjaan, seperti masalah keluarga, keuangan, atau kesehatan, dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang di tempat kerja. Individu yang merasa kewalahan oleh masalah pribadi ini sering tidak sadar membawa energi negatif ke lingkungan kerja mereka.

Selain itu, lingkungan kerja yang tidak mendukung juga dapat menjadi pemicu perilaku *toxic*. Organisasi yang memiliki budaya kerja tidak sehat, seperti kurangnya transparansi, komunikasi yang buruk, atau manajemen yang tidak adil, dapat menciptakan suasana yang mendorong individu untuk bersikap negatif. Ketidakjelasan dalam aturan atau ketimpangan dalam perlakuan terhadap karyawan sering kali menyebabkan frustrasi dan kebencian yang terpendam, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk perilaku *toxic*. Artinya, tengok juga sistem dan gaya manajemen kita yang mungkin membuat pegawai menjadi *toxic*.

Ada pula individu yang menunjukkan perilaku *toxic* sebagai mekanisme untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. Kebutuhan akan validasi ini bisa muncul akibat rasa tidak dihargai atau kurangnya pengakuan pada kontribusi mereka di tempat kerja. Sayangnya, alih-alih membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja dan manajer, mereka memilih cara yang salah, seperti menciptakan konflik atau menjatuhkan orang lain. Tujuan? Ya, untuk menarik perhatian.

## Mengatasi Pegawai *Toxic*

#### Identifikasi dengan cermat

Langkah pertama adalah mengenali perilaku *toxic* secara objektif. Diskusikan dengan tim, lakukan penilaian menyeluruh, atau gunakan metode pengumpulan *feedback* anonim untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Tentu penting untuk menghindari asumsi atau penilaian yang hanya didasarkan pada rumor.

#### Intervensi melalui komunikasi

Adakan pertemuan individual untuk memahami perspektif pegawai. Tanyakan juga apa yang mereka rasakan tentang pekerjaannya, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka melihat peran mereka di tim. Dalam pertemuan ini, berikan pula umpan balik yang jelas tentang perilaku yang harus diubah.

#### Terapkan aturan yang tegas

Robert Sutton menyebutkan pentingnya membangun “zero tolerance policy” terhadap perilaku *toxic*. Hal ini dapat diwujudkan

melalui penerapan kode etik yang ketat, pengawasan konsisten, dan penegakan disiplin yang adil. Jika perilaku *toxic* tidak berubah meskipun sudah diberikan kesempatan, kita perlu mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas.

#### Bangun budaya positif

Mengubah perilaku individu sering kali membutuhkan perubahan di tingkat organisasi. Contohnya:

- **Pengakuan dan penghargaan:** Pegawai yang berperilaku positif harus mendapatkan apresiasi secara terbuka. Ini menciptakan insentif untuk bersikap baik.
- **Pelatihan komunikasi dan manajemen konflik:** Memberikan keterampilan yang relevan dapat membantu mengurangi konflik di tempat kerja.
- **Peningkatan kepemimpinan:** Pemimpin yang kompeten adalah kunci utama dalam mengelola tim yang harmonis. ■



yang berbasis empati tetapi tetap tegas adalah kunci untuk menangani individu *toxic* dengan cara yang konstruktif.

Psikolog organisasi Adam Grant, dalam bukunya *Give and Take*, menekankan pentingnya “memberdayakan orang yang baik” untuk melawan efek dari *toxic* individuals. Grant menjelaskan bahwa “energi positif yang dihasilkan oleh individu yang kolaboratif dapat secara efektif menetralkan pengaruh buruk dari mereka yang *toxic*.”

Mengatasi pegawai *toxic* tentu bukanlah tugas yang mudah. Namun, hasilnya sepadan karena lingkungan kerja yang sehat tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman bagi pegawai, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seorang manajer memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan positif. Berpegang pada prinsip empati, ketegasan, dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang inklusif, manajer dapat membangun lingkungan kerja yang baik bagi semua pihak. Tengok juga, jangan tanpa sengaja kita sendiri berperilaku *toxic*. ■

Kita lihat, memahami akar penyebab perilaku *toxic* ini sangat penting. Dengan pemahaman yang tepat, manajer dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai, baik itu memberikan dukungan emosional kepada pegawai yang sedang menghadapi masalah, menawarkan bimbingan untuk memperbaiki perilaku, atau mengambil langkah tegas jika perilaku *toxic* terus berlanjut. Pendekatan

## AIR MINUM SYDNEY

# Dulu, Kini, dan 50 Tahun ke Depan

Pada pertengahan 2024 yang lalu, sempat heboh menyangkut air minum di kawasan Sydney, ibu kota Australia. Pasalnya, ada temuan zat yang disebut-sebut sebagai zat kimia abadi bernama *perfluoroalkyl* and *polyperfluoroalkyl*. Namun, kandungannya tidak seberapa banyak, walau menurut ukuran di Amerika Serikat dianggap cukup membahayakan.

Penulis: **Victor Sihite**

Berbagai sumber



Salah satu instalasi pengolahan air minum Sydney Water.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, lembaga bernama Public Health Advisor di Australia memastikan, air dari keran-keran air minum di Sydney aman untuk diminum. Temuan pada sekitar Juni 2024 itu terdeteksi pada filter-filter pengolahan air, termasuk pada bendungan air, tapi kadarnya tidak seberapa tinggi.

Sebagaimana di pelbagai pelosok dunia, perusahaan air minum ibu kota Australia itu juga menghadapi berbagai masalah yang jadi tantangan untuk ditanggulangi. Dalam hal ini, para

pengelola telah mengambil ancaman dengan jangkauan hingga ke tahun 2050. Mereka menamai programnya *"Our Water, Our Voice"*. Seperti umumnya urusan atau aktivitas menyangkut hajat hidup orang banyak, mereka pun berorientasi kepada pelanggan, yang tersirat dalam motto tersebut; air kita suara kita.

## Kado 100 tahun

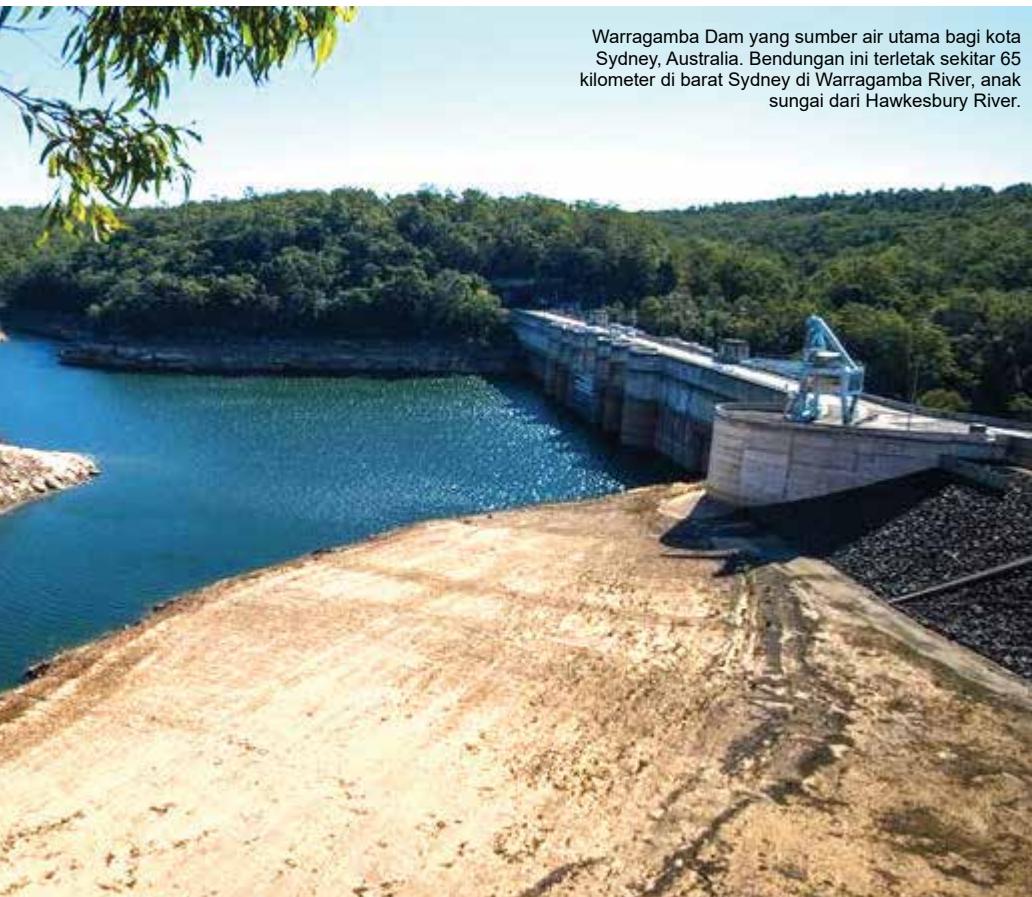
Perusahaan air minum Sydney lahir tahun 1888, jadi sudah berusia 136 tahun. Usia yang cukup panjang



untuk sebuah entitas pelayanan dan penyediaan air minum. Uniknya, tepat pada usia 100 tahun, muncul suatu gangguan serius berupa kontaminasi air baku oleh *cryptosporidium* skala besar. Kontaminasi itu berasal dari bendungan Warragamba, salah satu sumber air baku untuk Sydney.

Mereka memandang masalah itu sangat serius, sehingga mereka merasa perlu membentuk Sydney Catchment Authority untuk mengelola air baku sebaik-baiknya. Lantas, tahun 2015 dibentuk pula Sydney Catchment Authority untuk mengelola bendungan-bendungan, reservoir air baku, dan kawasan tangkapan air alias *catchment area*.

Pada tahun 2015, Sydney Catchment Authority bergabung dengan State Water Corporation, dan terbentuk pula Water NSW, yang menjadi pemasok air baku bagi Sydney Water. Lalu, sejak Juni 2022, Sydney Water mulai melakukan desentralisasi sistem daur ulang air bekas pakai demi efisiensi pemanfaatan air.



Warragamba Dam yang sumber air utama bagi kota Sydney, Australia. Bendungan ini terletak sekitar 65 kilometer di barat Sydney di Warragamba River, anak sungai dari Hawkesbury River.

ISTIMEWA

sebesar 34 miliar dolar. Investasi itu disebut sebagai investasi berimbang dalam upaya pencapaian lingkungan yang baik demi meningkatkan kesehatan masyarakat.

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, antara lain, sumber air baku baru di kawasan bernama Nepean hulu; daur ulang dan pemurnian air Liverpool, Glandfield, dan Quakers Hill; pusat daur ulang Liverpool, Glandfield, Quaker Hill, dan South Creek; lompatan proyek sumber air baru di kawasan bernama Camellia; fasilitas *upgrade* air; dan berbagai fasilitas sumber air di beberapa kawasan lainnya.

Keberhasilan proyek-proyek tersebut tentu didasarkan pada berbagai kriteria yang disusun, antara lain penyediaan dana, keandalan para pelaksana di lapangan, pengguna air, sekaligus kemampuan bayarnya.

### Lompatan jauh

Perkembangan rencana jangka panjang tersebut adalah suatu batu lonceng bagi Sydney Water, bahkan lompatan jauh ke depan bagi kawasan Sydney. Lompatan itu didasarkan pada pertambahan penduduk di masa-masa mendatang, perubahan iklim daerah tangkapan air, perkembangan sistem pengadaan air minum yang sedang memburuk, teknologi, dan infrastruktur yang semakin tua dan usang.

Faktor lain yang tak kalah penting untuk ditanggulangi, antara lain, daerah tangkapan air yang terdeteksi mengandung bahan-bahan kimia yang berpotensi menimbulkan penyakit kanker bagi konsumen. Tantangan lainnya ialah ancaman kerusakan kawasan tangkapan air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti terungkap melalui audit yang berlangsung selama 2019-2022. Audit tersebut mengungkapkan, terdapat 7 dari 18 indikator atas kesehatan sistem pengadaan air minum yang sedang memburuk di sana.

Perubahan iklim atas daerah tangkapan air tersebut mengancam kecukupan dan kualitas air pada kawasan penangkap air tersebut, yang luasnya kurang lebih 160.000 kilometer persegi. Cara-cara yang dilaksanakan untuk memelihara daerah tangkapan air tersebut selama ini dinilai tidak cukup untuk mempertahankan kualitas kawasan tersebut. Jadi, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyehatkannya kembali. ■

Sejak 2019, Sydney Water mengganti pembatasan pemakaian air dengan Water Wise Rules. Tujuannya tentu supaya semua pihak lebih bijaksana bersikap menyangkut masalah-masalah air. Di dalam ketentuan itu terjadi saling isi antara kepentingan pelanggan dan pengelola, sebab ujung-ujungnya kebutuhan pelangganlah yang jadi dasar kebijakan utama. Di dalamnya terkandung pengertian tentang air minum yang aman dan tarif yang terjangkau.

Dikeluarkannya Water Wise Rules bertujuan untuk membatasi pemakaian alat-alat semprot air yang amat boros air. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah terancam sanksi denda yang lumayan besar. Ancaman denda 220 dolar untuk pelanggar individual, 550 dolar bagi pebisnis. Bila pelanggaran itu berupa pencurian, dendanya 2.200 dolar dan 4.400 dolar terhadap perusahaan-perusahaan komersial.

Ketentuan-ketentuan itu didukung penerapannya melalui pengawasan oleh staf Sydney Water yang dinamakan

Community Water Officers melalui pengecekan secara acak dan laporan kelompok intelijen. Dengan demikian, penyalahgunaan air minum dibatasi.

Jadi jelas, investasi dilakukan demi kebutuhan pelanggan, sehingga terlaksana apa yang dikehendaki, yakni, mau tidak mau, kepentingan atau kebutuhan pelangganlah yang jadi dasar pengelolaan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan.

### Investasi besar-besaran

Sejak 2010, proyek desalinasi Sydney mulai beroperasi dengan lisensi yang diberikan kepada perusahaan internasional Veolia Water. Proyek yang bersifat *leasing* itu berdurasi 50 tahun.

Sydney Water adalah perusahaan air minum terbesar di Australia yang beroperasi di wilayah seluas 12.700 kilometer persegi. Dalam lima tahun ke depan, biaya air minum di Sydney akan meroket hingga 50 persen karena kebutuhan yang meningkat tajam.

*Booming* penduduk, biaya pun meroket. Dalam 10 tahun ke depan, Sydney Water akan mengeluarkan investasi

# Evolusi dan Evaluasi MAJALAH AIR MINUM

*Sekali Mengalir Terus Mengalir.* Motto Majalah Air Minum (MAM) tersebut memberikan spirit kepada manusia perihal keharusan bergerak dan aktif selama hayat dikandung badan. "Aliran" MAM tersebut tidak dapat dipisahkan dari "sumber airnya", yaitu PDAM-PDAM pada masa itu dan organisasi paguyubannya: PERPAMSI. Tiga tahun setelah PERPAMSI hadir, maka lahirlah MAM pada 1 Februari 1975 sehingga pada 1 Februari 2025 berusia 50 tahun. Dirgahayu!

## Evolusi

Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan perlahan atau evolusi sudah terjadi pada MAM. Kualitas tampilan, mutu cetakan, dan isi (*content*) majalah selama tiga dasawarsa pertama bisa dinilai berada di bawah majalah yang terbit komersial pada waktu itu, seperti majalah anak-anak, majalah remaja, dan majalah berita pekanan atau bulanan. Namun 20 tahun terakhir ini wajah (*cover*) MAM sudah lebih indah (*eyecatching*), bahasanya bernes dan kontennya ilmiah (*scientific*). Tampilannya lebih baik daripada majalah anak-anak, remaja, dan majalah berita mingguan yang kertasnya lebih tipis daripada MAM.

Evolusi pertama tersebut terjadi pada masa perilisan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). UU SDA tersebut mendapat perhatian lebih dari insan PDAM, PERPAMSI, dan pemerintah daerah. Waktu itu, MAM mengangkat tema tersebut dan menuliskan sejumlah pro-kontra dan kontroversinya. Organisasi masyarakat pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah dibatalkan oleh MK pada tahun 2013, kini sudah ada UU No. 17/2019 tentang SDA yang menguatkan pasal sosioekologi, yakni pasal 33 UUD 1945

dengan harapan mencapai tujuan nomor 6 SDGs: *Clean Water and Sanitation*.

Evolusi kedua terjadi lagi. Dua tahun berselang, MAM sudah terbit dengan format digital, menjadi *e-magazine* atau *paperless*. Sejumlah surat kabar papan atas sudah lebih dulu terbit secara digital sebagai pelengkap edisi cetaknya yang menurun oplahnya. Evolusi kedua ini menjadi kemestian karena terjadi



pemutakhiran teknologi ponsel yang mengiringi percepatan koneksi internet di seluruh Indonesia. Evolusi ini pada saatnya akan bernilai positif bagi MAM karena berpeluang menambah kelompok (*cohort*) pembacanya sehingga makin variatif di luar ceruk khasnya (*captive market*).

Format digital pun lebih mudah diakses dan familiar di kalangan mahasiswa program studi teknik lingkungan, pengairan, sipil, manajemen, humas, akuntansi, dan prodi lain yang



DOK. TRIBUN

Oleh **Gede H. Cahyana**  
Pengamat Air dan Sanitasi Universitas  
Kebangsaan RI

relevan dengan air minum, air limbah, atau manajemen bisnis. Metamorfosis ke format digital ini akan menuai manfaat pada masa depan karena terjadi perubahan kebiasaan baca-tulis masyarakat yang akrab dengan ponsel *smart*. Kesertaan MAM dalam transformasi penerbitan ini seperti berada di *the point of no returns*, harus beranjak dari era Gutenberg (percetakan) ke era siber (*cyberspace*) agar airnya terus mengalir.

Namun, kehadiran sesuatu yang baru selalu berkaitan dengan sesuatu yang lama. Secanggih apa pun era siber tetaplah era percetakan berperan penting dalam merawat eksistensi MAM. Apresiasi layak diberikan kepada pengelola MAM pada masa awal terbitnya, pada masa pertengahan dan pada masa evolusi pertama hingga sekarang. Ada insan kreatif dan inovatif di belakang layar yang memoles dan memikirkan kontennya agar bertahan dan berkembang. Akan bertambah kukuh lagi apabila terwujud kolaborasi guyub antara *stakeholders* MAM, PERPAMSI dan BUMD AM.

## Evaluasi

Setengah abad sudah MAM memberikan informasi tentang air minum. Lewat rubriknya, MAM menyuarakan keinginan PDAM yang belum sehat pada waktu itu dan menjadi *loudspeaker* atas ragam keluhan masalah di PDAM agar diketahui oleh pemerintah pusat, kepala daerah, pebisnis IPAM, dan akademisi. MAM menjadi penyambung lidah PDAM dengan cara menyediakan rubrik khusus, yaitu Gema PDAM dan Profil PDAM yang kini menjadi Gema dan Profil. Keadaan umum PDAM (BUMD AM) bisa diketahui di rubrik tersebut.



Ada pula rubrik Romantika Tukang Ledeng yang menyajikan pengalaman insan PDAM. Rubrik ini bertutur tentang kemanusiawian tukang ledeng yang mengalami kejadian menyenangkan dan menyedihkan dalam pekerjaannya, kadang-kadang salah kaprah dan lucu. Pembaca pun lantas tersenyum. Kisah humanis di dalam rubrik ini seperti titian muhibah antar-insan PDAM dari berbagai daerah, dari cabang di pelosok kecamatan. Tiga rubrik tersebut bernilai positif karena menjadi media berbagi informasi kondisi PDAM sehingga dapat dijadikan pembanding (*benchmark*) oleh PDAM lainnya.

Di dalam rubrik Internasional, pembaca memperoleh pengetahuan tentang keadaan air baku, air minum, dan sistem PAM di mancanegara. Ada berita tentang potensi konflik air baku atau perang karena air di beberapa negara yang dilintasi sungai yang sama. Kehadiran rubrik berbahasa

Inggris, *English Summary of Selected Articles*, menyasar pembaca non-WNI. Terbitan digital dalam bahasa Inggris ini bermanfaat bagi orang asing yang bekerja di *water companies* yang bekerja sama dengan PERPAMSI atau BUMD AM. Bisa juga dijadikan sarana belajar memahami bahasa Inggris karena artikel yang berbahasa Indonesia juga tersedia.

Selanjutnya adalah rubrik Saintek. Rubrik ini memberikan pengetahuan kepada pembaca yang tidak berlatar pendidikan teknik sipil, teknik mesin (ilmu pompa, blower, kompresor, instrumentasi, actuator, hydrophore), teknik penyehatan, dan teknik lingkungan. Rubrik ini menjadi inspirasi dalam teknologi pengolahan air, bangunan dan peralatan di sumber air, peralatan mekanikal di pipa transmisi-distribusi, tips meningkatkan efisiensi filter, efisiensi reagen kimia, reduksi kebocoran pipa distribusi, air tak berekening, hingga pembayaran rekening

**“** Manfaat MAM akan makin terasa apabila BUMD AM memiliki tim yang menganalisis konten MAM untuk dibahas bersama agar bisa diambil pelajaran atau diterapkan. **”**

air menggunakan teknologi informasi.

Bersama dengan kontributor artikel lainnya, penulis ikut mengisi rubrik Saintek. Artikel pertama di MAM berjudul *Mendewakan Air, Mendewasakan PDAM*, terbit pada Edisi 108, September 2004. Penulis mengetahui wajah baru MAM menjelang perhelatan Nusantara Water 2004, 19-20 Agustus 2004 di Jakarta Convention Center. Pada waktu itu, penulis ke kantor MAM di Pejompongan dan membeli edisi-edisi sebelum Agustus 2004 seperti foto terlampir.

Sudah banyak manfaat yang diberikan MAM kepada insan PDAM atau BUMD AM, pebisnis keairan, dan pendidikan. Pembaca bisa memperoleh pengetahuan, ilmu, dan teknologi keairan dari majalah yang ajek terbit setiap bulan dengan mengembang amanat pembangunan air minum dan sanitasi. MAM juga membagikan informasi tentang pelatihan *software Epanet, Watercad, software akuntansi tagihan rekening air, software manajemen, dan benchmarking*.

Format digital MAM dapat memperluas jangkauan informasi dan inovasi teknologi air minum. Manfaat MAM akan makin terasa apabila setiap BUMD AM memiliki tim yang menganalisis konten rubrik-rubrik untuk dibahas bersama direksi agar bisa diambil pelajarannya atau diterapkan di daerahnya. Akan kian semarak apabila disediakan rubrik untuk diisi oleh Dewan Pengawas.

MAM pun dapat berperan sebagai katalisator netral untuk mengguyubkan anggota PERPAMSI, mengeratkan kolaborasi antara BUMD AM. Sudah saatnya merintis ceruk baru di kalangan mahasiswa teknik lingkungan di semua kampus sehingga relevan terus bersama zaman. Tentu saja evaluasi orang per orang bisa berbeda. Apa pun hasilnya, mengalirlah tiada henti. ■

# Menyediakan Air Minum Aman dari Lahan Gambut

Tanah gambut merupakan hadiah dari alam yang terbentuk selama ribuan tahun. Sekitar 180 negara memiliki lahan gambut, berupa rawa atau lahan basah. Gambut merupakan ekosistem yang unik dan mempunyai peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lahan gambut, secara global tanggal 2 Februari diperlakukan sebagai Hari Lahan Basah Sedunia atau *World Wetlands Day* dan pada 2 Juni khusus diperlakukan sebagai Hari Gambut Sedunia.

Penulis: **Eliza Bhakti**  
ASN Kementerian PU

**M**engutip [asean.org](http://asean.org), Indonesia memiliki lahan gambut terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 20,2 juta hektare. Jumlah ini bahkan setara dengan 88 persen dari total lahan gambut di kawasan Asia Tenggara dan menyimpan sebesar 57 giga ton karbon. Jumlah ini 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan karbon yang tersimpan di hutan hujan tropis biasa atau tanah yang berminal.

Di Indonesia, wilayah dengan daerah gambut sekitar 15,6 juta hektare. Persebarannya ada di pulau Sumatera (7,1 juta Ha), Kalimantan (4,8 Ha), dan di Papua (3,7 Ha). Tanah gambut paling luas terdapat di Sumatera, disusul Kalimantan dan Papua. Di Sumatera, penyebaran terluas lahan gambut terdapat di sepanjang pantai timur, yaitu di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh. Mengutip penelitian

Wahyunto (2014), persebaran lahan gambut antara lain di dataran sempit pantai barat Sumatera, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan (Rawa Lunang), Agam, Pasaman, dan di Muko-muko (Bengkulu).

Secara kasat mata, air di wilayah gambut tampak coklat kemerahan seperti air teh yang pekat, menandakan

kandungan senyawa organik terlarut cukup tinggi. Karakteristik lainnya ialah derajat keasaman tinggi (pH rendah), kandungan kation yang terkandung rendah, serta kekeruhan dan kandungan partikel tersuspensi rendah.

Sayangnya, banyak daerah di Indonesia terindikasi rawan air karena





sulitnya mengolah air di lahan gambut. Air gambut yang tidak mengalami proses pengolahan dapat menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan, antara lain mengikis lapisan email gigi sehingga mudah keropos. Kandungan besi dan mangan yang tinggi dalam air juga menyebabkan rasa tidak enak saat diminum. Keterbatasan pengetahuan dan alih teknologi mengenai pengolahan air gambut membuat penduduk sekitar lahan gambut kekurangan air bersih. Padahal, air gambut memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai air baku apabila diolah dengan tepat.

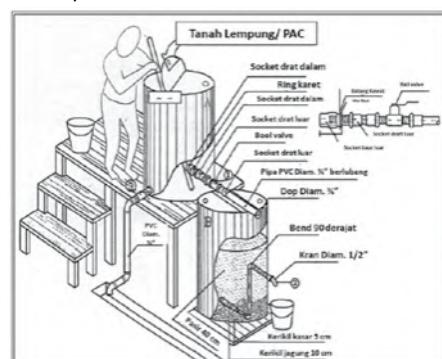
Terdapat beragam teknologi untuk mengolah air gambut. Secara konvensional, biasanya pengolahan dilakukan dengan cara menambahkan kapur tohor untuk menaikkan pH air. Metode lain, yaitu secara biologis, menggunakan bakteri untuk mengurai warna dan kandungan lain dalam air. Kemudian, sebagai pelengkap, di akhir proses pengolahan biasanya ditambahkan kaporit.

#### Teknologi tepat guna dalam proses pengolahan air gambut

Secara tradisional, pengolahan air gambut dapat dilakukan dengan pengolahan sederhana berbasis teknologi tepat guna. Pengolahan ini dapat dilakukan dalam skala kecil rumah tangga atau berbasis masyarakat. Salah satunya adalah pengolahan dengan tanah liat, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1985 di Kabupaten Kapuas. Tanah liat berfungsi sebagai koagulan alami yang dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan setempat.

Beberapa teknologi tepat guna dikembangkan untuk mengolah air gambut, salah satunya melalui biofiltrasi. Merujuk pada penelitian Kementerian PUPR pada 2020, tanaman pinang atau jambe yang memiliki nama latin *Areca catechu* dapat digunakan untuk menyerap warna dan bahan organik di air gambut. Penelitian lain membuktikan bahwa biji kelor (*Moringa oleifera*) dapat digunakan untuk menurunkan zat penyebab kekeruhan. Prinsipnya menggunakan cara ionisasi antara gugus karboksilat pada partikel-partikel biji kelor dalam air yang mempunyai muatan berlawanan, sehingga terjadi pembentukan flok yang lebih besar dan mudah untuk diendapkan.

Diperlukan edukasi dan transfer



Skema IPA gambut sederhana tanah liat.

pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengimplementasikan teknologi tepat guna. Pengolahan sederhana ini diharapkan meningkatkan akses masyarakat dalam penyediaan air minum aman.

#### Teknologi membran dalam pengolahan air gambut

Di lain sisi, BUMD air minum dapat mengembangkan teknologi lanjutan karena sumber daya yang lebih mumpuni. BUMD AM dengan sumber air gambut biasanya menyediakan air bersih melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) konvensional. Penggunaan

IPA konvensional yang tidak khusus dirancang untuk air gambut memiliki beberapa kekurangan, antara lain, memerlukan konsumsi bahan kimia yang tinggi, menghasilkan limbah lumpur bahan berbahaya dan beracun (B3), serta biaya operasional yang tinggi (sekitar Rp9.000 hingga Rp11.000 per meter kubik).

Untuk menjawab tantangan IPA konvensional tersebut, dikembangkan pengolahan air gambut dengan menggunakan membran, salah satunya dengan nano filter. Teknologi *hollow fiber nano filter* (HFNF) sudah pernah dilakukan pada instalasi pengolahan air gambut di Davao, Filipina. Di Indonesia, teknologi ini diimplementasikan di Perumdam Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP).

Prinsip pengolahan dengan teknologi HFNF yang menggunakan membran dNF080 adalah penyaringan semua molekul yang berukuran  $<1$  nano mikron dan *Molecular Weight Cut Off* (MWCO) lebih kecil 800 Dalton. Partikel warna yang bersumber dari *humic acid* dan masuk dalam kategori *natural organic matter* (NOM) dapat disaring dengan sempurna. HFNF tidak memerlukan *pre-treatment* khusus dalam hal pengolahan air gambut serta tidak memerlukan bahan kimia berupa koagulan. Sistem HFNF juga tidak memerlukan sistem *backwash* seperti dalam proses filtrasi.

Penggunaan membran memiliki keuntungan desain modul yang sederhana dan *compact*, serta biaya operasi dan pemeliharaan cenderung lebih efisien (Rp1.700-Rp2.000 per meter kubik). Pengoperasiannya pun relatif lebih mudah karena tidak memerlukan persiapan dosing bahan kimia. Lahan yang diperlukan juga relatif lebih kecil dibanding IPA konvensional. Dari segi lingkungan, teknologi ini tidak menghasilkan limbah lumpur B3 sehingga ramah lingkungan.

Menyediakan air yang aman bagi masyarakat merupakan kewajiban negara. Terobosan teknologi dan pengetahuan perlu terus dikembangkan untuk inovasi pengolahan air gambut. Inovasi harus dikembangkan baik untuk teknologi tepat guna skala individu maupun untuk pengolahan air minum skala BUMD AM. Ke depan, kita patut optimistis bahwa air minum yang aman dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya Indonesia sehat. ■



Penyediaan air perpipaan untuk wilayah perdesaan di Vietnam.

## V I E T N A M

# Komitmen Memperbaiki Layanan Air

Upaya Pemerintah Vietnam untuk mewujudkan tata kelola penyediaan akses air yang layak patut diapresiasi, terutama dalam hal pencegahan korupsi. Penegakan hukum menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan.

Penulis: **Faisal Fajar Nurroji**

Perumda Tirta Bahari Kota Tegal

**S**ebelum memasuki dekade kedua abad ke-21, operator air minum di Vietnam dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah tersebut datang sebagai efek samping dari cepatnya pertumbuhan ekonomi setelah diterapkannya kebijakan keterbukaan ekonomi (*Doi Moi*) pada tahun 1986. Salah satunya adalah masalah polusi air. Pencemaran kualitas air ini disebabkan beberapa hal seperti aktivitas industri yang meningkat, penggunaan pestisida pada pertanian, serta intrusi air laut. Lebih dari dua pertiga air

limbah terbuang tanpa melalui proses pengolahan. Air yang tercemar memberi dampak pada kesehatan penduduk serta perkembangan anak dan diperkirakan akan menggerus 3,5 persen GDP Vietnam setiap tahunnya sampai tahun 2035 (World Bank, 2019).

Masalah lainnya adalah belum meratanya distribusi air pada wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan banyak faktor. Contohnya adalah tidak adanya perhatian untuk mengembangkan kapasitas penyediaan layanan air bersih di perdesaan, kurangnya keterlibatan operator dalam proses perencanaan dan desain jaringan perpipaan, serta lemahnya kebijakan terkait tarif

hingga lemahnya kerangka regulasi sehingga menghambat peningkatan profesionalitas operator.

Masalah-masalah tersebut seakan menemui jalan buntu karena mereka juga dihadapkan dengan kurangnya sumber pendanaan yang membuat operator tidak dapat mengatasi masalah dan secara leluasa mengembangkan jaringan perpipaan. Ditambah lagi dengan belum adanya kebijakan tentang tarif. Hal ini mengakibatkan banyak operator air minum sulit untuk mencapai *cost recovery*.

### Kehadiran Pemerintah

Namun, di tengah-tengah banyaknya tantangan, Pemerintah Vietnam serius memperbaiki tata kelola penyediaan air minum. Hal itu diwujudkan dengan dihapuskannya persyaratan kepemilikan saham pemerintah dan membuka kesempatan privatisasi 100 persen bagi operator air minum. BUMD milik pemerintah provinsi menjadi bagian dari proses privatisasi. Kebijakan tersebut didukung dengan dibukanya kemitraan pemerintah dengan pihak swasta (*public private partnership*) untuk mendorong kerja sama yang lebih luas bagi operator air minum. Hal ini membuat operator air minum swasta dapat masuk dan berkolaborasi dengan operator air minum yang sudah ada.

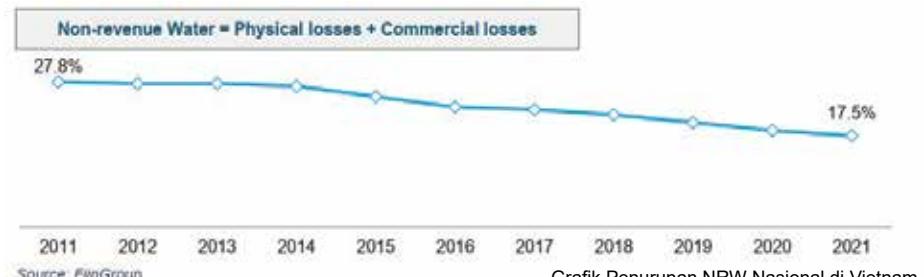
Tidak hanya itu, upaya Pemerintah Vietnam mewujudkan tata kelola penyediaan akses air yang layak juga patut diapresiasi, terutama dalam hal pencegahan korupsi. Penegakan hukum menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Menurut laporan World Bank, pada tahun 2015 saja hanya 5 persen dari perusahaan yang ada di Vietnam melaporkan adanya pungutan tidak resmi. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata negara-negara di Asia Pasifik (Asia Timur dan Asia Tenggara) yang melaporkan sebesar 32 persen.

Keseriusan Pemerintah Vietnam tersebut memberi dampak positif dengan masuknya berbagai operator air minum dari luar negeri untuk berinvestasi dan beroperasi di Vietnam. Dalam hal privatisasi, meskipun belum semua perusahaan melepaskan kepemilikan pemerintah, makin banyak penyedia layanan air bersih yang mengikuti tren privatisasi. Kini, beberapa operator air minum bahkan telah terekuitas dan bergerak di pasar saham.

**Keseriusan Pemerintah**  
Vietnam memberi dampak positif dengan masuknya para investor dari luar negeri.

### Keterlibatan operator yang sudah maju

Kebijakan *public private partnership* juga memberi jalan untuk hadirnya operator air minum swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah DNP Water. Perusahaan yang berbasis di Hanoi ini melakukan akuisisi terhadap 18 operator air minum yang sudah ada dan membuka kerja sama dengan dengan 11 operator air minum lainnya. Akuisisi dan kerja sama tersebut kemudian membentuk *holding* dan memegang 53 persen saham DNP Water. Hal ini membuat DNP Water menjadi makin kuat secara finansial. Karena itu, mereka dapat mengembangkan jaringan perpipaan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya dengan penerapan berbagai metode dan teknologi terkini.



Grafik Penurunan NRW Nasional di Vietnam.

Pada proses pengolahan, perusahaan dengan 650.000 pelanggan ini mengimplementasikan *Upflow Biological Containing Filter* (UBCF) yang dapat mengurangi partikel organik dalam air sehingga dapat mengurangi kadar polusi pada tahap awal pengolahan. Berkat teknologi ini, proses pengolahan pada tahap berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan dapat mengurangi ongkos produksi.

Selain itu, ada pula teknologi yang memadukan antara *ultra filtration* (UF) dengan *reserve osmosis* (RO). Proses ini dapat membuang metal hidroksida, padatan terapung (*floating solids*), bakteri, dan banyak partikel lainnya

sehingga mampu menghasilkan air yang lebih berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sudah diterapkan melalui *supervisory control and data acquisition* (SCADA) yang berfungsi untuk monitoring dan memperoleh data pada proses produksi dan pengolahan. Pada bidang distribusi dan pelayanan, DNP Water juga sedang dalam tahap awal pengaplikasian *geographic information system* (GIS) dan *customer relation management* (CRM). Manfaatnya untuk memudahkan pemantauan jaringan perpipaan, menganalisis kebocoran, menyimpan data pemakaian air, hingga memberikan kemudahan pembayaran tagihan air secara *online*.

Selain itu, ada pula Hanoi Water Co. Ltd yang bekerja sama dengan Jepang. Mereka mengimplementasikan hasil kerja sama tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang diberi nama *Extremely High Speed Chemical-less Groundwater Treatment* (CHEMILES). Proses ini menyatukan rangkaian tahapan pengolahan dari aerasi hingga sedimentasi menjadi satu sebelum masuk ke dalam proses filtrasi dan desinfeksi. Teknologi ini memiliki keunggulan seperti penyaringan zat-zat ammonia, besi, mangan, dan arsenik; tidak adanya penggunaan bahan kimia; proses penyaringan yang sangat cepat; dan biaya operasional yang rendah.

Ada pula inovasi yang dilakukan oleh Saigon Water Corporation (SAWACO) yang bekerja sama dengan ABB Group, perusahaan elektronik dan otomasi multinasional yang berbasis di Zurich, Swiss. Kerja sama tersebut dilakukan agar SAWACO mampu mengurangi tingkat kehilangan air hingga 500.000 meter kubik per hari dengan kendali strategis dan sistem monitoring yang bernama ABB Ability Symphony Plus. Kerja sama ini memiliki tujuan utama mengurangi tingkat NRW hingga 10 persen. ■

## Buah Manis Komitmen Pemerintah

**K**eseriusan Pemerintah Vietnam bersama dengan berbagai perusahaan operator air minum berbuah manis. Ada beberapa efek positif yang diperoleh seperti berkembangnya jaringan perpipaan 3-4 persen per tahun (FinGroup, 2024). Konsumsi air bersih juga cukup tinggi, yakni rata-rata 100 liter per orang per hari. Sampai tahun 2020, akses air minum sudah menjangkau 70 persen dari total populasi (Ministry of Planning and Investment, 2020).

Pemerintah Vietnam juga telah menetapkan penurunan tingkat NRW nasional. Program ini efektif menekan tingkat kehilangan air nasional setiap tahunnya. Pada tahun 2021 saja, tingkat NRW pada perusahaan penyedia layanan air minum secara nasional telah mencapai 17,5 persen (FinGroup, 2024).

Masalah pada jaringan perpipaan di perdesaan juga perlahan diperbaiki. Pada akhir tahun 2023, sebanyak

18.109 fasilitas penyediaan air sudah dibangun untuk melayani 9.374.264 rumah dan berkontribusi terhadap capaian layanan air untuk masyarakat perdesaan sebesar 74,2 persen (Construction, 2024). Hal ini menjadi sebuah *progress* yang sangat signifikan mengingat pada tahun 2000 baru 10 persen masyarakat perdesaan Vietnam yang memiliki akses air bersih (World Bank, 2019).

Keseriusan Pemerintah Vietnam ini tentu patut diapresiasi. Mereka bahkan rela meninggalkan nilai-nilai tradisional yang melekat pada pandangan politiknya untuk lebih terbuka terhadap perkembangan zaman terlebih pada sektor air minum yang memberikan dampak pada penduduk. Hal tersebut membuat para operator air minum optimistis untuk terus berinovasi dalam menghadapi dinamika tantangan seiring dengan perkembangan zaman.

■ FFN

# KUBIK DAN LITER

Supermarket sering menggunakan "ons" (1/10 kilogram) untuk menuliskan harga barangnya, seperti untuk buah-buahan, daging, dan ikan. Misalnya, harga anggur yang ditulis Rp3.500 (per ons) terasa lebih terjangkau dibanding ditulis Rp35.000 (per kg). Mungkinkah hal ini terasa juga dalam penggunaan "kubik" untuk tarif air ledeng?

Penulis: **Anwari Natari**  
Editor & Dosen Bahasa Indonesia

**P**erbedaan istilah sering kali melahirkan perbedaan persepsi. Dalam dunia BUMD air minum (AM), penggunaan istilah "kubik" untuk menghitung tarif air sering membuat tarif air ledeng terkesan mahal jika dibandingkan dengan harga air minum dalam kemasan (AMDK), yang umumnya dihitung per liter. Padahal, jika dilihat dari satuan yang sama, perbandingan harga antara keduanya jauh lebih mencolok daripada yang dipahami masyarakat awam.

Di Indonesia, rata-rata tarif air BUMD AM berkisar antara Rp2.500 hingga Rp5.000 per kubik, tergantung daerah. Jika dihitung per liter, tarif ini menjadi hanya Rp2,5 hingga Rp5 per liter. Bandingkan dengan AMDK yang rata-rata dijual Rp20.000 per galon (19 liter), atau sekitar Rp1.052 per liter. Jika diterjemahkan ke dalam satuan kubik, harga AMDK bisa mencapai lebih dari Rp1 juta per kubik.

Namun, perbedaan satuan ini jarang diperhatikan. Masyarakat terbiasa menganggap "Rp1.000 per liter" lebih masuk akal dibandingkan "Rp3.500 per kubik," meskipun harga AMDK sebenarnya jauh lebih mahal jika dihitung dalam skala besar. Di sinilah peran penting BUMD AM untuk mengedukasi pelanggan bahwa

tarif air ledeng sebenarnya sangat terjangkau dibandingkan alternatif seperti AMDK.

## Kenaikan vs penyesuaian

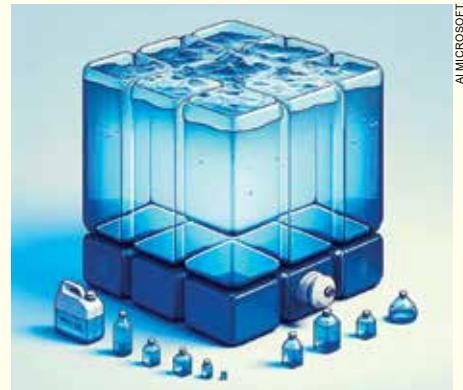
Pilihan istilah dalam komunikasi tarif juga memengaruhi respons pelanggan dan pemangku kepentingan. Misalnya, istilah "menaikkan tarif" sering kali dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan semata. Sebaliknya, penggunaan istilah "penyesuaian tarif" memberikan kesan yang lebih logis dan netral. Penyesuaian tarif menunjukkan bahwa langkah ini diambil karena adanya kenaikan biaya produksi dan operasional, bukan karena keinginan untuk menambah keuntungan.

Ketika masyarakat mendengar istilah "menaikkan tarif," reaksi yang muncul biasanya berupa penolakan atau kritik. Sementara, istilah "penyesuaian tarif" mungkin

**“ Perubahan persepsi tentang tarif air mungkin dapat menjadi langkah penting dalam mendukung perbaikan layanan BUMD AM. ”**

dapat memberikan konteks bahwa langkah tersebut adalah bagian dari proses yang wajar untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan operasional. Pendekatan ini dapat membantu pelanggan memahami situasi yang dihadapi BUMD AM, sekaligus membangun kepercayaan bahwa tarif yang ditetapkan adalah hasil dari perhitungan yang adil.

Lalu, apa dampak dari penggunaan istilah ini dalam konteks tarif air? Pertama, penggunaan "kubik" yang terdengar abstrak dapat membuat masyarakat kesulitan memahami seberapa murah sebenarnya tarif air ledeng. Padahal, air ledeng adalah kebutuhan pokok yang sangat



AIMICROSOFT

terjangkau. Kedua, istilah ini juga memengaruhi pandangan pemerintah daerah terhadap kelayakan tarif air. Dengan tarif rata-rata yang hanya Rp3.500 per kubik, banyak BUMD AM yang belum mencapai *full cost recovery* (FCR).

Untuk itu, salah satu cara yang bisa dipertimbangkan adalah mengomunikasikan tarif air dalam satuan liter. Dengan cara ini, pelanggan dapat lebih mudah memahami bahwa tarif air ledeng sebenarnya sangat murah, hanya Rp5 per liter, dibandingkan dengan AMDK yang lebih dari Rp1.000 per liter. Pendekatan ini juga dapat membantu BUMD AM dalam memperjuangkan penyesuaian tarif hingga ke tingkat yang layak tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat maupun pemda sebagai kuasa pemilik modal.

Jadi, perubahan persepsi tentang tarif air mungkin dapat menjadi langkah penting dalam mendukung perbaikan layanan BUMD AM. Tarif yang layak bukan hanya demi menutup biaya operasional, tetapi juga untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik, adil, dan merata. ■

# PAHIT GETIR KONTAMINASI AIR DI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat sampai saat ini masih dianggap sebagai negara adidaya yang menjadi kiblat dalam pengelolaan air minum. Sejak awal terbit, buku ini dengan cepat menjadi salah satu buku yang paling kontroversial dan banyak dibicarakan. Buku ini menunjukkan sisi gelap kondisi air minum di Amerika Serikat, terutama terkait kontaminan kimia dan obat-obatan di badan sungai.

Peresensi: **Eliza Bhakti**  
ASN Kementerian Pekerjaan Umum

Pembaca akan disuguhkan fakta-fakta yang mungkin tak banyak diulas di media arus utama. Kisah-kisah yang disajikan cukup mencekam, menceritakan kontaminasi bahan kimia dan pencemaran obat-obatan yang masuk ke dalam saluran air. Seth M. Siegel, sang penulis, merupakan pengusaha sekaligus aktivis air. Tulisan-tulisannya mengenai air minum telah dipublikasikan di *The New York Times*, *The Wall Street Journal*, dan *The Washington Post*.

## Kontaminasi PFOA dan PFAS

Panci antilengket merupakan salah satu perangkat dapur yang dimiliki hampir seluruh rumah tangga di dunia. Sejak diluncurkan pertama kali pada 1944, panci antilengket menjadi primadona karena nyaman dipakai menggoreng dan mudah dibersihkan. Kenyamanan memakai panci antilengket ternyata membawa beberapa persoalan baru yang dikaitkan dengan *Perfluoroctanoic acid* (PFOA) dan *per-and polyfluoroalkyl substances* (PFAS), bahan kimia yang menjadi materi pembuatan panci antilengket.

“*Welcome to Hoosick Falls*” sebagai narasi awal buku ini cukup menghentak, mengisahkan kematian

tragis beberapa warga *Hoosick Fall* dalam waktu berdekatan. Michael Hickey, salah satu warga kota yang curiga dengan fenomena ini, mulai melakukan penyelidikan mengusut penyebab kematian ayahnya dan penduduk kota lain. Hasil risetnya mengerucut, penyebab kematian beruntun adalah kanker ginjal akibat air yang terkontaminasi limbah pabrik panci antilengket yang letaknya tak jauh dari rumah mereka.

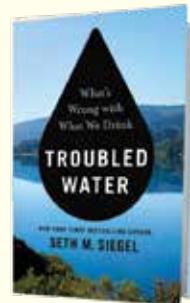
*Perfluoroctanoic acid* (PFOA), lapisan di panci antilengket, diklaim menjadi biang kerok menurunnya kondisi kesehatan penduduk kota yang berada di negara bagian New York tersebut. Zat kimia tersebut mencemari air yang dikonsumsi hampir seluruh penduduk kota. Kisah dari kota kecil *Hoosick Fall* ini kemudian menjadi *headline news* dan menjadi isu nasional.

**“ Hampir setengah dari isi buku membahas solusi kontaminasi air melalui peran kebijakan publik. ”**

Siegel menuduh Environmental Protection Agency (EPA) lalai menjamin kualitas air warga. Ada lusinan parameter kualitas air minum yang tidak di-update dalam rentang 25 tahun. Melalui buku ini, Siegel menggecam EPA untuk segera merevisi ambang batas PFOA yang diperbolehkan sebagai baku mutu air.

## Limbah obat-obatan

Persoalan kedua yang tak kalah membahayakan sumber air adalah limbah obat-obatan yang sering dibuang ke badan air tanpa pengolahan lanjutan. Maraknya penggunaan pil KB yang mengandung estrogen menyebabkan residu dari obat berupa hormon estrogen mencemari sumber-sumber air. Estrogen di dalam air diyakini telah merusak sistem hormonal spesies ikan. Dalam sebuah penelitian, hal ini berdampak pada rasio jenis kelamin cenderung tidak seimbang pada ikan



**Judul buku:** Troubled Water: What's Wrong With What We Drink

**Penulis:** Seth M. Siegel

**Penerbit:** Thomas Dunne Books

**Tahun terbit:** 2019

**Tebal:** 339 halaman

**ISBN:** 9781250132543

betina dan mengakibatkan kegagalan reproduksi yang meluas.

Obat-obatan lain yang mencemari sungai adalah obat antidepresan. Apabila air terkontaminasi zat ini akan mengakibatkan pubertas dini, ketidakmampuan belajar, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), bahkan autisme. Semua ini adalah gangguan pada sistem endokrin tubuh, kemungkinan besar dari kontaminan kimia di dalam air.

Beragam persoalan pencemaran obat-obatan di badan air ini bisa dicegah apabila Food and Drug Administration (FDA)/Badan Pengawasan Obat Amerika dan EPA bersama-sama mengawasi pembuangan obat-obatan ke badan sungai dan menguji keberadaan kontaminan serta pengaruhnya terhadap kesehatan manusia.

Buku ini patut dibaca para insan air minum, karena hampir setengah dari buku membahas solusi kontaminasi air melalui peran kebijakan publik. Di Indonesia sendiri masih minim peraturan terkait ambang batas PFOA dan PFAS serta obat-obatan di badan air. Isu kontaminasi ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi operator air minum dan para pemangku kepentingan dalam menetapkan parameter kualitas air demi tujuan air aman untuk semua. ■

Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar

## Peresmian Proyek Percontohan ZAMP



Perumda Tirta Uli, berkolaborasi dengan USAID IUWASH, meresmikan Zona Air Minum Prima (ZAMP). Peresmian dilakukan Wali Kota Dumai Susanti Dewayani, di kompleks Perumahan Meranti Permai, Kecamatan Siantar Utara, Selasa (10/12/24). Hadir pada saat peresmian Deputy of Mission Director USAID Erin Nicholson, perwakilan Konsulat Amerika, serta perwakilan dari kementerian terkait.

Menurut Direktur Utama Perumda Tirta Uli Arianto ST, MT, proyek pembangunan ZAMP dimulai lewat *kick off*

meeting pada Februari 2024. Penetapan ZAMP ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kontinuitas layanan 24 jam, tingkat kehilangan air yang rendah, dan memiliki kontrol dalam bentuk distrik meter area.

Pada proses pengujinya, seluruh syarat teknis yang dibutuhkan juga terpenuhi dengan baik. *Turbidity* mencapai angka 0, pH air di angka 7,5, dan sisa klor 0,2 mg per liter. Hasil pengujian ini, papar Arianto, telah memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun

2023 sebagai kualitas air minum aman.

"Kami mengharapkan dukungan pemerintah dan seluruh *stakeholder* serta USAID IUWASH Tangguh untuk terus bersama-sama kami dalam mendukung peningkatan pelayanan Perumda Tirta Uli dan mereplikasi ZAMP ini di kawasan lainnya," katanya.

Terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai salah satu *pilot project* ZAMP bersama Kota Magelang dan Kota Salatiga membuat Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, bahagia dan bangga. "Masyarakat mengucapkan terima kasih karena Kota Pematangsiantar menjadi ZAMP," katanya.

Sebagai informasi, peresmian ZAMP Perumdam Tirta Uli menjadi *milestone* atau pencapaian penting ZAMP di luar Pulau Jawa, yang seiring dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk bertransformasi dalam hal penyediaan akses air minum. Pada tahun 2020 sampai 2024, melalui *roadmap* induk air minum aman, pemerintah menargetkan terbentuknya 34 BUMD AM yang memiliki ZAMP. Pada 2030, jumlah BUMD AM yang bisa menerapkan ZAMP ini ditargetkan mencapai 84 BUMD AM. ■

**Jimmi M Simatupang/Dorlim M  
Pasaribu**  
Perumdam Tirta Uli Kota  
Pematangsiantar





Ramah tamah bersama Direktur Akademi Tirta Wiyata (Akatirta) yang baru dilantik, Senin (20/1/2025).

## Pelantikan Direktur Baru Akatirta Magelang

Akademi Tirta Wiyata (Akatirta) yang berkampus di Kota Magelang, Jawa Tengah, baru saja melaksanakan sukses kepemimpinan. Pada Senin (20/1/2025), Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono secara resmi mengambil sumpah dan melantik Rohmad Hadiwijoyo untuk menduduki posisi Direktur Akatirta.

Penulis: **Rois Said**



**Dr. Rohmad Hadiwijoyo**  
Direktur Akatirta

Berlangsung di Atria Hotel Magelang, acara pelantikan disaksikan oleh civitas akademika Akatirta dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Ketua Yayasan Pendidikan Tirta Dharma (YPTD) PAMSI H. Muslih, Ketua Dewan Pengawas YPTD PAMSI Erlan Hidayat, dan Tenaga Ahli YPTD PAMSI Audelta Elviezon. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Menurut Arief Wisnu, Akatirta merupakan lembaga pendidikan yang bersentuhan langsung dengan sektor air minum di Indonesia. Sudah banyak lulusannya yang terserap dan bekerja di BUMD AM di seluruh Indonesia. Karena itu, dengan kepemimpinan yang baru ini, Akatirta diharapkan makin meningkat, baik kualitas pendidikannya maupun lulusannya.

"Saya berharap, kepemimpinan yang baru ini akan membawa keberlanjutan di Akatirta ini menjadi lebih pasti. Dimulai dari visi internalnya, manajemennya, sampai pada puncak pimpinannya. Ke depan, Akatirta diharapkan dapat mengembangkan program-program studi (prodi) yang mendukung sektor air minum, sehingga pada tahun 2028 Akatirta menjadi lebih unggul," harap Arief Wisnu.

Menurut Ketua YPTD PAMSI H. Muslih, sukses kepemimpinan di Akatirta tidak lepas dari transformasi yang sedang dijalankan oleh YPTD PAMSI sebagai induk dari Akatirta. Artinya, pembentahan di kampus yang berdiri tahun 2000 itu tidak berdiri sendiri. Karena itu, dilantiknya Rohmad Hadiwijoyo sebagai Direktur Akatirta yang baru diharapkan dapat mewujudkan apa yang sudah sejak

lama dicita-citakan oleh PERPAMSI selaku pendiri Akatirta.

"Kami ingin melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan, bahwa ke depan Akatirta ini akan menjadi Politeknik, dan kita tetap akan melakukan itu sehingga kita perlu perbaikan tata kelola dari Akatirta sendiri," ujar Muslih.

Di lain pihak, dengan amanah yang diembannya untuk menakhodai Akatirta, Rohmad Hadiwijoyo optimistis Akatirta akan mampu mencetak lulusan teknik lingkungan yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar. Terlebih, lanjut Rohmad, dari sekitar 65 ribu pegawai yang bergerak di bidang air minum, baru sekitar 20 ribu yang bersertifikasi. "Ini menjadi peluang bagi setiap mahasiswa dan lulusan Akatirta untuk terserap di pasar kerja," tegas Rohmad.

Setelah acara pelantikan Direktur Akatirta, pihak YPTD PAMSI juga menandatangi nota kesepakatan kerja sama dengan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal dan PT Moya Indonesia untuk membantu pengembangan Akatirta. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Said selaku Ketua Dewan Pembina Politeknik Harapan Bersama menyambut baik terpilihnya Rohmad Hadiwijoyo sebagai Direktur Akatirta.

Mantan Menteri ESDM tersebut mengaku mengenal dengan baik sosok Rohmad dengan segenap kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Karena itu, ia berharap Rohmad dapat menjawab tantangan-tantangan yang dibebankan di pundaknya untuk membawa Akatirta lebih maju lagi. "Selamat kepada Dr. Rohmad, semoga bisa membawa Akatirta menggengong tantangan-tantangan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PERPAMSI," ujar Sudirman Said saat memberikan sambutan. ■



# orum Pembaca

Di setiap edisi, Redaksi mengangkat sebuah topik pertanyaan untuk anda komentari. Berikan komentar anda melalui Fan Page Facebook "Majalah Air Minum". Hanya jawaban terpilih yang akan ditampilkan. Pertanyaan juga kami ajukan secara personal melalui pesan WhatsApp kepada beberapa pembaca di basis data kami.

**Tahun ini, Majalah Air Minum PERPAMSI merayakan perjalanan emasnya yang telah mencapai usia 50 tahun. Sebagai satu-satunya media yang secara khusus mengupas dunia air minum di Tanah Air, majalah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan industri air minum di Indonesia.**



#### Hasanuddin Kamal

Selamat ulang tahun ke-50 tahun Majalah Air Minum. Semoga lebih banyak menyajikan informasi yang mengedukasi BUMD AM untuk lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



#### Eliza Bhakti

MAM menjadi saksi jejak berliku para tukang ledeng di tanah air. Banyak terobosan yang dilakukan MAM dalam merangkul pembacanya, salah satunya dengan kekuatan media sosial dan lahirnya rubrik-rubrik baru. MAM juga menjadi wadah untuk meningkatkan literasi sektor air minum (*water literacy*). Harapannya ke depan MAM terus bertumbuh bersama para insan air minum menyongsong masa depan gemilang sektor air minum. Meski ada momen-momen penuh onak duri, tentu banyak kegembiraan yang dicapai dalam setengah abad ini. Dirgahayu Majalah Air Minum!



#### Kartika Chandra

Selamat ulang tahun ke-50, MAM PERPAMSI! Semoga dapat terus menjadi jendela informasi yang terpercaya, menginspirasi, dan mengedukasi seluruh sobat air di Indonesia. Dengan semangat baru, semoga MAM PERPAMSI semakin dekat di hati dan mampu menghadirkan informasi yang berkualitas.



#### Noer Hidayah

Selamat, semoga MAM selalu melayani dan menginspirasi insan air minum Indonesia. Jaya selalu MAM PERPAMSI.



#### Whisnu Adinugros

Di tengah gempuran *brainrot*, MAM konsisten memberikan informasi yang berkelas dan memotivasi untuk terus bertumbuh. Semoga di usia emasnya, MAM selalu menjadi jembatan kesuksesan tukang ledeng di jalur literasi.



#### Welly Nugraha

Keberadaan Majalah Air Minum sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan para insan tukang ledeng, karena selain memuat informasi terkini seputar perkembangan dunia air minum juga membedah tuntas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan air minum, seperti regulasi, air baku dan lain sebagainya. Dirgahayu MAM ke-50, semoga di usia emas, semakin sukses dan maju, tetap menjadi *partner* dalam memberikan informasi terkini bagi pengelola air minum di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya bisa didukung melalui media *online* dan media sosial yang diikuti seluruh insan tukang ledeng di seluruh Indonesia.

# FYI

*Ikuti akun instagram Majalah Air Minum terbaru. Dapatkan informasi seputar isu dunia perairminuman dan sanitasi, serta kegiatan asosiasi PERPAMSI.*



@mam\_perpamsi



Majalah Air Minum





## MENANGKAP “BURONAN”

Suatu hari, Oktober 2024, saat masih bertugas sebagai Duta CIS (*Customer Information System*), saya menerima pelanggan, seorang kepala cabang sebuah resto di Surabaya. Ia mengadukan tunggakan rekening restonya yang berakibat akan dilakukan pencabutan meter oleh PDAM.

Padahal, menurutnya, pembayaran sudah dilakukan secara rutin tiap bulannya, dengan membawa bukti pembayaran. Setelah dicek di bukti pembayarannya dan kemudian dicek di sistem PDAM, ternyata ia memang menunggak tiga bulan.

Setelah saya cek ulang, ada kejanggalan pada bukti pembayaran yang diserahkan. Saya cek lebih detail, ternyata bukti pembayaran palsu dan ada data yang didekrit, yaitu bulan pembayarannya. Pelanggan tersebut kaget dan menggerutu karena tiap bulan perusahaannya telah menyerahkan uang ke salah satu admin perusahaan untuk membayar.

“Waduh ndak beres ini admin saya. Pak, mohon jangan dicabut dulu. Saya akan hubungi admin saya dulu karena sampai siang ini dia belum datang ke kantor,” ujar pelanggan tersebut.

Saya pun berkoordinasi dengan bagian penertiban dan memberi toleransi hanya satu hari. Setelah pelanggan tersebut balik ke kantornya, saya mendapat kabar dari rekan-rekan CS bahwa admin perusahaan tersebut paginya datang ke CS untuk meminta

keringanan, tetapi ditolak karena sudah menunggak tiga bulan.

Ketika hal ini saya konfirmasi ke si kepala cabang, ia pun kaget. Sang kepala cabang kemudian mencari keberadaan si admin ke rumahnya dan rumah orangnya, hasilnya nihil. Setelah pencarinya tidak membawa hasil, kepala cabang menghubungi saya untuk membuat surat pernyataan segera melunasi tunggakan. Sekitar pukul 2 siang, kepala cabang ini sampai di kantor dan menandatangani surat pernyataan. Ia juga bercerita si admin membawa kabur uang perusahaan yang nominalnya puluhan juta untuk membayar tagihan air.

Tidak berselang lama, saya mendapat kabar bahwa si admin tiba-tiba datang ke kantor PDAM untuk melakukan pelunasan. Saya pun langsung mengabarkan ke kepala cabang tersebut yang langsung menuju kantor PDAM. Ia lalu meminta saya untuk menahan sebentar si admin ini.

Saya pun mencari ide agar si admin yang statusnya saat itu “buronan” perusahaan tidak lari. Akhirnya, saya putuskan untuk meng-handle sendiri



admin ini, dan proses pelunasannya saya atur lebih lama, sehingga si admin tidak buru-buru keluar kantor. Saya juga kontak pengamanan kantor untuk berjaga ketat agar admin ini tidak kabur. Tidak lama kemudian, si kepala cabang tiba dan proses pelunasan rekeningnya sudah saya selesaikan.

Setelah bertemu dengan admin dan meminta penjelasan, kepala cabang pamit sembari menggeret si admin untuk mempertanggungjawabkan perbuatananya. ■

**Rahmad Zakariyah**

Perumda Surya Sembada Surabaya



ALIFIA NAYELI KUSUMAWATI  @alifiaa.nk

## MENGGAPAI MIMPI

Mendekati kelulusan SMA pada tahun 2021, Alifia menetapkan hati untuk melanjutkan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Malang. Namun, hidup kerap menghadirkan pilihan besar yang mengubah segalanya. Ketika Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun membuka program beasiswa ikatan dinas untuk berkuliah di Akademi Teknik Tirta Wiyata (Akatirta) Magelang, kesempatan itu tak disia-siakan dan menjadi momen penting.

Penulis: **Rahmad Zakariyah**

**A**walnya berat meninggalkan kampus pertama saya di Poltekkes Malang. Tapi, tantangan baru ini membuat saya yakin, apalagi Akatirta adalah satu-satunya kampus di Indonesia yang fokus pada bidang air," ujarnya. Dengan tekad kuat, ia lulus tes dan berhasil menerima beasiswa penuh selama tiga tahun.

Berbekal rasa penasaran dan semangat belajar, gadis kelahiran Ponorogo, 3 Juli 2003, ini menjalani masa kuliah dengan berbagai pengalaman berkesan. Kesempatan menjadi asisten laboratorium selama dua semester memberinya banyak pelajaran, terutama saat mendalami pengolahan air minum yang aman dan standar kualitas air. "Pertama kali turun ke lapangan untuk PKL, saya melihat bagaimana teori di kelas dapat diterapkan dalam situasi nyata. Itu momen yang sangat berharga," kenangnya.

Di Akatirta, dukungan dari dosen juga menjadi bagian tak terlupakan. Menurut gadis yang mengusung tugas akhir berjudul "Evaluasi Kinerja dan Efisiensi Energi Pompa Transmisi di Sumber Wendit 1 Perumda Tugu Tirta Kota Malang" ini, para dosen di Akatirta tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga berbagi pengalaman lapangan yang menginspirasi para mahasiswa. Semua itu makin memperkuat kecintaannya pada dunia air minum, terutama kesadaran akan pentingnya air berkualitas untuk kesehatan masyarakat.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akatirta, ia kembali ke Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai staf subbagian kualitas air bagian produksi. Tugasnya mencakup pemeriksaan kualitas air di sumber, distribusi, hingga pelanggan, serta pelaporan hasil analisis fisik, kimia, dan biologi.

"Hal yang paling menarik adalah bisa langsung mengaplikasikan teori yang saya pelajari di bangku kuliah ke dunia kerja, terutama saat turun ke lapangan berinteraksi dengan pelanggan," ungkap Afilia, yang meraih IPK 3,51 (*Cumlaude*) saat Wisuda Ahli Madya ke-22 Akatirta Magelang (19/10/24).

Ke depan, ia berencana untuk terus mengembangkan kariernya di bidang kualitas air dan teknik produksi. Ia juga berambisi mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme. Harapannya, ia mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Madiun tentang pentingnya konservasi air. ■



DOK. PRIBADI

**“ Hiduplah seperti air, mengalir dan memberi manfaat. ”**



PT PRALON



PT WILO PUMPS INDONESIA



PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA



PT MECOINDO ITRON INDONESIA



PT ANDRITZ HYDRO



AQUABREG BV



PT GLORY CITRA MUDA PERKASA



PT MOYA INDONESIA



PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA



PT TIRTA GEMAH RIPAH



ORACLE INDONESIA

Life Is On



PT SCHNEIDER INDONESIA



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK



PT KWARSA HEXAGON



Melayani Sepenuh Hati



PT PAM LYONNAISE JAYA



PT MATAHARI PUTRA MAKMUR  
(TRILLIUM UNNU)



PT BOJONG WESTPLAS



PT ONDA MEGA INDUSTRI



PT DHH TRADING INDONESIA



People for Process Automation



PT KSB INDONESIA



PT PROTECH AUTOMATION SOLUTION



PT BETA PRAMESTI ASIA



PT KROHNE INDONESIA



PT LAUTAN AIR INDONESIA



PT PADMA PANJI PRATAMA



PT UWT INDONESIA



PT MAXON PRIME TECHNOLOGY



PT HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI  
(UNILON)



PT BIMA SAKTI ALTERRA



R&D MULTIPLES (METAL CAST) PVT. LTD.



METRODATA



PT VEGA INSTRUMENTS  
INDONESIA



PT GEORG FISCHER INDONESIA



PT FLOW CONTROL INDONESIA



PT TIGER WATER SOLUTIONS



"PT ADIKA TIRTA DAYA



PT AVK FUSION INDONESIA



Measurement, Calibration, Control Systems Electrical



PT DAUN BIRU ENGINEERING



PT CAKRAWALA INDOPAC



PT TELKOM INDONESIA



PT. MULTI GALA NUSANTARA



PT ABB SAKTI INDUSTRI



PT DANFOSS INDONESIA



PT PRAWIRO SARMI



PT BERINA TIRTA GEMILANG



PT SIEMENS INDONESIA



PT. HIOKI ELECTRIC INDONESIA



PT SYSLAB



PT ANUGERAH TIRTA SUKSES



PT BAYU SURYA BAKTI  
KONSTRUKSI



PT UNIVERSAL ECO PASIFIC



PT WAHANA SOLUSI PINTAR



PT MITRACOMM EKASARANA



PT MULTI INSTRUMENTASI



solution for your fluid management



PT IAPMO GROUP INDONESIA



PT SUEZ WATER TREATMENT INDONESIA



PT ARITA PRIMA INDONESIA TBK



PT GRUNDFOS TRADING INDONESIA



PT WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY



PT KINDRACO HARDWARE SDN. BHD.



PT TAWADA GRAHA



WATSON-MARLOW INDONESIA



PT INDOJAYA MITRA SARANA



PT AMARTEC SUNGAI KENCANA



PT INNOMOTICS MOTORS AND SOLUTIONS



PT GUSSE STRATEGIC INDONESIA



PT INTAN PERTIWI NUSANTARA



**PERPAMSI**  
TIRTA DHARMA INDONESIA WATER SUPPLY ASSOCIATION

# iuwwef

INDONESIA WATER & WASTEWATER EXPO & FORUM

JAKARTA CONVENTION CENTER, 11-13 JUNE 2025



**THE BIGGEST  
WATER EVENT  
IN INDONESIA**



[www.perpamsi.or.id](http://www.perpamsi.or.id)



@perpamsi